

## LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

## STRATEGI AKSELERASI PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

#### **Disusun Oleh:**

Nama : Dwi Ariany

NIP : 196910211994032001

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Lembaga Administrasi Negara

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XX
KEMENTERIAN PERTANIAN
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2022





## LEMBAR PENGESAHAN

## PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

Judul

: Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi

Negara

Nama

: Dwi Ariany, S.Sos, M.Si

NIP

: 196910211994032001

Unit Kerja

: Biro Perencanaan dan Keuangan

Telah diuji di depan Penguji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022.

Mentor

Dra. Army Winarty, M.Si

NIP. 196912051994012001

Pembimbing/Coach

<u>Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc</u> NIP. 19590329 984031002

Penguji

NIP. 196912021994031002





## LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dwi Ariany, S.Sos, M.Si

**NDH** 

: 16

Jabatan

: Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahn yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul: "Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi Negara."

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 November 2022

Yang Menyatakan,

Mengetahui, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dra. Army Winarty, M.Si

Dwi Ariany, S.Sos, M.Si

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek perubahan ini disusun dengan latar belakang kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara yang belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dengan capaian kinerja anggaran yang fluktuatif setiap tahun. Dalam rangka mewujudkan kinerja anggaran yang optimal, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang bertujuan untuk memberikan acuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan untuk memberikan motivasi kepada Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata menemui kendala, di antaranya adalah karena beberapa ketentuan di dalam Peraturan tersebut perlu penyesuaian dan pengembangan sehingga perlu dilakukan reviu terhadap Peraturan tersebut.

Dalam rangka melakukan reviu terhadap Peraturan Kepala LAN tersebut telah dilakukan FGD dengan para stakeholders baik internal maupun eksternal. Dalam rangka pemenuhan akuntabilitas hasil penilaian, akan dilakukan pengumuman hasil penilaian secara resmi melalui website resmi Lembaga Administrasi Negara dan juga melalui sistem informasi yang dibangun secara android. Dengan publikasi hasil penilaian tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi unit kerja dan satuan kerja di Lembaga Administrasi Negara dalam pencapaian kinerja anggaran yang lebih optimal sehingga harapan untuk memperoleh penghargaan atas kinerja anggaran dapat diperoleh setiap tahun secara berkesinambungan dari Kementerian Keuangan. Selain itu publikasi hasil penilaian kinerja anggaran secara digital ini diharapkan dapat menjadi alat monitoring dan salah satu penyumbang nilai bagi keterbukaan informasi publik yang penilaiannya dilakukan setiap tahun oleh Komisi Penyiaran Publik.

Terkait dengan antisipasi permasalahan yang terjadi, di samping dilakukannya reviu terhadap peraturan dan pembangunan aplikasi, akan dibentuk pula *Community of Practises* (CoP) yang dapat digunakan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman serta diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat implementasi Peraturan.

Kata kunci: Penghargaan dan/atau sanksi, kinerja anggaran, digitalisasi layanan, CoP

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan milestone jangka pendek Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi Negara" yang merupakan rangkaian kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX tahun 2022. Laporan ini bertujuan mendukung terlaksananya akselerasi peningkatan kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara dalam rangka pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran yang akan menjadi pengungkit bagi penerimaan penghargaan oleh Kementerian Keuangan.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan proyek perubahan PKN II ini secata tepat waktu, yaitu kepada:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengikuti PKN Tingkat II dan mendukung tersusunnya laporan Implementasi Proyek Perubahan;
- 2. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Dra. Reni Suzana, MPPM yang telah mendukung tersusunnya laporan Implementasi Proyek Perubahan;
- 3. Inspektur Lembaga Administrasi Negara, Dr. Hari Nugraha, SE, MPM yang telah memberikan dukungan sehingga tersusun laporan Implementasi Proyek Perubahan;
- 4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Administrasi Negara, Tri Atmojo Sejati, ST, SH, M.Si yang telah memberikan dukungan sehingga tersusun laporan Implementasi Proyek Perubahan;
- 5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara, Dra. Army Winarty, M.Si selaku Mentor yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun laporan Implementasi Proyek Perubahan;
- 6. Ir. Yusni Emilia Harahap, MM dan Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc selaku *coach* yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan Impelementasi Proyek Perubahan;
- 7. Drs. Zulkifli, MM selaku penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan;

- 8. Seluruh Widyaiswara dan narasumber yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan;
- 9. Kementerian lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan saran;
- 10. Anggota Tim Efektif yang telah mendedikasikan waktu dan perhatiannya dalam menyiapkan pedoman serta aplikasi yang akan digunakan;
- 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan implementasi proyejk perubahan ini hingga selesai yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara, sehingga penghargaan atas pelaksanaan kinerja anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan dapat diraih secara berkesinambungan.

## **DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	4
C. Output dan Outcome	5
D. Kondisi Saat Ini	6
E. Kondisi Yang Diharapkan	9
F. Terobosan atau Inovasi	10
G. Tahapan Perubahan Rencana Strategis	11
H. Rencana Strategi Marketing	14
I. Identifikasi Potensi Masalah, Resiko, dan Alternatif Solusi	15
J. Tim Efektif	16
K. Rekomendasi dari Seminar Rencana Proyek Perubahan	16

BAB	II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	18
A.	Capaian Proyek Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan	18
B.	Kepemimpinan Strategis	59
C.	Implementasi Strategi Marketing	62
D.	Perubahan Dukungan Stakeholders	67
E.	Keberlanjutan Proyek Perubahan	71
F.	Pemberdayaan Organisasi Pembelajar	73
G.	Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan	74
H.	Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko	75
I.	Kendala Yang Dihadapi dan Solusi	75
BAB	III PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	77
BAB	IV PENUTUP	81
1.	Lesson Learnt	81
2.	Kesimpulan	81
3.	Tindak Lanjut	82
DAF	ΓAR PUSTAKA	83
LAM	PIRAN	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.Grafik capaian kinerja anggaran LAN dari tahun 2018 – 2021	6
Gambar 2.Nilai pengelolaan UP	7
Gambar 3.Nilai Retur SP2D	7
Gambar 4.Nilai Realisasi	7
Gambar 5. Nilai Penyelesaian Tagihan	8
Gambar 6. Rencana Strategi Marketing	15
Gambar 7. Milestone Proyek Perubahan	18
Gambar 8.Keputusan Sekretaris Utama LAN tentang Pembentukan Tim Efektif	22
Gambar 9.Konsolidasi Tim Efektif	23
Gambar 10.Pertemuan dengan Mentor	24
Gambar 11.Penyusunan rancangan awal Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi	24
Gambar 12.FGD pembahasan draft Peraturan Kepala LAN dengan stakeholder internal	25
Gambar 13.FGD dengan pengelola keuangan	26
Gambar 14. Pembahasan rancangan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi oleh Tim Efektif	27
Gambar 15 Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara	28
Gambar 16.Pertemuan dengan Inspektur LAN dan Kapuslatbang PKASN	29
Gambar 17.Rancangan aplikasi berbasis web	30
Gambar 18.Grafik Indikator per bulan	30
Gambar 19.Komponen penilaian	31
Gambar 20.Menu untuk melakukan input data penilaian	31
Gambar 21.Rancangan aplikasi berbasis web	32
Gambar 22.Rancangan aplikasi berbasis web	32
Gambar 23.Panduan penggunaan aplikasi Si PeKerjA LAN	33
Gambar 24.Uji Publik Rancangan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi	34
Gambar 25.Berita Acara Uji Publik Rancangan Peraturan Kepala LAN	35
Gambar 26.Rancangan final Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara	36
Gambar 27. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai	46
Gambar 28.Form survey bagi Analis Anggaran, PK APBN, dan APK APBN	47
Gambar 29.Form survey bagi Perencana	48

Gambar 30.Hasil survey pentingnya Pembentukan CoP bagi Analis Anggaran, Pranata	
Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN	49
Gambar 31.Hasil survey manfaat Pembentukan CoP bagi Analis Anggaran, Pranata Keuar	ıgan
APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN	50
Gambar 32.Hasil survey Pembentukan CoP bagi Perencana	51
Gambar 33.Frekuensi Pertemuan/Forum dari Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN,	
Analis Pengelolaan Keuangan APBN	52
Gambar 34.Frekuensi Pertemuan/Forum dari Perencana	52
Gambar 35.Desiminasi Peraturan Kepala LAN dan soft launching aplikasi Si PeKerjA LA	N dan
penandatanganan lembar komitmen pembentukan CoP	54
Gambar 36.Simulasi penilaian kinerja anggaran TA 2022	55
Gambar 37.Bimbingan Teknis Penggunaan Si PeKerjA LAN	55
Gambar 38. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.17 Tahun 2022	56
Gambar 39.Aplikasi Si PeKerjA LAN pada website Lembaga Administrasi Negara	57
Gambar 40.Aplikasi Si PeKerjA LAN pada Android	57
Gambar 41.Lembar Komitmen Pendirian CoP	58
Gambar 42.Hasil penilaian kinerja anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2022	58
Gambar 43.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi	Si
PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada website	64
Gambar 44.Pengundangan Peraturan Kepala LAN pada http://jdih.lan.go.id	64
Gambar 45.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi	Si
PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada IG	65
Gambar 46.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi	Si
PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada forum rakor Perencanaan dan Penganggar	an di
Senggigi Lombok	66
Gambar 47.Gambar kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara	66
Gambar 48.Gambar Kunjungan ke Kementerian PPN/Bappenas	66
Gambar 49.Peta Stakeholders	68
Gambar 50. Peta Stakeholders	69
Gambar 51. Testimoni dari Kementerian/Lembaga Lain	71
Gambar 52.Dukungan dari LAN	72
Gambar 53.Penempatan Aplikasi Si PeKerjA LAN pada server LAN	73

Gambar 54. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan
Konsolidasi Penyusunan LK TW III Th 2022 pada tanggal 12 Oktober 202278
Gambar 55. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan
Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022 pada
tanggal 17 Oktober 202278
Gambar 56. Rekonsiliasi penerimaan PNBP setiap Triwulan dengan seluruh unit kerja di
lingkungan LAN pada tanggal 18 Oktober 202278
Gambar 57. Rekonsiliasi pemenuhan anggaran s.d. akhir tahun pada tanggal 26-28 Oktober
2022

## **DAFTAR TABEL**

Γabel 1. Root Cause Analysis	9
Гabel 2. Hasil Analisis SOAR	10
Гаbel 3. Strategi Kombinasi Komponen SOAR	11
Гаbel 4. Tahapan Perubahan Rencana Strategis	12
Tabel 5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Masukan atas Rencana Proyek Perubahan	16
Гаbel 6. Milestone Proyek Perubahan	19
Tabel 7.Perubahan isi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pemberian	
Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja LAN	37
Гabel 8.Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	73
Γabel 9.Strategi Pengembangan Potensi Diri	.77

#### **BABI**

#### RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat kini tengah dihadapkan pada era double disruption yang menuntut setiap orang harus memiliki kemampuan adaptif dan eksploratif yang mumpuni. Dalam bukunya yang berjudul Let's Change (2014), Rhenald Kasali menyebut bahwa bukan mereka yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan mereka yang paling adaptif dalam merespons perubahan. Saat ini kita dihadapkan pada kondisi dimana terjadi perubahan skala besar (volatility), kesulitan melakukan prediksi secara akurat (uncertainty), kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait (complexity), dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya (ambiguity) atau yang disebut sebagai kriteria VUCA. Situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, sulit diprediksi dan kebenaran realitas bersifat subjektif. VUCA memang terlihat seperti ancaman, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi kesempatan. Konsep VUCA, pada kenyataannya, mengubah cara organisasi membuat keputusan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA menjadi bagian perubahan organisasi yang tidak dapat dihindari namun perlu dihadapi dengan langkah-langkah strategis. Perubahan yang terjadi pada era VUCA menyentuh semua aspek, termasuk aspek kebijakan. Seiring dengan hadirnya konteks risiko yang lahir dari gejolak fenomena dunia VUCA, beberapa tahun lalu, Bob Johansen, peneliti ternama dari 'The Insitute for the Future' kerangka kerja kepemimpinan efektif sebagai 'VUCA mengembangkan Counterweight', yang kemudian dinamai VUCA PRIME. Melalui konsep dan kerangka kerja VUCA Prime (VP), Bob Johansen menggugah para pimpinan perusahaan besar untuk fokus membangun VUCA Prime mereka, yaitu vision (visi), understanding (pengertian), clarity (kejelasan), dan agility (kelincahan).<sup>1</sup>

Sejalan dengan hal di atas, di era VUCA ini Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG, 2021

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menjelaskan, ada tiga aspek penting yang memungkinkan untuk membangun pemerintahan yang dinamis. yakni orang-orang yang cakap, proses yang gesit, dan kebijakan yang adaptif.

Pemerintah memiliki suatu instrumen kebijakan fiskal yang sangat powerful dan strategis dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk mewujudkan cita-cita dan amanat konstitusi yaitu anggaran. Salah satu instrumen yang memainkan peranan penting pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alokasi belanja pemerintah. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Lambannya penyerapan anggaran merupakan salah satu indikasi bahwa penyelenggaraan pembangunan masih belum optimal seperti yang direncanakan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang *reward and punishment* pada Kementerian/Lembaga demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja.

Sistem reward and punishment ini dimulai pada bulan April 2012 sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 12 April 2012. Kemudian pada tahun 2020 Peraturan Presiden tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, terbit Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, ditetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, di mana di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN, dibentuk Sekretariat Utama yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama dibantu oleh beberapa Biro, salah satunya adalah Biro Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran, serta pemberian dukungan administrasi keuangan. Kemudian sesuai Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020 – 2024 menyebutkan bahwa seiring dengan dinamisasi perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja pembina urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan LAN harus melakukan penyesuaian arah kebijakan dan pola kerja sehingga berpotensi memengaruhi ketercapaian kinerja LAN. Hal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Sejalan dengan tugas yang diemban dan amanat Renstra, Biro Perencanaan dan Keuangan mengawal pelaksanaan pencapaian kinerja anggaran semua unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga

Administrasi Negara<sup>2</sup>. Agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, maka disusunlah pedoman penilaian kinerja anggaran yang kemudian dituangkan di dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang bertujuan untuk memberikan acuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan untuk memberikan motivasi kepada Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran.

Agar motivasi tetap terjaga, maka hasil penilaian kinerja anggaran akan diunggah pada laman resmi Lembaga Administrasi Negara dan juga melalui android yang akan disampaikan secara berkala perkembangan pencapaian kinerja anggaran setiap bulan untuk bahan pengambilan keputusan melalui aplikasi. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi baru yang terintegrasi di dalam satu data LAN sesuai dengan penerapan SPBE yang memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Kemudian, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

## B. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan

Tujuan proyek perubahan ini menjawab sekaligus mengantisipasi kondisi perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis sesuai dengan ciri organisasi adaptif, yaitu untuk mengakselerasi capaian kinerja aggaran yang optimal secara berkesinambungan melalui:

a. Penyusunan kebijakan tentang *reward and punishment* untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi saat ini dalam rangka menjawab keinginan Lembaga untuk memperoleh penghargaan atas kinerja anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan yang dilakukan setiap tahun;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN

- b. Penyediaan informasi capaian kinerja anggaran secara digital berbasis web dan android;
- c. Pembentukan *Community of Practises* (CoP) yang akan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mengawal agar pencapaian kinerja anggaran dapat terlaksana secara optimal secara berkesinambungan.

#### 2. Manfaat

Manfaat dari dibuatnya proyek perubahan ini dalam rangka mencapai kinerja anggaran yang optimal secara berkesinambungan adalah:

- a. Tersedianya acuan baku bagi Lembaga Administrasi Negara dalam melakukan penilaian kinerja anggaran dalam rangka pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. Tersedianya media digital untuk input-olah-saji data capaian kinerja anggaran yang berbasis web dan android.;
- c. Tersedianya wadah bagi *knowledge sharing*, yaitu berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendapatkan solusi cepat atas permasalahan yang terjadi.

## C. Output dan Outcome

Terdapat tiga *output* proyek perubahan yaitu:

- 1. Peraturan Kepala LAN sebagai dasar untuk pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran.
- Aplikasi untuk melakukan input dan pengolahan data yang sekaligus dapat digunakan untuk penyampaian hasil penilaian kinerja anggaran unit kerja yang akan digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran.
- 3. Terciptanya komitmen pembentukan *Community of Practises* (CoP) bagi para Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana.

*Outcome* proyek perubahan adalah adanya kesempatan LAN untuk memperoleh penghargaan atas pelaksanaan kinerja anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan secara berkesinambungan setiap tahun.

#### D. Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini yang menjadi focus untuk segera diatasi agar kondisi yang diharapkan dapat tercapai adalah belum optimalnya capaian kinerja anggaran di Lembaga Administrasi Negara. Capaian kinerja anggaran dikatakan optimal apabila terjadi keseuaian secara efektif dan efisien antara perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terjadi deviasi atau kesenjangan yang tinggi. Di samping itu kinerja anggaran dikatakan optimal apabila deviasi antara capaian kinerja tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan trajektori nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja anggaran LAN pada saat ini masih fluktuatif dari tahun ke tahun dan belum optimal dalam pencapaiannya, yang diambil sebagai sampel adalah sebagai berikut:

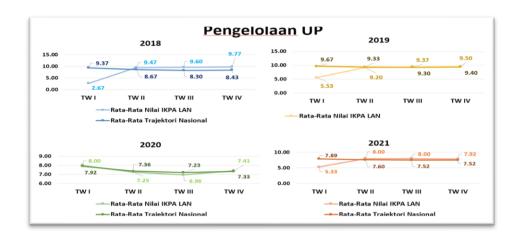


Gambar 1.Grafik capaian kinerja anggaran LAN dari tahun 2018 – 2021

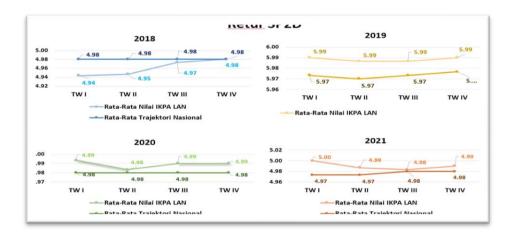
Aspek nilai kinerja yang masih rendah yang mempengaruhi nilai kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bervariasi dan perlu untuk ditingkatkan, misalnya:

- tahun 2018: pengelolaan UP pada TW I, retur SP2D, renkas, revisi DIPA pada TW
   IV, penyelesaian tagihan pada TW I
- 2. tahun 2019: pengelolaan UP pada TW I, penyampaian data kontrak, realisasi, penyelesaian tagihan pada TW I
- 3. tahun 2020: kesalahan SPM, penyelesaian tagihan pada TW I dan TW II
- 4. tahun 2021: pengelolaan UP pada TW I, realisasi, penyelesaian tagihan pada TW I

## sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.Nilai pengelolaan UP



Gambar 3. Nilai Retur SP2D



Gambar 4. Nilai Realisasi



Gambar 5. Nilai Penyelesaian Tagihan

Beberapa penyebab capaian kinerja anggaran yang mengalami fluktuasi dan belum optimalnya capaian kinerja anggaran di Lembaga Administrasi Negara adalah:

- a. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Anggaran,
- b. Belum dapat diimplementasikannya Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 adalah yang terkait dengan indikator penilaian, penetapan waktu penilaian, kurang tepatnya penetapan kriteria penilaian, dan bentuk penghargaan yang akan diberikan. Di samping itu juga perlu adanya penambahan atau penegasan beberapa pasal pada Peraturan Kepala LAN tersebut, misalnya perlu ditambahkannya Tim Sekretariat yang bertugas untuk mengolah data hasil penilaian sebelum disampaikan ke Tim Penilai,
- c. Kurangnya komitmen untuk mencapai kinerja anggaran secara optimal dan berkesinambungan,
- d. Belum adanya instrument berbasis digital untuk input-olah-saji hasil penilaian kinerja anggaran, dan
- e. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja anggaran.

Dari isu utama tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan *Root Cause Analysis*, yaitu untuk menemukan akar penyebab dari masalah yang kini dihadapi sebagaimana tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Root Cause Analysis

	Akar Masalah	Symptom	Solusi
1.	Adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan	Implementasi pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas	
2.	Masih adanya beberapa pasal di dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 yang perlu disesuaikan	kinerja anggaran LAN belum dapat dilakukan secara optimal	Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 3. Membangun aplikasi untuk melakukan input, mengolah data dan
3.	Belum adanya instrument terpadu berbasis digital untuk melakukan input, olah, dan penyajian hasil pengelolaan kinerja anggaran		menyajikan hasil penilaian kinerja anggaran LAN 4. Pengembangan strategi dalam pelaksanaan monev
4.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi		5. Pertemuan berkala
5.	Belum optimalnya komitmen dalam pencapaian kinerja anggaran		

## E. Kondisi Yang Diharapkan

Permasalahan yang timbul sebagaimana dijelaskan di atas tentunya akan mengganggu penyelesaian isu utama yaitu pencapain kinerja anggaran secara optimal untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu terwujudnya akselerasi capaian kinerja anggaran yang optimal dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya:

- a. Pembentukan CoP.
- b. Penyempurnaan Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi atas Kinerja Anggaran untuk pencapaian kinerja anggaran LAN secara optimal.
- c. Peningkatan komitmen dalam pengelolaan kinerja anggaran.
- d. Tersedianya instrumen pengelolaan kinerja anggaran terpadu secara digital berupa aplikasi untuk input, olah, dan penyajian hasil penilaian kinerja anggaran yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat monitoring atas kinerja anggaran LAN.

e. Pengembangan strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran di antaranya melalui rapat setiap triwulan dan pemanfaatan forum monev dalam rangka penyamaan persepsi dan sekaligus sebagai media monitoring penyelesaian penilaian.

## F. Terobosan atau Inovasi

Agar kondisi yang diharapkan dapat terwujud, maka diperlukan terobosan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dengan menggunakan analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*). Analisis SOAR merupakan salah satu pendekatan terhadap rencana strategis. Analisis ini mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan model tradisional. Analisis ini memungkinkan anggota organisasi menentukan dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri. Fokus internal pada analisis ini adalah kekuatan organisasi. Hasil analisis dengan SOAR adalah sebagaimana tersaji di dalam table di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis SOAR

Strenght:	Opportunity:	
a. SDM yang kompeten	Memperoleh predikat kinerja anggaran	
b. Dasar hukum yang jelas	terbaik dari Kemenkeu	
c. Dukungan pimpinan		
d. Kewenangan untuk menyusun		
kebijakan		
Aspiration:	Results:	
a. LAN memiliki acuan dalam	a. Capaian kinerja anggaran LAN	
pemberian penghargaan dan/atau	optimal	
pengenaan sanksi atas capaian	b. Terlaksananya pemberian	
kinerja anggaran	penghargaan dan/atau pengenaan	
b. LAN memiliki CoP	sanksi atas capaian kinerja anggaran	

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat ditentukan strategi yang harus dilakukan yang merupakan kombinasi dari keempat komponen SOAR seperti yang tersaji dalam table dibawah ini:

Tabel 3. Strategi Kombinasi Komponen SOAR

Strategi S-A:	Strategi O-A:		
1. Melakukan reviu atas peraturan kepala LAN nomor 11 tahun 2021	Memperkuat hubungan dengan instansi pembina		
2. Melakukan sharing terhadap kebijakan di bidang anggaran	2. Peningkatan motivasi LAN dalam pencapaian kinerja anggaran secara optimal		
Strategi S-R:	Strategi O-R:		
<ol> <li>Melakukan penilaian kinerja anggaran sesuai ketentuan</li> <li>pembuatan instrument pengelolaan kinerja anggaran yang terpadu secara digital aplikasi untuk input-olah-saji</li> </ol>	1. Implementasi Peraturan Kepala LAN tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas capaian kinerja anggaran LAN		
hasil penilaian kinerja	<ul> <li>2. Pengembangan strategi dalam pelaksanaan monev</li> <li>3. Pembentukan CoP Perencana, Analis Anggaran, Pranat Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN</li> </ul>		

Dengan berdasarkan strategi yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan akan dihasilkan kinerja anggaran yang optimal dan meningkat yang akan menjadi peluang bagi Lembaga Administrasi Negara dapat meraih kembali peringkat dalam penilaian kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan yang pernah diraih pada tahun 2017, 2021, dan 2022 secara berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dengan pelibatan aktif dari seluruh stakeholder internal LAN yang terdiri dari 16 (enam belas) unit kerja dan 8 (delapan) satker.

## G. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

Untuk mewujudkan *output* dan *outcome*, perlu disusun rencana strategis pencapaiannya. Rencana strategis tersebut terbagi atas jangka pendek, menengah, dan Panjang, yaitu:

- 1. Tujuan Jangka Pendek, untuk menyusun Peraturan Kepala LAN dan membangun aplikasi sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kinerja anggaran LAN;
- 2. Tujuan Jangka Menengah, implementasi Peraturan untuk melaksanakan penilaian kinerja anggaran yang akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi.

3. Tujuan Jangka Panjang, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan.

Sedangkan untuk alokasi waktu dan output untuk setiap tahapan atau kegiatan sebagaimana tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel 4. Tahapan Perubahan Rencana Strategis

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)
Jang	gka Pendek			
1.	Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 dan aplikasi	<ul> <li>a. Membentuk Tim Efektif</li> <li>b. Melakukan konsolidasi Proyek Perubahan kepada Tim</li> </ul>	M5 Sept 2022 M5 Sept 2022	SK Tim (Koord tim Sekretariat)
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi	Mengadakan rapat untuk menyusun <i>draft</i> awal Peraturan Kepala LAN dan <i>draft</i> desain aplikasi	M5 Sept -M1 Okt 2022	Rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi ( <i>Project Leader</i> )
3.	Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi	a. Melakukan FGD dengan stakeholders internal b. Melakukan FGD dengan stakeholder luar c. Melakukan revisi rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi hasil FGD d. Melakukan uji coba simulasi penilaian kinerja e. Pelaksanaan rapat finalisasi Rancangan Peraturan Kepala LAN	M2 Okt 2022 M3 Okt 2022 M4 Okt 2022 M4 Okt 2022 M4 Okt – M2 Nov 2022	Rancangan legal drafting Peraturan Kepala LAN dan aplikasi, revisi rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi, Peraturan Kepala LAN dan aplikasi ( <i>Project Leader</i> , Tim Bidang Hukum dan Tim IT)

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)
4.	Pengesahan Peraturan Kepala LAN dan finalisasi aplikasi	<ul> <li>a. Mengajukan penandatanganan rancangan Peraturan Kepala LAN</li> <li>b. Aplikasi yang siap digunakan</li> </ul>	M3 Nov 2022 M3 Nov 2022	Peraturan Kepala LAN dan aplikasi ( <i>Project Leader</i> dan bidang Hukum) dan Tim IT
5.	Sosialisasi Peraturan Kepala LAN dan aplikasi terkait pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran	Melakukan sosialisasi kepada stakeholder internal dan eksternal	M3 Nov 2022	dokumentasi kegiatan sosialisasi Peraturan Kepala LAN dan aplikasi, form evaluasi ( <i>Project Leader</i> )
Jan	gka Menengah			
6.	Penyebarluasan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi	a. Mengunggah Peraturan Kepala LAN ke lan.go.id b. Membuat branding	M1 Des 2022 M2 Des 2022	Peraturan LAN yang dapat diakses pada lan.go.id dan jdih.lan.go.id flipbook peraturan digital Dimuat di android Aplikasi ( <i>Project Leader</i> dan seluruh Tim Efektif)
7.	Penerapan Peraturan Kepala LAN dan penggunaan aplikasi	a. Terlaksananya penilaian kinerja anggaran dalam rangka pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran b. Penggunaan aplikasi untuk input dan	Mulai Jan 2023 Mulai Jan 2023	Hasil penilaian kinerja dengan menggunakan aplikasi ( <i>Project Leader</i> dan Tim Efektif)

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)	
		pengolahan dan penyampaian hasil penilaian kinerja anggaran			
Jan	Jangka Panjang				
8.	Monev Peraturan Kepala LAN dan aplikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Kepala LAN dan penggunaan aplikasi	Mulai Juli 2023	Rapat berkala, forum monev	

## H. Rencana Strategi Marketing

## 1. Product

Produk yang ditawarkan adalah Peraturan Kepala LAN dan aplikasi.

## 2. Place

Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan di Biro Perencanaan dan Keuangan

#### 3. Price

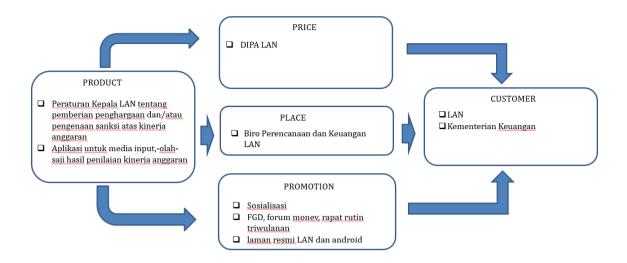
Biaya yang diperlukan untuk penyelesaian proyek perubahan ini berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan, meskipun tidak ada biaya khusus penyusunan Peraturan Kepala LAN dan pembangunan aplikasi karena belum dianggarkan dan akan segera dilakukan penyesuaian ataupun terobosan dengan mengikutkan kegiatan penyusunan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi dengan kegiatan lain yang telah terencana

#### 4. Promotion

Promosi dilakukan melalui sosialisasi, FGD, upload di laman resmi LAN dan android, media sosial

#### 5. Customer

Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Keuangan



Gambar 6. Rencana Strategi Marketing

## I. Identifikasi Potensi Masalah, Resiko, dan Alternatif Solusi

Identifikasi potensi resiko merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka menghasilkan output dengan mencari alternatif solusinya. Beberapa potensi resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah:

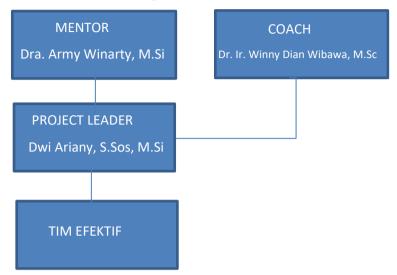
- 1. Keterlambatan penyusunan Peraturan Kepala LAN
- 2. Keterlambatan penilaian kinerja anggaran
- 3. Keterlambatan pembuatan aplikasi

Hal tersebut dapat terjadi karena kendala:

- Sulitnya mengumpulkan Tim dan Stakeholders yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Kepala LAN dan pembangunan aplikasi
- 2. Komitmen stakeholders
- 3. Tidak terdapat media untuk input-olah-saji hasil penilaian kinerja anggaran Untuk mengatasi hal di atas maka dilakukan solusi:
- 1. Penyampaian undangan untuk melakukan pertemuan jauh hari sebelumnya
- Penyampaian draft poin-poin penting yang akan dibahas melalui nota dinas atau WA
- 3. Dukungan pimpinan
- 4. Komunikasi secara berkala (WA, rapat)
- 5. Komunikasi intensif dengan Tim IT

## J. Tim Efektif

Tata kelola tim efektif adalah sebagai berikut:



## K. Rekomendasi dari Seminar Rencana Proyek Perubahan

Terdapat beberapa rekomendasi yang diperoleh dari seminar Rencana Proyek Perubahan yang telah ditindaklanjuti dalam proses implementasi proyek perubahan. Rekomendasi tersebut antara lain:

Tabel 5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Masukan atas Rencana Proyek Perubahan

No	Masukan	Tindak Lanjut Masukan	
1.	Latar belakang diperkaya dengan VUCA dan SPBE	Sudah ditambahkan terkait VUCA dan SPBE pada latar belakang	
2.	Perlu ditambahkan Peta kondisi sebelum dan sesudah ada Peraturan Kepala LAN	Diharapkan penilaian terhadap kinerja anggaran menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menggunakan penilaian dari Kementerian Keuangan tetapi diperkaya dengan subtansi instansi yang terdiri dari unsur perencanaan, keuangan, BMN, Barjas, dan pengawasan. Dengan berbagai aspek tersebut maka pengambilan keputusan oleh pimpinan juga akan lebih baik karena melihat dari berbagai aspek dengan beberapa penyesuaian pada pasal maupun lampiran pada Peraturan Kepala LAN	

No	Masukan	Tindak Lanjut Masukan	
3.	Stakeholder internal ditambahkan dengan para pejabat fungsional terkait dengan proper	Sudah ditambahkan pejabat fungsional Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana	
4.	Stakehoder eksternal untuk apathetic sebaiknya berani menentukan instansi mana saja yang akan dituju dan unitnya	Telah ditentukan instansi untuk stakeholders eksternal untuk apathetic, yaitu Deputi Polhukhankam, Deputi Sistem Informasi BKN, Kepala Biro Keuangan BKN, Sesmen Bappenas	
5.	Perlu dijelaskan apa yang kurang dari nilai kinerja anggaran LAN	Akan ditambahkan penjelasan tentang nilai yang kurang dari kinerja anggaran LAN	

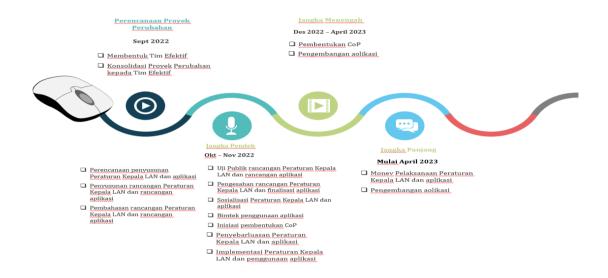
#### **BAB II**

#### IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

## A. Capaian Proyek Perubahan dan Manfaat Proyek Perubahan

## 1. Capaian Proyek Perubahan

Sebagaimana disampaikan di Bab I, tahapan implementasi proyek perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana tersaji pad gambar di bawah ini:



Gambar 7. Milestone Proyek Perubahan

Terdapat kegiatan baru pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, yaitu:

## 1. Jangka Pendek:

- a. Inisiasi dan komitmen bersama pembentukan Community of Practises (CoP);
- b. Bimtek penggunaan aplikasi.

#### 2. Jangka Menengah

a. Pembentukan *Community of Practises* (CoP) bagi para pejabat fungsional Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana yang dapat digunakan sebagai sarana berbagi pengetahuan dan

pengalaman serta diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat implementasi Peraturan.

- b. Pengembangan aplikasi.
- 3. Jangka Panjang
  - a. Pengembangan aplikasi.

Di samping terdapat kegiatan baru pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang, terdapat juga kegiatan yang berpindah dari jangka menengah ke jangka pendek, yaitu penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi serta pembuatan *branding* atas aplikasi yang dibangun. Di samping itu juga untuk implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara juga sudah mulai dilaksanakan, yaitu dengan input data penilaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 pada aplikasi Si PeKerjA LAN.

Sehingga secara keseluruhan dapat tergambar pada table berikut ini:

Tabel 6. Milestone Proyek Perubahan

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)		
Jang	Jangka Pendek					
1.	Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 dan aplikasi	<ul> <li>a. Membentuk Tim Efektif</li> <li>b. Melakukan konsolidasi Proyek Perubahan kepada Tim</li> </ul>	M5 Sept 2022 M5 Sept 2022	SK Tim (Koord tim Sekretariat)		
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi	Mengadakan rapat untuk menyusun <i>draft</i> awal Peraturan Kepala LAN dan <i>draft</i> desain aplikasi	M5 Sept	Rancangan Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi ( <i>Project Leader</i> )		
3.	Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi	<ul> <li>a. Melakukan FGD dengan stakeholders internal</li> <li>b. Melakukan revisi rancangan</li> </ul>	M5 Sept 2022	Rancangan legal drafting Peraturan Kepala LAN dan aplikasi, revisi rancangan Peraturan Kepala		

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)
		Peraturan dan rancangan aplikasi c. Melakukan uji coba simulasi penilaian kinerja d. Melakukan FGD dan uji public dengan stakeholder eksternal e. Pelaksanaan rapat finalisasi Rancangan Peraturan Kepala LAN	M1 Okt – M2 Nov 2022 M4 Okt, M2 Nov 2022 M2 Nov 2022 M2 Nov 2022	LAN dan desain aplikasi, Peraturan Kepala LAN dan aplikasi ( <i>Project Leader</i> , Tim Bidang Hukum dan Tim IT)
4.	Inisiasi pembentukan CoP	Melakukan survey komitmen	M1 Nov 2022	Form survey dan lembar komitmen
5.	Pengesahan Peraturan Kepala LAN dan finalisasi aplikasi	<ul> <li>c. Mengajukan penandatanganan rancangan Peraturan Kepala LAN</li> <li>d. Aplikasi yang siap digunakan</li> </ul>	M2 Nov 2022 M2 Nov 2022	Peraturan Kepala LAN dan aplikasi ( <i>Project Leader</i> dan bidang Hukum) dan Tim IT
6.	Sosialisasi Peraturan Kepala LAN dan aplikasi terkait pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran	Melakukan sosialisasi kepada stakeholder internal dan eksternal	M3 Nov 2022	dokumentasi kegiatan sosialisasi Peraturan Kepala LAN dan aplikasi, form evaluasi ( <i>Project Leader</i> )
7.	Bimtek penggunaan aplikasi	Mengadakan bimtek penggunaan aplikasi untuk input dan olah data kinerja anggaran	M3 Nov 2022	Undangan, daftar hadir, dokumentasi
8.	Penyebarluasan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi	a. Mengunggah Peraturan Kepala LAN ke lan.go.id b. Membuat branding	M3 Nov 2022	Peraturan LAN yang dapat diakses pada jdih.lan.go.id

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)
			M3 Nov 2022	Flipbook Peraturam Kepala LAN Aplikasi si Pekerja LAN
				(Project Leader dan seluruh Tim Efektif)
9.	Penerapan Peraturan Kepala LAN dan penggunaan	a. Terlaksananya penilaian kinerja anggaran dalam rangka pemberian	M3 Nov 2022	Hasil penilaian kinerja dengan menggunakan aplikasi
	aplikasi	penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran b. Penggunaan aplikasi untuk input dan pengolahan dan penyampaian hasil penilaian kinerja anggaran	M3 Nov 2022	(Project Leader dan Tim Efektif)
Jan	gka Menengah			
10.	Pembentukan CoP	a. Pembentukan CoP yang ditetapkan dengan Keputusan Sestama	Mulai April 2023	CoP
		b. Mengadakan forum bagi CoP		Forum bagi CoP
11.	Pengembangan aplikasi	Pengembangan sesuai kebutuhan	Mulai April 2023	Aplikasi
Jangka Panjang				
12.	Monev Peraturan Kepala LAN dan aplikasi	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Kepala LAN dan penggunaan aplikasi	Mulai Juli 2023	Rapat berkala, forum monev

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Evidence (PIC)
13.	Pengembangan aplikasi	Pengembangan sesuai kebutuhan	Mulai Juli 2023	Aplikasi

Pada laporan ini akan dijelaskan rincian dari realisasi capaian-capaian jangka pendek yaitu:

# 1. Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 dan aplikasi

#### a. PembentukanTim Efektif

Tahapan awal dalam implementasi proyek perubahan ini adalah pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Nomor 74/S.1/HKM.02.2/2022 tanggal 26 September 2022, yang terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Substansi;
- 3. Tim Teknologi Informasi; dan
- 4. Tim Sekretariat.

Unsur Tim Efektif melibatkan perwakilan dari beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dan Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum di Lampiran 1 dan tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Keputusan Sekretaris Utama LAN tentang Pembentukan Tim Efektif

## b. Konsolidasi dengan Tim Efektif

Dalam rangka reviu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara telah dilakukan konsolidasi di antara anggota Tim Efektif. Di dalam konsolidasi tersebut juga dibahas tentang pembuatan rancangan aplikasi yang akan digunakan sebagai media untuk input-olah-saji data hasil penilaian kinerja dalam rangka pemberian penghatrgaan dan/atyau pengenaan sanksi.



Gambar 9.Konsolidasi Tim Efektif

Di samping konsolidasi Tim Efektif, dilakukan juga pembahasan awal dengan mentor tentang poin-poin penting dalam reviu Peraturan dan pembangunan aplikasi sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 10.Pertemuan dengan Mentor

## 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAN dan Desain Aplikasi

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan rapat untuk menyusun draft awal Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi dengan Tim Substansi dan Tim IT.





Gambar 11.Penyusunan rancangan awal Peraturan Kepala LAN dan desain aplikasi

Rapat awal ini melibatkan anggota Tim Efektif untuk merumuskan poin-poin penting perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara yang belum dapat diimplementasikan. Di samping merumuskan poin-poin penting untuk perubahan Peraturan, dibahas juga tentang rancangan aplikasi yang akan dibuat untuk input, olah, dan saji data hasil penilaianm kinerja anggaran bersama-sama dengan Tim IT.

Rancangan aplikasi dibuat oleh Tim IT dari pihak ketiga dengan bekerjasama dengan Pusdatin Lembaga Administrasi Negara, di mana aplikasi ini akan digunakan sebagai media untuk input, olah dan saji data kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara. Hasil penilaian kinerja anggaran akan disajikan pada laman resmi Lembaga Administrasi Negara setiap tahun dan pada android.

# 3. Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Kepala LAN dan Desain Aplikasi

a. FGD dengan *stakeholders* Internal

Dalam rangka menjaring masukan atas draft awal yang disusun, dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* internal yaitu dengan seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara secara *blended*.



Gambar 12.FGD pembahasan draft Peraturan Kepala LAN dengan stakeholder internal

FGD juga dilakukan khusus dengan para pengelola anggaran agar mendapatkan masukan lebih mendalam seperti tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 13.FGD dengan pengelola keuangan

Dalam rangka memperoleh masukan yang lebih komprehensif, rancangan Peraturan Kepala LAN dibahas melalui beberapa kali rapat oleh Tim Efektif dengan tetap mepertimbangkan masukan stakeholders pada saat FGD antara lain dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Untuk tampilan aplikasi perlu dibuat lebih menarik dan bisa menggambarkan nilai setiap indikator yang merupakan gambaran kinerja setiap unit kerja dan satuan kerja.
- 2. Hasil penilaian harus benar-benar menggambarkan kinerja yang dicapai dengan memperhitungkan indikator yang dapat diukur.
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi akan sangat bagus apabila diimplementasikan agar unit kerja atau satuan kerja berlomba untuk menghasilkan kinerja terbaik.
- 4. Peraturan Kepala tentang pemberian pengharaan dan/atau pengenaan sanksi dapat dijadikan acuan bagi pimpinan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam optimalisasi anggaran dan kegiatan.
- 5. Informasi terkait kinerja anggaran sebaiknya dapat dilakukan secara rutin baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran.
- 6. Informasi kinerja sebaiknya bisa juga dilihat di android agar memudahkan pimpinan dalam memantau kinerja anggaran.

7. Perlu dilakukan simulasi untuk indikator kinerja yang akan digunakan agar diketahui indicator tersebut dapat diukur dan mewakili kinerja seluruh unit kerja dan satuan kerja.

Rapat Tim Efektif yang dilaksanakan untujk menghasilkan rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tersaji pada gambar berikut:











Gambar 14. Pembahasan rancangan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi oleh Tim Efektif

Beberapa rancangan Peraturan yang dihasilkan dari pertemuan dengan Tim Efektif di antaranya adalah:

- b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup unsur pejahat yang melaksanakan tugas di a. perencanaan, monitoring, dan evaluasi; kenangan: c. pengawasan; d. pengelolaan barang milik negara; dan e. pengelolaan barang dan jasa. (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dapat dibantu oleh tim secretariat. (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama. Pasal 4 Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan capaian atas: a. aspek Kinerja Anggaran dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan b. aspek Kinerja Internal dengan bobot 60% (enam puluh Pasal 5
- Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
- Kinerja Unit Kerja yang selanjutnya disebut Kinerja adalah prestasi kerja unit kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Kinerja Anggaran adalah hasil kerja yang dicapat LAN dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, pada perjode tahun anggaran sebelumnya capaian kinerja anggaran LAN diukur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Kinerja Internal adalah capaian Kinerja atas aspek yang berkaitan langsung dengan pencapaian Kinerja Anggaran.
- Evaluasi Kinerja Unit Kerja yang selaujutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur Kinerja pada Unit Kerja sebagai bentuk

## Pasal 8 (1) Penetapan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a. pemberian penyampaian teguran tertulis; b. publikasi dalam media internal LAN; dan/atau c. pemberian pengenaan disinsentif. (2) Pemberian Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui: a. pengurangan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya: dan/atau b. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau penghematan/refocusing anggaran. (3) Pengurangan alokasi pagu sebagaimana dimaksud pada a. huruf a tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan; dan b. huruf b tidak dapat mengurangi alokasi anggaran prioritas nasional. (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan kepada 3 (tiga) Unit Kerja yang

- (3) Uumlah unit kerja yang diberikan penghargaan dan dikenai Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai.
- (4) Tata cara pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini
- (5) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 10

Evaluasi Kinerja dilaksanakan mulai tahun anggaran 2022 untuk mengukur Kinerja tahun anggaran 2021.

#### Pasal 11

Pembiayaan Evaluasi Kinerja dibebankan pada DIPA LAN.

#### Pasal 12

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Gambar 15 Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan desain aplikasi juga dilakukan dengan meminta masukan dari para pimpinan Lembaga Administrasi Negara, di antaranya pembahasan dengan Inspektur Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersaji pada gambar berikut:





Gambar 16.Pertemuan dengan Inspektur LAN dan Kapuslatbang PKASN

Dalam rangka menguji indikator yang telah ditetapkan, maka dilakukan simulasi penilaian kinerja anggaran oleh Tim Efektif untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan III.

Selanjutnya penginputan data akan dilakukan setiap Triwulanan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai salah satu bentuk monitoring atas capaian kinerja anggaran.

Hasil simulasi penilaian kinerja tersebut kemudian diujicobakan juga melalui aplikasi yang dibangun sebagai media untuk input-olah-saji data hasil penilaian kinerja anggaran yang berbasis web dan berbasis android. Terdapat beberapa fitur antara lain: Tabel Penilaian Unit Kerja, Rincian Penilaian, dan Ganti Password.

Rancangan aplikasi yang dibuat oleh Tim IT eksternal dan Pusdatin LAN sedikit mengalami kendala terkait waktu penyelesaiannya dikarenakan untuk membangun sebuah aplikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Rancangan aplikasi tersebut terdiri dari:

#### 1. Dashboard

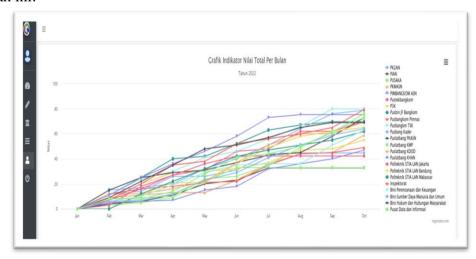
Tampilan Dashboard dibuat terbuka, namun untuk penginputan harus log in menggunakan user.

Pada halaman dashboard, terdapat grafik peringkat nilai dari hasil penilaian semua unit kerja seperti tersaji pada gambar di bawah ini:



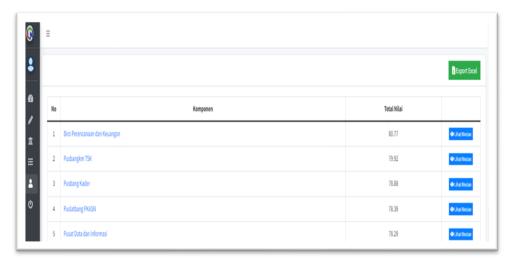
Gambar 17.Rancangan aplikasi berbasis web

Terdapat juga grafik indikator nilai perbulan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 18.Grafik Indikator per bulan

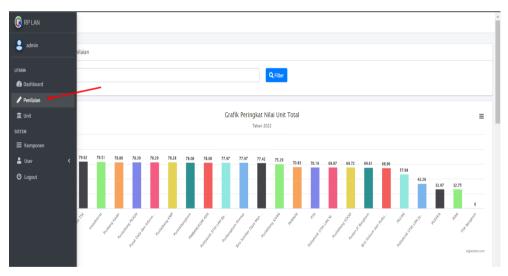
Dan pada halaman bawah dashboard terdapat tabel komponen beserta total nilai, seperti yang di tunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 19. Komponen penilaian

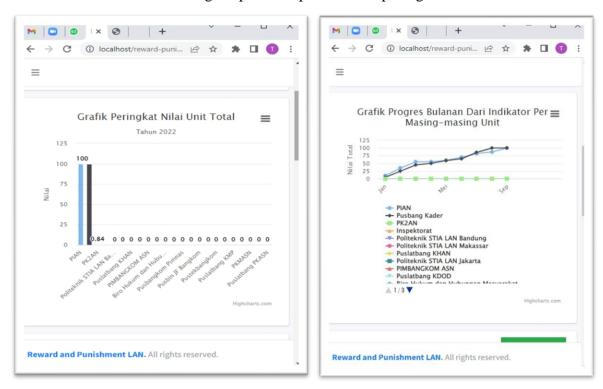
#### 2. Tabel Penilaian

Pada menu ini terdapat beberapa menu untuk melakukan input data, seperti tersaji pada gambar berikut:

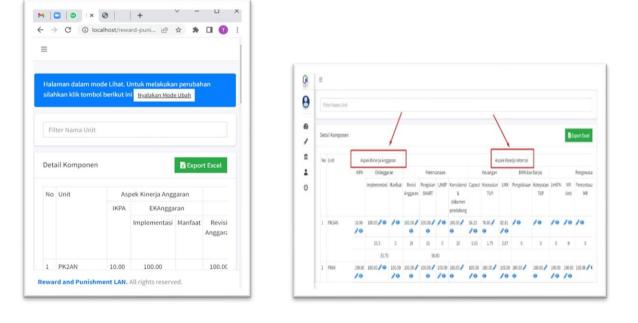


Gambar 20.Menu untuk melakukan input data penilaian

### Contoh seluruh menu rancangan aplikasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 21.Rancangan aplikasi berbasis web



Gambar 22.Rancangan aplikasi berbasis web

Untuk memudahkan penggunaan aplikasi, telah disusun panduan digital penggunaannya baik secara manual maupun dengan link https://drive.google.com/file/d/1QGyxoqVUQTGD07T1wBHfoWWLNZ0Sn q1D/view?usp=share\_link sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 23.Panduan penggunaan aplikasi Si PeKerjA LAN

b. FGD dengan stakeholders eksternal, yaitu dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, dan Bappenas. FGD dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022 yang juga dihadiri oleh Mentor dan Tim Efektif. FGD ini dimanfaatkan sekaligus sebagai sarana Uji Publik Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan juga aplikasi yang telah dibangun sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Gambar 24.Uji Publik Rancangan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi

Poin-poin penting yang dihasilkan dari Uji Publik ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Kepala LAN:

- a. Penjelasan terkait tata cara penilaian dapat langsung dijelaskan pada Pasal 5. Dalam pasal tersebut kinerja anggaran masih general, berlaku untuk satker dan unit kerja. Sehingga lebih baik dijelaskan kembali indikator apa yang dinilai untuk unit kerja dan indikator penilaian untuk satker.
- b. Aspek Kinerja Anggaran perlu dibreakdown kembali terkait penilaian masingmasing indikator, hal ini dapat didetailkan kembali di lampiran.
- c. Proporsi perhitungan penilaian dapat disesuaikan dengan jumlah indikator yang dapat dinilai masing-masing unit kerja.
- d. Perlu diperhatikan kembali indikator yang menjadi dasar penilaian, agar tidak double penilaian (di penilaian EKA dan IKPA)
- e. Secara isi peraturan *reward and punishment* ini sudah baik, namun perlu penyempurnaan penulisan sesuai dengan bahasa peraturan.
- f. Pencantuman bahwa "Keputusan tidak dapat diganggu gugat dan peraturan bersifat mengikat" akan dicantumkan pada hasil keputusan/BAST tim penilai saat penentuan unit kerja yang diberikan penghargaan dan sanksi.

#### 2. Aplikasi:

- a. Pewarnaan pada grafik peringkat disesuaikan dengan peringkat. Misal: peringkat sangat baik diberikan warna hijau, peringkat sedang diberikan warna kuning/orange, peringkat cukup diberikan warna biru, dan peringkat rendah diberikan warna merah.
- b. Pada Dashboard ditambahkan 3 peringkat teratas dan 3 peringkat terbawah.
- c. Pada grafik garis indikator tidak perlu langsung dimunculkan semua.
- d. Pengelompokan peringkat sesuai Unit Kerja/Satker, sesuai Satker Puslatbang, Poltek STIA LAN, Sekretariat, Deputi I, Deputi II, Deputi III, dan Deputi IV.
- e. Perlu dimunculkan komponen mana yang paling tinggi dan paling rendah pada setiap unit kerja/satker.

Sebagai hasil dari uji publik telah dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 2 dan tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 25.Berita Acara Uji Publik Rancangan Peraturan Kepala LAN

Rancangan Peraturan Final yang dihasilkan dari Uji Publik ini adalah sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 26.Rancangan final Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi yang dibuat mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara, karena perubahan yang dilakukan mendasar dan melebihi 50% dari isi Peraturan tersebut.

Beberapa area perubahan yang terdapat pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara sebagaimana tersaji pada table di bawah ini:

Tabel 7.Perubahan isi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja LAN

	Batang Tubuh		
No	Sebelum	Sesudah	
	Pasal 2 ayat (4)	Pasal 2 ayat (4)	
	Evaluasi Kinerja dilaksanakan pada	Evaluasi Kinerja paling cepat dilaksanakan	
	setiap triwulan I tahun anggaran	pada setiap triwulan IV tahun anggaran	
1	berjalan untuk Kinerja tahun	berjalan untuk Kinerja tahun anggaran	
	anggaran sebelumnya.	dimaksud dan paling lama pada setiap	
		triwulan I tahun anggaran berjalan untuk	
		Kinerja tahun anggaran sebelumnya.	
		Pasal 3	
		(1) Unsur Kinerja Anggaran sebagaimana	
		dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf	
		a diukur menggunakan instrumen dan	
		mekanisme yang ditetapkan	
		Kementerian Keuangan.	
		(2) Unsur Kinerja Internal sebagaimana	
2	Tidak ada sebelumnya	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf	
		b diukur dengan mempertimbangkan	
		aspek:	
		a. perencanaan;	
		b. keuangan;	
		c. pengadaan barang dan jasa; dan	
		d. pengelolaan Barang Milik Negara;	
	D 12 (2)	e. pengawasan internal.	
	Pasal 3 ayat (2)	Pasal 4 ayat (2)	
	Tim Penilai memiliki tugas:	Tim Penilai memiliki tugas:	
	a. melakukan penilaian terhadap aspek Kinerja Anggaran dan	<ul> <li>a. melakukan penilaian terhadap Aspek</li> <li>Kinerja Internal;</li> </ul>	
3	aspek Kinerja Internal sesuai		
	dengan aspek-aspek yang	b. menyusun hasil penilaian Kinerja Unit Kerja yang mempertimbangkan hasil	
	menjadi cakupan penilaian; dan	penilaian sebagaimana dimaksud dalam	
	b. mengusulkan kepada Kepala	huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran;	
	LAN hasil penilaian sebagai	dan	
	dasar pemberian Penghargaan	c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasil	
	Sdan/atau pengenaan Sanksi.	penilaian sebagaimana dimaksud dalam	
	r - 8	huruf b sebagai dasar pemberian	
		Penghargaan dan/atau Sanksi.	

	Batang Tubuh		
No	Sebelum	Sesudah	
4	Tidak ada sebelumnya	Pasal 4 ayat (5) dan (6)  (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dapat dibantu oleh tim sekretariat.  (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara;	
	Pasal 7 ayat (2)	Pasal 8 ayat (2)	
5	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya.	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya terhitung sejak ditetapkannya hasil penilaian.	
6	Tidak ada sebelumnya	Pasal 8 ayat (3) dan (4)  (3) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;  (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direlokasi dari:  a. kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tunjangan pegawai;  b. anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.	
	Pasal 8 ayat (3)	Pasal 9 ayat (3)	
7	(3) Pengurangan alokasi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk:  a. gaji dan tunjangan; b. prioritas nasional; dan c. pengembangan kompetensi pegawai	<ul> <li>(3) Pengurangan alokasi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan.</li> <li>(4) Penghematan/refocusing anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat mengurangi alokasi anggaran prioritas nasional.</li> </ul>	
8	Tidak ada sebelumnya	Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)	

	Batang Tubuh			
No	Sebelum	Sesudah		
		<ol> <li>Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan kepada Unit Kerja yang memperoleh penilaian tertinggi sesuai dengan sistem penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</li> <li>Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada Unit Kerja yang masuk dalam kualifikasi penilaian "kurang baik".</li> <li>Jumlah Unit Kerja yang diberikan penghargaan dan dikenai Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai.</li> </ol>		
Lampiran				
No	Sebelum	Sesudah		
1	Indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut berasal dari 2 (dua) penilaian yaitu:  1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri atas 13 (tiga belas) indikator; dan  2. indikator EKA yang terdiri atas 2 (dua) aspek yang sesuai dengan kebutuhan LAN, yaitu aspek manfaat dan aspek implementasi.	Indikator pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut berasal dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA).		
2	Penilaian aspek Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja yang terdiri atas:  a. EKA atas aspek implementasi Unit Kerja dengan bobot 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen). Penilaian aspek ini dilakukan untuk memperoleh informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka	Penilaian aspek Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.		

Lampiran		
	pelaksanaan kegiatan dan pencapaian RO. b. EKA atas aspek manfaat Unit kerja dengan bobot 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen). Penilaian aspek ini dilakukan untuk memperoleh informasi Kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan melalui indikator sasaran kegiatan Unit Kerja. Aspek ini diperoleh dari capaian sasaran kegiatan yang dihitung menggunakan formula penghitungan capaian sasaran program	
3	Unsur perencanaan dengan bobot 60% (enam puluh persen)	Unsur perencanaan dengan bobot 40 % (empat puluh persen)
4	Tahapan revisi anggaran merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap.	Tahapan revisi anggaran merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi internal.
5	Nilai revisi anggaran dihitung berdasarkan nilai rata-rata revisi DIPA per tahun. (diambil dari aplikasi SATUDJA).	Nilai revisi anggaran dihitung berdasarkan nilai rata-rata revisi per triwulan.
6	Tahapan revisi anggaran dinilai dengan kriteria sebagai berikut:  a) 0 - 1 kali revisi = 100  b) 2 - 3 kali revisi = 50  c) 4 - 5 kali revisi = 20  d) >5 kali revisi = 10	Tahapan revisi anggaran dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) 0 – 3 kali revisi = 100 b) 4 – 6 kali revisi = 50 c) 7 – 9 kali revisi = 20 d) >10 kali revisi = 0
7	Pengisian Aplikasi SMART dan pelaporan capaian Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) dengan bobot 15% (lima belas persen).	Pengisian Aplikasi SMART dengan bobot 5% (lima persen).
8	Tahapan pengisian Aplikasi SMART dihitung berdasarkan nilai rata-rata ketepatan waktu dan kesesuaian pengisian Aplikasi SMART	Tahapan ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART

Lampiran		
9	Penilaian ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART dihitung dengan kriteria sebagai berikut: (1) kurang dari sampai dengan tanggal 16 setiap bulan = 100 (2) terlambat 1-2 hari kerja = 50 (3) terlambat 3 hari kerja = 20	Penilaian ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART dihitung dengan kriteria sebagai berikut: (1) kurang dari sampai dengan tanggal 5 setiap bulan = 100 (2) terlambat 1-2 hari kerja = 50 (3) terlambat 3 hari kerja = 20
	Hasil penilaian evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja dengan bobot 5% (lima persen)	Hasil penilaian evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja dengan bobot 15% (lima belas persen)
10	Revisi anggaran dengan bobot 20% (dua puluh persen).	Kelengkapan dokumen revisi anggaran dengan bobot 10% (sepuluh persen)
11	Unsur keuangan dengan bobot 15% (lima belas persen), terdiri atas:  1) capaian output dengan bobot 10% (sepuluh persen).  Tahapan ini dihitung dari rasio antara capaian nilai Kinerja RO terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Unit Kerja setiap triwulan. Penghitungan ini diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)/Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penilaian kinerja RO dihitung dengan kriteria sebagai berikut: a) deviasi 0% = 100 b) deviasi 1%-10% = 75 c) deviasi >10% - 20% = 50 d) deviasi >20% = 25  2) kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan bobot 2,5% (dua koma lima	Unsur keuangan dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:  1) capaian output dengan bobot 15% (lima belas persen).  Tahapan ini dihitung dari realisasi capaian output terhadap trajektori nasional yang dikelola oleh Unit Kerja setiap triwulan. Penilaian capaian output dihitung dengan kriteria sebagai berikut:  a) deviasi 0%-5% = 100  b) deviasi >5%-10% = 75  c) deviasi >10% - 20% = 50  d) deviasi >20% = 25  2) kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan bobot 5% (lima persen). Tahapan ini dihitung dari kesesuaian jumlah usulan TUP dengan realisasi TUP. Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:  a) >90% =100

•	
Lam	piran

kesesuaian jumlah usulan TUP dengan realisasi TUP. Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) 100% = 100
- b) 70%-99,99% = 70
- c) <70% = 40
- 3) batas pengembalian Uang Muka Kegiatan (UMK) dengan bobot 2,5% (dua koma lima persen). Tahapan ini dihitung dari ketepatan waktu pengembalian UMK. Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) kurang dari sampai dengan 7(tujuh) hari kerja= 100
  - b) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja = 50

- c) >50%-70% = 50
- d) <50% = 25

Kesesuaian Daftar Barang Ruangan (DBR) dengan jumlah barang yang ada dalam satu tahun, dengan bobot 3% (tiga persen). Tahapan ini dihitung dengan membandingkan

dihitung dengan membandingkan daftar barang ruangan dengan jumlah barang yang ada di ruangan.

(1) 100% sesuai DBR = 100

12

- (2) 90%-99,99% sesuai DBR = 75
- (3) 80% 89,99% sesuai DBR = 50
- (4) < 80% sesuai DBR = 25

Ketaatan dalam melaporkan kondisi barang secara

berkala setiap semester, dengan bobot 3% (tiga

persen). Tahapan ini dihitung dengan ketaatan dalam melaporkan kondisi barang pada unit kerja dengan batas Penyampaian DBR yang mengalami update data mutasi barang setiap tahun dengan bobot 5% (lima persen).
Perhitungan dengan melihat ketaatan dalam melaporkan perpindahan atau

a) melaporkan data DBR sesuai fisik sepenuhnya (100%) = 100

kesesuaian posisi fisik barang.

- b) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (kurang dari 25%) = 80
- c) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (25,00%-49,99%) = 60
- d) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (50,00% -74,99%) = 40
- e) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (75,00% -99,99%) = 20
- f) tidak melaporkan DBR = 0

	Lampiran		
	waktu penyampaian yang ditetapkan.		
	Tahapan ini dinilai dengan kriteria		
	sebagai berikut:		
	(1) kurang dari sampai dengan waktu		
	yang ditentukan = 100		
	(2) terlambat melaporkan = 50		
	(3) tidak melaporkan = 20		
	Ketepatan penyampaian Rencana	Ketepatan penyampaian Rencana Umum	
	Umum Pengadaan (RUP), dengan	Pengadaan (RUP), dengan bobot 5%	
	bobot 4% (empat persen). Tahapan ini	(lima persen). Tahapan ini dinilai	
	dinilai dengan kriteria sebagai	dengan kriteria sebagai berikut:	
13	berikut:	a) tepat waktu = 100	
	a) kurang dari sampai dengan waktu	b) terlambat melaporkan = 50	
	yang ditentukan = 100	c) tidak melaporkan = 0	
	b) terlambat melaporkan = 50		
	c) tidak melaporkan = 20		
	Unsur pengawasan dengan bobot 15%	Unsur pengawasan dengan bobot 30%	
	(lima belas persen), terdiri atas:	(tiga puluh persen), terdiri atas:	
	1) persentase ketepatan waktu	1) persentase tindak lanjut	
	penyampaian Laporan Harta	rekomendasi hasil audit internal,	
	Kekayaan Penyelenggara Negara	dengan bobot 10% (lima persen).	
	(LHKPN) dan Laporan Harta	2) persentase tindak lanjut	
	Kekayaan Aparatur Sipil Negara	rekomendasi hasil reviu RKAKL,	
	(LHKASN), dengan bobot 2%	dengan bobot 8% (empat persen)	
	(dua persen)	3) ketepatan waktu penyampaian	
	2) ketepatan waktu penyampaian	dokumen Manajemen Risiko Unit	
1.4	dokumen Manajemen Risiko Unit	Kerja, dengan bobot 2% (satu	
14	Kerja, dengan bobot 2% (dua	persen)	
	persen)	4) ketepatan waktu penyampaian	
	3) ketepatan waktu penyampaian	dokumen Pemantauan Manajemen	
	dokumen Pemantauan Manajemen	Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2%	
	Risiko Unit Kerja), dengan bobot	(satu persen)	
	2% (dua persen)	5) persentase tindak lanjut	
	4) hasil penilaian evaluasi atas	rekomendasi hasil reviu dokumen	
	implementasi Sistem	Manajemen Risiko, dengan bobot	
	Akuntabilitas Kinerja Instansi	4% (empat persen)	
	Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja	6) hasil penjaminan kualitas	
	dengan bobot 5% (lima persen)	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	

Lampiran		
	5) hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen)	Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen)
15	Ketepatan waktu penyampaian dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:  a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100  b) terlambat melaporkan = 50 c) tidak melaporkan = 20	Ketepatan waktu penyampaian dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100 b) terlambat melaporkan = 50 c) tidak melaporkan = 0
16	Ketepatan waktu penyampaian dokumen Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:  a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100  b) terlambat melaporkan = 50  c) tidak melaporkan = 20	Ketepatan waktu penyampaian dokumen Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100 b) terlambat melaporkan = 50 c) tidak melaporkan = 0
17	Hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:  a) nilai MRI 5 = 100 b) nilai MRI 3-4 = 75 c) nilai MRI 1-2 = 50 d) nilai MRI <1 = 25	Hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen). Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:  Nilai MRI unit kerja nilai max MRI = kualitas MRI
18	Kualifikasi penilaian Kinerja ditetapkan sebagai berikut:  1. sangat baik dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 100 (seratus);  2. baik dengan capaian nilai 80,01 (delapan puluh koma nol satu)	Kualifikasi Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi  1. "sangat baik" dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 100 (seratus);  2. "baik" dengan capaian nilai 75,01 (tujuh puluh lima koma nol satu)

#### Lampiran

- sampai dengan nilai 90,0 (sembilan puluh koma nol);
- 3. cukup baik dengan capaian nilai 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 80,0 (delapan puluh koma nol); dan
- 4. kurang baik dengan capaian nilai kurang atau sama dengan 70,0 (tujuh puluh koma nol).
- sampai dengan nilai 90,00 (sembilan puluh koma nol nol);
- 3. "cukup baik" dengan capaian nilai 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol); dan
- 4. "kurang baik" dengan capaian nilai kurang atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol nol).

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara di mana di dalam salah satu pasalnya mengamanatkan dibentuknya Tim Penilai dan Tim Sekretariat, telah disusun Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai oleh Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor Keputusan Sekretaris Utama Nomor 77/S1/HKM.02.2 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja tanggal 14 November 2022 dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 78/S1/HKM.02.2 Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja tanggal 14 November 2022.

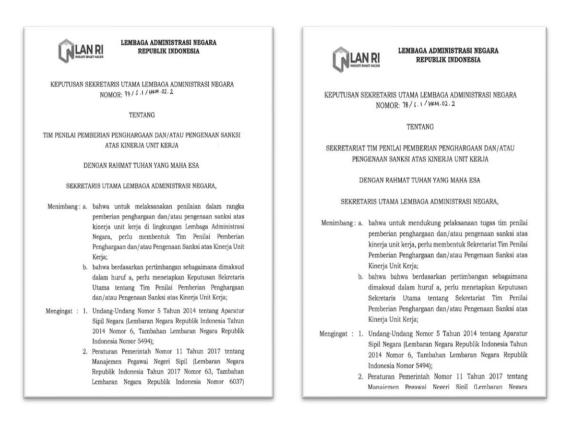
### Tim Penilai bertugas:

- 1. melakukan penilaian terhadap Aspek Kinerja Internal;
- 2. menyusun hasil penilaian Kinerja Unit Kerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian; dan
- 3. menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja.

Sedangkan Sekretariat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 77/S1/HKM.02.2 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja tanggal 14 November 2022 dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 78/S1/HKM.02.2 Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Unit Kerja tanggal 14 November 2022 Penilai memiliki tugas membantu kelancaran

pelaksanaan tugas Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja.

Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum di dalam lampiran 3 dan 4 dan tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 27. Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai

#### 4. Inisiasi Pembentukan Community of Practises (CoP)

Konsep *Community of Practice* (CoP) pertama kali diperkenalkan oleh Etienne Wenger, menurut dia definisi Communities of Practice adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam berbagi minat dan hobinya, kemudian mereka saling belajar satu sama lain untuk menjadi lebih baik dalam minat dan hobinya tersebut (Wenger, McDemort, dan Snyder: 2002). CoP dibentuk dengan tujuan untuk menjadi wadah atau tempat untuk berdiskusi atau bertukar pikiran atau *sharing knowledge* antara para anggotanya sehingga kapabilitas anggota CoP meningkat, mencari solusi terhadap suatu masalah atau ide, dan

menjadi sumber informasi terbaru sehingga penyampaian informasi bisa dilakukan secara cepat.

Dalam rangka tetap mempertahankan nilai kinerja anggaran di mana kebijakan bersifat dinamis, maka dibentuk CoP bagi Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana. Pembentukan CoP ini diawali dengan inisiasi melalui survey dengan memberikan kuesioner dengan target sebanyak 9 orang Analis Anggaran, 13 orang Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan 15 orang Perencana dengan menggunakan link https://tinyurl.com/SurveyPembentukanCoP https://tinyurl.com/SurveyCoPdan JFPerencana sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 28. Form survey bagi Analis Anggaran, PK APBN, dan APK APBN



Gambar 29.Form survey bagi Perencana

Dari survey yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Dari 9 orang Analis Anggaran, yang merespon sebanyak 5 orang dan dari 13 orang Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN, terdapat 7 orang yang memberikan respon dengan hasil survey sebagai berikut:
  - Semua menjawab setuju dibentuknya CoP dengan beberapa alasan, yaitu:
  - 1) Untuk saling membantu dalam praktek penganggaran dan pelaksanaan anggaran;
  - 2) Sebagai instrument untuk sharing knowledge;
  - 3) Dengan adanya CoP akan membantu AA dan APK APBN lebih mudah berdiskusi dalam pelaksanaan analisis terkait perencanaan maupun pelaksanaan anggaran sehingga LAN dapat mendapatkan nilai kinerja anggaran yang bagus;
  - 4) Untuk berbagi ilmu dan pengalaman;
  - 5) Perlunya penyamaan persepsi internal LAN;
  - 6) Ada tempat untuk sharing informasi;
  - 7) Untuk mempermudah koordinasi dan update kebijakan;
  - 8) Adanya forum berbagi pengalaman terkait permasalahan perencanaan dan keuangan sehingga tidak terulang kembali di satuan kerja lainnya, dan apabila masih ditemukan kembali dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Semua jawaban tersebut di atas sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 30.Hasil survey pentingnya Pembentukan CoP bagi Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Sedangkan dari sisi manfaat, Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN menyatakan sebagai berikut:

- Dapat saling berkoordinasi dan membantu dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, jika penganggaran tepat maka penyerapan anggaran juga akan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2) Akan diperoleh JF yang kompetensinya sama;
- 3) selain dpt mendorong dlm pencapaian nilai kinerja anggaran yang lebih baik, dengan adanya CoP ini juga dpt membantu para AA maupun APK APBN dalam memperoleh info terkait pengembangan kompetensi dan dapat membantu dalam diskusi pengumpulan AK bagi para AA maupun APK APBN;
- 4) dpt mengambil pembelajaran dr permasalahan yg dihadapi dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul;
- 5) Peningkatan kompetensi secara umum dan adanya penyamaan alur/metode/nomenklatur/penerapan di setiap satker yang memiliki karakteristik yang serupa;
- 6) sharing informasi dan pengetahuan.

Semua jawaban tersebut di atas sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 31.Hasil survey manfaat Pembentukan CoP bagi Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

b. Dari 15 orang Perencana, terdapat 7 orang yang memberikan respon dengan hasil sebagai berikut:

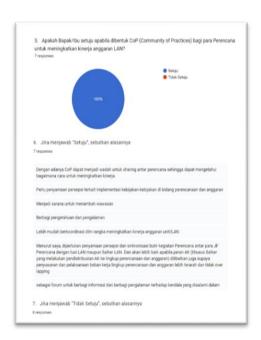
Semua menjawab setuju dibentuknya CoP dengan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Dengan adanya CoP dapat menjadi wadah untuk sharing antar perencana sehingga dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Perlu penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan-kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran;
- 3) Menjadi sarana untuk menambah wawasan;
- 4) Berbagi pengetahuan dan pengalaman;
- 5) Lebih mudah berkoordinasi dlm rangka meningkatkan kinerja anggaran unit/LAN;
- 6) Menurut saya, diperlukan penyamaan persepsi dan sinkronisasi butir kegiatan Perencana antar para JF Perencana dengan tusi LAN maupun Satker LAN. Dan akan lebih baik apabila peran AK (khusus Satker yang melakukan pendistribusian AK ke lingkup perencanaan dan anggaran) dilibatkan juga supaya penyusunan dan pelaksanaan beban kerja lingkup perencanaan dan anggaran lebih terarah dan tidak over lapping;
- 7) sebagai forum untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman terhadap kendala yang diaalami dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan dari sisi manfaat, Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN menyatakan sebagai berikut:

- 1) Harapannya agar dapat meningkatkan kinerja anggaran instansi dan kompetensi perencana sendiri;
- 2) Mempunyai tempat sharing sesama perencana;
- 3) Membantu untuk info2 perencana;
- 4) Pengembangan kemampuan dan hasil kerja;
- 5) Memperlancar dan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan yang mgkin saja adanya hambatan Krn kurangnya pemahaman ketika ada perubahan2;
- 6) Menurut saya, dengan adanya COP diharapkan menjadi wadah bagi para Perencana di LAN/Satker LAN untuk saling berbagi ilmu dan strategi yang dapat dikembangkan oleh masing-masing JF Perencana sehingga eksistensi Perencana memberikan output/outcome bagi lembaga dan penerima manfaat lainnya;
- 7) adanya komunitas untuk berbagi informasi dan pengalaman.

Semua jawaban tersebut di atas sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 32.Hasil survey Pembentukan CoP bagi Perencana

Untuk frekuensi waktu pertemuan atau dilakukannya forum untuk sharing di antara para anggota CoP terdapat beberapa jawaban yang bervariasi, seperti tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 33.Frekuensi Pertemuan/Forum dari Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Survey Frekuensi Pelaksanaan Forum CoP		
Frekuensi	Jumlah Survey	
Satu Kali Sebulan (Bulanan)	5	
4 Kali dalam Setahun (Triwulanan)	2	
2 Kali dalam Setahun (Semesteran)	1	



Gambar 34.Frekuensi Pertemuan/Forum dari Perencana

Survey Frekuensi Pelaksanaan Forum CoP		
Frekuensi	Jumlah Survey	
Satu Kali Sebulan (Bulanan)	2	
4 Kali dalam Setahun (Triwulanan)	4	
2 Kali dalam Setahun (Semesteran)	1	

# 5. Pengesahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan terbangunnya aplikasi

Sebagai hasil final dari dilakukannya pertemuan rapat, FGD dan uji public, telah diterbitkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Peraturan ini mencabut Peratiran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 untuk perihal yang sama dan aplikasi dengan branding Si PeKerjA LAN. Untuk Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 5.

Sedangkan untuk aplikasi Si PeKerjA LAN dapat dilihat pada website Lembaga Administrasi Negara dengan alamat <a href="https://sipekerja.lan.go.id/">https://sipekerja.lan.go.id/</a> dan pada Play Store.

# 6. Sosialisasi Peraturan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi Si PeKerjA LAN

Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022 dan *soft launching* aplikasi Si PeKerjA LAN di hadapan *stakeholders* internal dan eksternal dan dilakukan secara blended di dalam forum Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran LAN Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Aruna Senggigi Lombok yang dibuka langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Di dalam forum tersebut sekaligus merupakan forum bagi pembentukan komitmen bagi para Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana untuk membentuk CoP dengan ditandatanganinya Lembar Komitmen oleh wakil masing-masing Jabatan Fungsional dan disaksikan oleh Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:







Gambar 35.Desiminasi Peraturan Kepala LAN dan soft launching aplikasi Si PeKerjA LAN dan penandatanganan lembar komitmen pembentukan CoP

Karena keterbatasan waktu, pembangunan aplikasi belum sempurna, dan oleh karena itu akan terus dilakukan evaluasi untuk pengembangannya di jangka menengah dan jangka panjang.

#### 7. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi

Sebelum diselenggarakannya bimbingan teknis, Tim Efektif telah melakukan simulasi penilaian kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara untuk anggaran tahun 2022 pada Triwulan IV sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 pasal 2 ayat (4) pada tanggal 8 November 2022 dengan menggunakan excel sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 36.Simulasi penilaian kinerja anggaran TA 2022

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dalam input-olah-saji data pada aplikasi Si PeKerjA LAN, perlu dilakukan bimbingan teknis oleh Tim IT kepada para Tim Efektif Sekretariat secara blended pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Gambar 37.Bimbingan Teknis Penggunaan Si PeKerjA LAN

### 8. Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat yang diperoleh dari proyek perubahan adalah:

a. Tersedianya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang menjadi acuan dalam tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi, yaitu dengan terbitnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



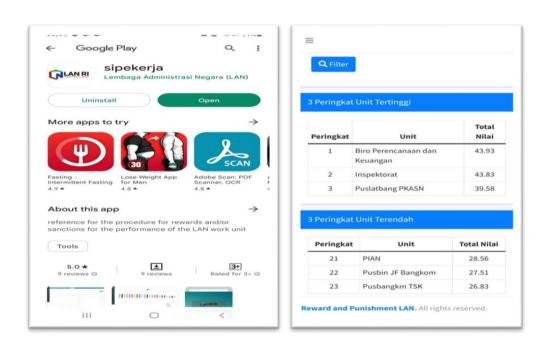
Gambar 38. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.17 Tahun 2022

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 telah dibuat juga dalam bentuk Flibook dengan link: <a href="https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/peraturan-kepala-lan-no-17-tahun-2022">https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/peraturan-kepala-lan-no-17-tahun-2022</a>

b. Tersedianya aplikasi yang berbasis web dan android yang digunakan untuk inputolah-saji data sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 39.Aplikasi Si PeKerjA LAN pada website Lembaga Administrasi Negara



Gambar 40. Aplikasi Si PeKerjA LAN pada Android

c. Adanya komitmen untuk pembentukan *Community of Practises* (CoP) bagi para Perencana, Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN dengan ditandatanganinya lembar komitmen oleh para wakil dari Perencana, Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN dengan disaksikan oleh Sekretaris Utama Lembaga

Administrasi Negara dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 41.Lembar Komitmen Pendirian CoP

Terhadap terbitnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 dan terbangunnya aplikasi Si PeKerja LAN telah dilakukan penilaian kinerja anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 42.Hasil penilaian kinerja anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai kinerja anggaran semua unit kerja masih berwarna merah, di mana peringkat nilai tertinggi pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan terendah pada Pusbangkom. Nilai yang diinput belum optimal disebabkan:

- a. Tidak semua indicator penilaian dapat dilakukan penilaian mengingat baru dapat dilakukan pada akhir tahun
- b. Belum semua anggota tim sekretariat melakukan input nilai kinerja anggaran Dengan hasil tersebut di atas maka dapat menjadi alat monitoring bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

#### B. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis adalah istilah yang digunakan untuk pemimpin yang memiliki visi, memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mempertahankan fleksibilitas, serta mampu memberi kuasa kepada orang lain dengan tujuan untuk menciptakan sebuah perubahan strategis yang diperlukan. Pemimpin strategis memiliki keahlian dalam memberdayakan setiap sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, agar proses untuk mencapai tujuan tersebut bisa berjalan dengan semaksimal mungkin.<sup>3</sup>

Ada berbagai karakteristik yang melekat pada diri pemimpin strategis, yaitu jujur, memiliki kemampuan diplomasi, memiliki empati, rendah hati, mampu menciptakan kolaborasi, memiliki komunikasi yang kuat, memiliki kemampuan mendengar, memiliki semangat dan komitmen, memiliki sikap positif, dan selalu berinovasi. Dengan karakteristik tersebut, maka seorang pemimpin strategis harus mampu untuk menemukan peluang yang memberi nilai tambah bagi organisasi, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kepemimpinan strategis akan lebih optimal apabila dikombinasikan dengan kepemimpinan kewirausahaan, karena dengan kepemimpinan kewirausahaan maka seorang pemimpin akan memiliki perhitungan yang cermat, antisipatif terhadap segala

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ken Jacks Waoma,2020

risiko dari setiap keputusan yang diambil, serta visioner yang merupakan sifat yang perlu dipertajam seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Di samping itu seorang pemimpin wirausaha harus mampu membangun tim yang solid, berani mengambil resiko, memiliki pikiran terbuka, dan memiliki kepercayaan diri.<sup>4</sup>

Dalam rangka pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, maka diperlukan kepemimpinan digital yang mampu menggunakan aset digital dan mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan unsur organisasi atau *stakeholder* lain untuk menemukan solusi. Kepemimpinan digital atau *digital leadership* diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Hadirnya pemimpin digital dapat mendorong percepatan transformasi di dalam organisasi.

Terdapat empat karakteristik yang membedakan kepemimpinan biasa dengan *e-Leadership*. Pertama, terkait dengan kemampuan komunikasi, dimana *digital leader* telah mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan perangkat media sosial untuk terus terkoneksi dengan anggota di dalam maupun luar organisasi. Karakteristik kedua, *digital leader* harus mampu memiliki kemampuan berpikir dan bekerja sama tanpa adanya batasan waktu, ruang, dan rintangan budaya dimana pengawasan dan interaksi tatap muka tidak lagi diperlukan. Kemudian ketiga, digital leader juga memiliki kemampuan dalam memantau dan mengelola pekerjaan dengan efektif secara virtual. Karakteristik keempat yang membedakan pemimpin biasa dengan *digital leader* adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut penyesuaian perubahan yang berjalan dengan cepat agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.<sup>5</sup>

Dalam rangka merespon terhadap perubahan maka diperlukan seorang pemimpin yang adaptif. Kepemimpinan adaptif adalah yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan *flexible*.

rjanyo kumolo,2021

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kriswangsa Bagus,2017

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tjahyo Kumolo,2021

Ada empat dimensi kepemimpinan adaptif, yaitu pemimpin mampu menguasai ketidakpastian dan mengadopsi pendekatan-pendekatan baru jika tetap ingin eksis dalam kondisi yang bergejolak; memimpin dengan empati artinya pemimpin mampu menciptakan rasa memiliki satu tujuan yang sama dan mengelolanya melalui pengaruh daripada melalui perintah dan control; belajar melalui koreksi diri dan refleksi artinya pemimpin mampu mendorong bahkan mendesak upaya percobaan-percobaan baru, bisa saja percobaan tersebut gagal tetapi dari kegagalan tersebut mendapatkan perbaikan; dan fokus pada keberhasilan yang terus menerus bagi organisasi dan stakeholders.<sup>6</sup>

Dalam proses implementasi proyek perubahan dalam rangka menjamin kesinambungan organisasi dalam menghadapi era VUCA, diperlukan kepemimpinan strategis, kepemimpinan kewirausahaan, dan kepemimpinan digital. Beberapa peran kepemimpinan strategis, kepemimpinan kewirausahaan, dan kepemimpinan digital dalam implementasi proyek perubahan ini adalah:

- 1. Memanfaatkan kerjasama dengan para stakeholders, baik internal maupun eksternal. Pihak internal adalah seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sedangkan pihak eksternal adalah Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta tim IT dari pihak ketiga. Kerjasama ini diperlukan dalam rangka penyusunan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan pembangunan aplikasi. Kerjasama dengan stakeholders diperlukan dalam rangka menyempurnakan capaian proyek perubahan dengan cara melakukan komunikasi agar capaian proyek perubahan ini merupakan capaian bersama dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- 2. Menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam pencapaian proyek perubahan sesuai dengan kepentingan dan kompetensi masing-masing. Kepemimpinan strategis dengan mengoptimalisasi peran semua stakeholder sehingga diperlukan kerjasama yang baik. Dengan peran aktif dan kerjasama yang baik dari semua pihak maka pencapaian proyek perubahan yang semula menjadi target jangka menengah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Angger Dewantara.2022

dapat dicapai pada jangka pendek. Penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi serta pembuatan *branding* atas aplikasi yang dibangun dan implementasi Peraturan Kepala LembagaAdministrasi Negara dan aplikasi yang semula merupakan target jangka menengah mampu dicapai pada jangka pendek.

- 3. Mendorong dihasilkannya inovasi untuk optimalisasi capaian proyek perubahan. Dalam hal ini *project leader* melakukan koordinasi dan komunikasi secara terusmenerus dengan stakeholders untuk menjaring informasi terkait kebutuhan organisasi dalam rangka adaptasi terhadap perubahan sehingga tercipta suatu inovasi dibangunnya system informasi atau aplikasi yang dapat menjadi media bagi input-olah-saji data capaian kinerja anggaran berbasis web dan android sehingga sekaligus dapat dijadikan alat monitoring bagi capaian kinerja anggaran dan keterbukaan informasi public.
- 4. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki melalui pemanfaatan sumber daya keuangan, manusia, sumber daya peralatan, maupun jejaring kerja. Dalam implementasi proyek perubahan, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal agar tercapai output yang telah ditetapkan, terutama dalam jangka pendek. Upaya yang dilakukan adalah dengan pembetukan Tim Efektif untuk pemanfaatan sumber daya manusia di mana terdapat sumber daya manusia yang tugasnya adalah sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga dapat berkontribusi secara optimal. Sedangkan untuk pemanfaatan anggaran menggunakan alokasi DIPA pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan memanfaatkan mengikutkan kegiatan penyusunan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi dengan kegiatan lain yang telah terencana karena belum teralokasikannya anggaran secara khusus. Jejaring kerja juga dioptimalkan dalam rangka menjaring masukan terhadap penyusunan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan pembangunan aplikasi dan meminta dukungan baik dari stakeholders internal maupun eksternal.

# C. Implementasi Strategi Marketing

Untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder, telah digunakan strategi marketingmix. Strategi marketing yang dipergunakan dalam proyek perubahan ini adalah

strategi 4P + 1C (product, price, place, promotion, customer), dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Product

adalah barang dan jasa yang ditawarkan sebagai sebuah kebutuhan.

Terdapat 3 produk yang dihasilkan dari proyek perubahan ini, yaitu:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
- b. Aplikasi Si PeKerjA LAN, baik berbasis web maupun android yang dapat diunduh pada Play Store beserta panduan penggunaannya.
- c. Komitmen pembentukan *Community of Practises* (CoP) bagi para Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana.

## 2. Price

merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk.

Pembiayaan berasal dari DIPA Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara, meskipun tidak ada biaya khusus penyusunan Peraturan Kepala LAN dan pembangunan aplikasi karena belum dianggarkan dan akan segera dilakukan penyesuaian ataupun terobosan dengan mengikutkan kegiatan penyusunan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi dengan kegiatan lain yang telah terencana.

## 3. Place

adalah bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang dijalankan, yaitu tempat implementasi proyek perubahan.

Proyek Perubahan ini dilaksanakan di Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara.

## 4. Promotion

Merupakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan/ mengkomunikasikan manfaat produk.

Promosi proyek perubahan dilakukan melalui:

a. website <a href="http://lan.go.id">http://lan.go.id</a> sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 43.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi Si PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada website

Di dalam website lan.go.id, selain menampilkan berita tentang Desiminasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 dan *soft launching* aplikasi Si PeKerjA LAN serta pembentukan CoP, dimuat juga Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tersebut pada <a href="http://jdih.lan.go.id/regulasi">http://jdih.lan.go.id/regulasi</a> sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 44.Pengundangan Peraturan Kepala LAN pada <a href="http://jdih.lan.go.id">http://jdih.lan.go.id</a>

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 juga dibuat dalam bentuk flipbook dengan link <a href="https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/peraturan-kepala-lan-no-17-tahun-2022">https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/peraturan-kepala-lan-no-17-tahun-2022</a> dan buku saku.

# b. Play Store

Untuk aplikasi Si PeKerjA LAN, selain diunggah di website lan.go.id, juga dimuat di *Play Store* agar setiap orang yang mempunyai minat dapat menginstall dan mempermudah para pimpinan LAN untuk melihat capaian kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara dalam rangka melakukan monitoring dan pengambilan keputusan.

c. Instagram Humas Lembaga Administrasi Negara (@humas\_lan) dengan *followers* sebanyak 30.000 dan mendapat *like* sebanyak 163 pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 45.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi Si PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada IG

d. Membangun komunikasi aktif dengan stakeholders, yaitu mengunjungi Kementerian/Lembaga lain untuk mempromosikan produk proyek perubahan ke Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 7 November 2022 dan 17 November 2022 dan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 1 November 2022 maupun melalui desiminasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 10 November 2022 di Senggigi Lombok



Gambar 46.Desiminasi Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022, soft launcing aplikasi Si PeKerjA LAN, dan pembentukan CoP pada forum rakor Perencanaan dan Penganggaran di Senggigi Lombok





Gambar 47.Gambar kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara





Gambar 48.Gambar Kunjungan ke Kementerian PPN/Bappenas

## 5. Customer

adalah pihak-pihak pengguna produk dan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan.

Customer dari dibuatnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi Si PeKerjA LAN serta inisiasi pembentukan CoP adalah:

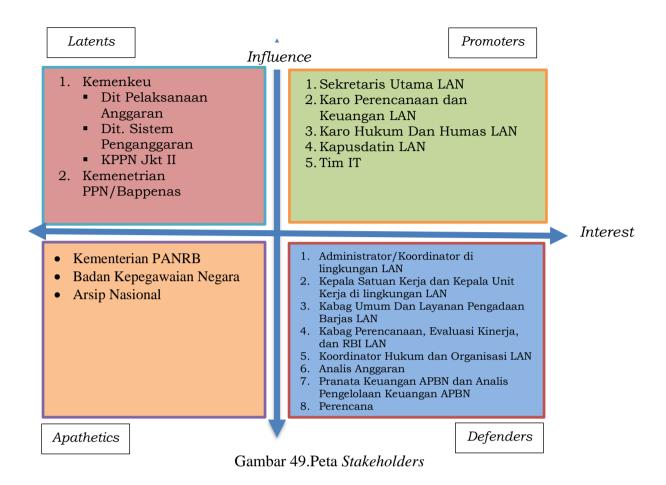
- Seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- 2. Kementerian Keuangan

Mengingat berbagai karakteristik yang ada pada stakeholders, maka strategi komunikasi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan adalah:

- 1. *Promoters*: Meminta arahan, melakukan konsultansi, dan memebrikan laporan secara berkala terhadap perkembangan implementasi proyek perubahan.
- 2. *Latens:* Memberikan informasi, melakukan FGD, dan meminta masukan dari pihak *latens*
- 3. *Defenders*: Melibatkan dalam penyusunan rancangan Peraturan dan pembangunan aplikasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi
- 4. Apathetics: Menyampaikan informasi tentang manfaat proyek perubahan

# D. Perubahan Dukungan Stakeholders

Salah satu kriteria keberhasilan dari implementasi Proyek Perubahan dalam 2 bulan ini terlihat dari dukungan yang diberikan oleh stakeholder, baik internal maupun eksternal. Terdapat beberapa stakeholder terkait dengan kegiatan ini baik dari internal maupun eksternal. Stakeholders sebelum dilakukannya strategi marketing sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Dalam proses implementasi proyek perubahan, strategi marketing memberikan hasil dengan bergesernya *stakeholders latents* menjadi *promoter* dan *stakeholder apathetics* menjadi *defenders*.

Kegiatan-kegiatan yang berpengaruh dalam perubahan peta stakeholders tersebut antara lain:

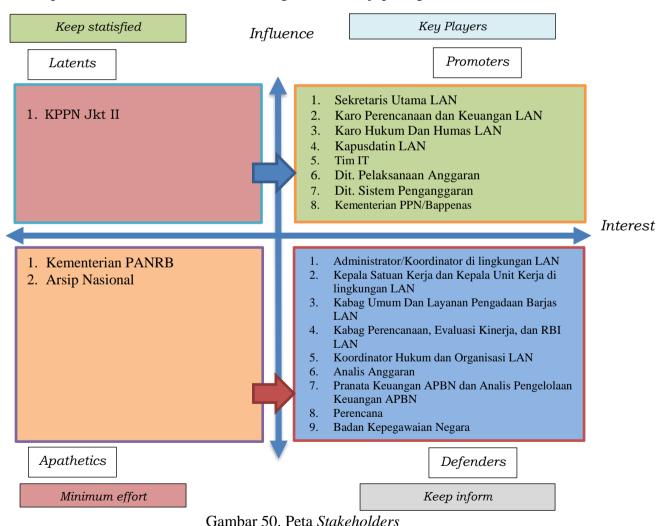
- 1. Komunikasi intensif dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan untuk kriteria penilaian kinerja anggaran dan dengan pihak ketiga untuk pembangunan aplikasi, dan juga dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penentuan Rincian Output dan Klasifikasi Rincian Output yang dilakukan secara bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- 2. Pelaksanaan kegiatan rapat dan FGD terkait rancangan Peraturan dan rancangan aplikasi dengan mengundang peserta dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga.

- 3. Mengunjungi para pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan promosi terkait proyek perubahan sehingga berminat untuk melakukan replikasi.
- 4. Desiminasi dan soft launching Peraturan dan aplikasi yang dibangun.

Dengan komunikasi yang dilakukan secara intensif maka terjadi pergeseran stakeholders, yaitu:

- 1. Dari Latens berpindah ke Promotors:
  - a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan
  - b. Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan
  - c. Kementerian PPN/Bappenas
- 2. Dari Apathetic berpindah ke Defenders:
  - a. Badan Kepegawaian Negara

Perpindahan stakeholders tersebut sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Dukungan secara khusus diberikan melalui pernyataan bahwa Lembaga Administrasi Negara merupakan satu-satunya Lembaga yang memiliki kebijakan untuk reward and punishment bagi pelaksanaan kinerja anggaran yang dilengkapi dengan aplikasi yang berbasis web dan android sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring capaian kinerja anggaran. Dukungan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

# Testimoni Kepala Biro Keuangan BKN

PELATIHAN KEPEMIMPANAT INOKAT II
ANGKATAN XX TAHUN 2022

'ang bertandatangan di bawah ini
iama : W3 chyu, & Kom, map
batan : Ret, Kepula Girao Kestorogan.

shatan : Ret, Kepula Girao Kestorogan.

shatan : Ret, Kepula Girao Kestorogan.

shatan : Dwi Ariany
tahani : Bandan 'apeqarita'an Nagara

shatan : Dwi Ariany
tahani : Lembaga Administrasi Negara

shat : Strategi Akselensi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga
Administrasi Negara

tengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya
tas inowal Proyek Perubahan duri Stadatan Dwi Ariany, Analis Pengelolaan Keuangan APIN

Mi Maday salakan Korodistor Keuangan pada Bito Penenananan dan Keuangan dengan judal
Strategi Akselensi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi Negara.

"Aga Administrasi Negara"

"Aga Administrasi Negara

"Aga Administrasi Negara"

"Aga Administrasi Negara

"Aga Administrasi Negara.

"Aga Administrasi Negar

# Pertemuan dengan Deputi Bidang Teknologi Informasi BKN



Testimoni Deputi Bidang Polhukhankam Menteri Kementerian PPN/Bappenas



Testimoni Sekretaris Menteri Kementerian PPN/Bappenas



# Testimoni dari DJA Kementerian Keuangan

# Pertemuan dengan Kepala Biro Keuangan BKN





Gambar 51. Testimoni dari Kementerian/Lembaga Lain

# E. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Implementasi proyek perubahan harus dikawal baik pada jangka menengah maupun jangka Panjang dengan dukungan pimpinan Lembaga Administrasi Negara dan stakeholders. Dukungan terhadap keberlanjutan proyek perubahan disampaikan oleh:

- 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara,
- 2. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara,
- 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Lembaga Administrasi Negara,
- 4. Inspektur Lembaga Administrasi Negara,
- 5. Kepala Puslatbang dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara,
- Kepala Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara,
- 7. Wakil Direktur II Poltek STIA LAN Bandung, dan
- 8. Kepala Bagian Administrasi Umum pada Puslatbang dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.

Dukungan yang diberikan berupa pernyataan bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara akan digunakan sebagai kebijakan yang menjadi dasar untuk penilaian kinerja anggaran dengan monitoring melalui Si PeKerjA LAN sebagai alat monitoring bagi pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

# Dukungan Kepala LAN



Dukungan Kepala Pusdatin LAN



Video Dukungan dari Kepala Puslatbang PKASN LAN

Dukungan Sekretaris Utama LAN



Video Dukungan Inspektorat LAN



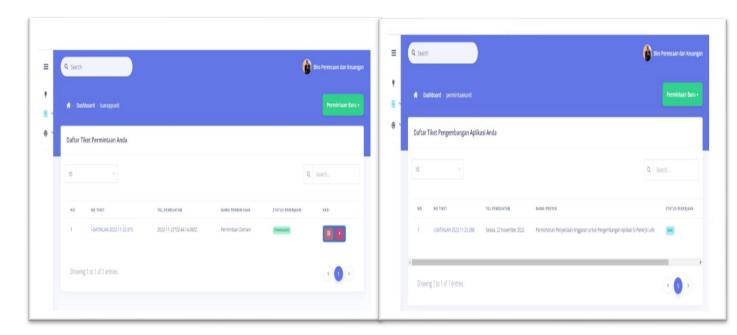


Video Dukungan dari Wakil Direktur II Poltek STIA LAN Bandung



Video Dukungan dari Kepala Bagian Umum Puslatbang PKASN LAN Bandung

Keberlanjutan proyek perubahan juga didukung dengan telah dialokasikannya penempatan aplikasi Si PeKerjA LAN pada server Lembaga Administrasi Negara dan pengalokasian anggaran menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 935/S.1.1/HMI.01 tanggal 21 November 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 938/S.1.1/HMI.01 tanggal 22 November 2022 kepada Kapusdatin melalui <a href="http://tracketing.lan.go.id">http://tracketing.lan.go.id</a>. Sebagaimana tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 53.Penempatan Aplikasi Si PeKerjA LAN pada server LAN

# F. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Dalam rangka pengembangan kompetensi terhadap pihak-pihak yang terdampak proyek perubahan, maka perlu disusun strategi dalam pemenuhannya sebagaimana tersaji pada table di bawah ini:

Tabel 8.Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

PIHAK YANG TERDAMPAK	PERUBAHAN KOMPETENSI		CARA PENGEMBANGAN	
	YAN	NG DIBUTUHKAN		
Tim Efektif Teknologi Informasi	Mampu	memahami	dan	Diskusi, sharing
	mengemba	ngkan sistem		
Tim Efektif Sekretariat	Mampu menggunakan aplikasi		Bimtek, rapat berkala triwulanan	

PIHAK YANG TERDAMPAK	PERUBAHAN KOMPETENSI	CARA PENGEMBANGAN
	YANG DIBUTUHKAN	
Tim Efektif Substansi	Mampu bekerjasama secara efektif	Rapat, konsolidasi, sosialisasi
Stakeholder internal	Mampu menimplementasikan	Sosialisasi/desiminasi
	Peraturan Kepala LAN	
Community of Practises (CoP)	Mampu memahami kebijakan yang	Sharing knowledge
	berlaku	

Untuk pengembangan kompetensi telah dilakukan kegiatan:

- Menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022 untuk seluruh unit kerja dan satker di lingkungan LAN pada tanggal 17 Oktober 2022.
- 2. Menyelenggarakan Bimtek Penggunaan Aplikasi Si PeKerjA LAN pada tanggal 16 November 2022.
- 3. Telah dilakukan desiminasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 pada tanggal 10 November 2022.

# G. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan

Terdapat 3 (tiga) mata pelatihan yang diikuti yang terkait dengan proyek perubahan adalah:

- Mengikuti Microlearning tentang Pengelolaan TUP melalui LMS KLC2 Kementerian Keuangan tanggal 1 Oktober 2022. Kegiatan ini dalam rangka mendukung ketepatan dalam pengelolaan TUP yang menjadi salah satu indicator penilaian kinerja anggaran.
- Mengikuti rakor evaluasi kinerja anggaran dan optimalisasi NKA TA 2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kegiatan rakor ini diikuti dalam rangka mengikuti perkembangan penilaian kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
- 3. Mengikuti ZM Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Nasional tanggal 9 September 2022 yang diselenggarakan dengan narasumber dari KemenpanRB. Kegiatan ini diikuti untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya dengan pembangunan system informasi digital.

# H. Potensi Risiko dan Mitigasi Risiko

Implementasi proyek perubahan tidak terlepas dari potensi risiko yang menghalangi tercapainya output proyek perubahan tepat waktu. Risiko-risiko tersebut antara lain:

- 1. Jangka Pendek
  - a. Penilaian kinerja anggaran belum bisa terlaksana
  - b. Pembangunan aplikasi belum optimal
- 2. Jangka Menengah
  - a. Pembentukan CoP terkendala dengan penyusunan regulasi
  - b. Pengembangan aplikasi belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan jumlah SDM IT internal
- 3. Jangka Panjang
  - a. Implementasi Peraturan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara

Terkait dengan potensi resiko jangka pendek telah dilakukan upaya mitigasi resiko, antara lain:

- 1. Melakukan pertemuan intensif dengan Sekretariat Tim Penilai untuk melakukan simulasi input data kinerja anggaran
- 2. Dilakukan simulasi untuk penilaian sementara terhadap indikator-indikator yang sudah dapat diukur pada jangka pendek
- 3. Penggunaan aplikasi dengan memanfaatkan fitur yang tersedia dan melakukan monitoring terhadap penggunan aplikasi sebagai media input-olah-saji data

## I. Kendala Yang Dihadapi dan Solusi

Dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan ini, terdapat beberapa kendala yang muncul yaitu:

- a. kesibukan yang tinggi dari Tim Efektif dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan pembangunan aplikasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan komunikasi intensif melalui WA/WA Group, dilakukannya pembahasan secara bertahap, dan memanfaatkan kegiatan lain untuk melakukan FGD, desiminasi Peraturan dan aplikasi.
- b. Belum optimalnya pembangunan aplikasi karena pembangunan aplikasi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga digunakan cara melakukan

- komunikasi intensif melalui WA/WA Group untuk permintaan progress pembangunan aplikasi dengan Tim IT, menggunakan tim IT dari pihak ketiga namun tetap berkoordinasi dan melibatkan Pusat Data dan Informasi Lembaga Administrasi Negara untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sesuai perkembangan teknologidan kebutuhan.
- c. Pembentukan CoP belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu untuk penyusunan kebijakan yang dijadikan dasar berjalannya CoP, sehingga untuk solusinya dilakukan tahap pembangunan komitmen Bersama sebagai awal pembentukan CoP.

# **BAB III**

# PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pada tahapan ini, peserta melakukan penilaian secara mandiri terhadap potensi diri yang dimiliki dan penilaian yang dilakukan oleh mentor untuk menetapkan rencana strategi pengembangannya. Berikut hasil pemetaan potensi diri secara individu dan penilaian mentor yang tersaji pada table di bawah ini:

Tabel 9.Strategi Pengembangan Potensi Diri

NO	KOMPONEN PERILAKU KEPEMIMPINAN	SUBKOMPONEN YANG PERLU PENGEMBANGAN	PENGEMBANGAN POTENSI DIRI JADWAL PENGEMBANGAN (60 hari)
2	Kerja Sama	Kerjasama Eksternal	1. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Konsolidasi Penyusunan LK TW III Th 2022 2. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022
3	Mengelola Perubahan	Orientasi pada Hasil	<ol> <li>Rekonsiliasi penerimaan PNBP setiap Triwulan dengan seluruh unit kerja di lingkungan LAN</li> <li>Rekonsiliasi pemenuhan anggaran s.d. akhir tahun</li> <li>18 Okt 2022</li> <li>26-28 Oktober</li> </ol>

Kegiatan-kegiatan untuk pengembangan potensi diri tersaji pada gambar berikut:



Gambar 54. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Konsolidasi Penyusunan LK TW III Th 2022 pada tanggal 12 Oktober 2022



Gambar 55. Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022 pada tanggal 17 Oktober 2022



Gambar 56. Rekonsiliasi penerimaan PNBP setiap Triwulan dengan seluruh unit kerja di lingkungan LAN pada tanggal 18 Oktober 2022

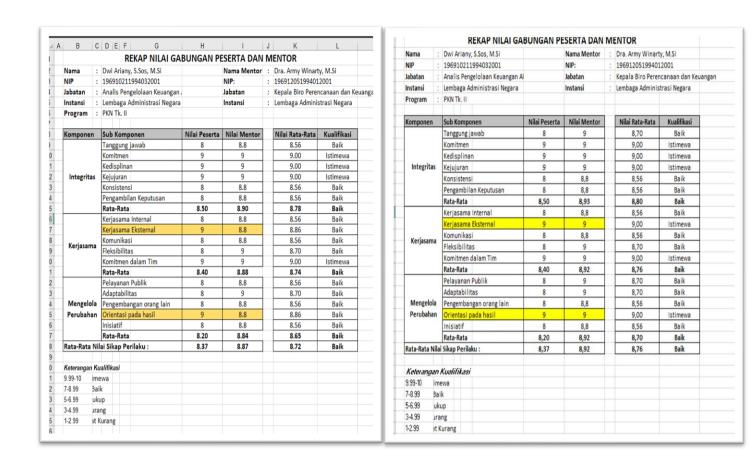






Gambar 57. Rekonsiliasi pemenuhan anggaran s.d. akhir tahun pada tanggal 26-28 Oktober 2022

Dengan adanya kegiatan penugasan yang telah dilaksanakan, maka terdapat perubahan pada nilai yang diberikan oleh mentor pada komponen kerjasama dan mengelola perubahan. Bahkan terdapat kenaikan pada sub komponen lain pada komponen integritas yaitu tanggung jawab dan pada komponen mengelola perubahan sub komponen pelayanan publik sebagaimana tersaji pada table di bawah ini:



Gambar 57. Perubahan Pengembangan Potensi Diri

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 1. Lesson Learnt

Lesson learnt atau pembelajaran yang diperoleh dari pelatihan kepemimpinan ini adalah:

- a. Strategi komunikasi dan koordinasi level pimpinan dengan Kementerian/Lembaga selaku Pembina, penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait implementasi proyek perubahan dalam jangka panjang (marketing sektor publik).
- b. Pelaksanaan *focus group discussion* atau forum sejenis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga Pembina penting untuk dilakukan guna mendapatkan kesamaan persepsi (organisasi pembelajar)
- c. Aplikasi yang telah dibangun harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan perlu pengembangan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi dalam rangka monitoring dan pengambilan keputusan (kepemimpinan digital).

# 2. Kesimpulan

- a. Dengan terbitnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor17 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan terbangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN diharapkan terjadi akselerasi peningkatan kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara.
- b. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala LAN tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi maka diharapkan penilaian terhadap kinerja anggaran menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menggunakan penilaian dari Kementerian Keuangan tetapi diperkaya dengan subtansi instansi yang terdiri dari unsur perencanaan, keuangan, BMN, Barjas, dan pengawasan, sehingga pengambilan keputusan oleh pimpinan juga akan lebih baik.
- c. Dengan dibangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN diharapkan penilaian kinerja anggaran dapat lebih mudah dan transparan, dan sekaligus dapat menjadi alat monitoring bagi capaian kinerja anggaran

- d. Monitoring implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan penggunaan aplikasi Si PeKerjA LAN perlu dilakukan secara berkala melalui forumforum yang dilaksanakan (triwulanan, rapat pimpinan) maupun secara tertulis melalui nota dinas pimpinan dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.
- e. Keberlanjutan pembentukan *Community of Practises* (CoP) penting dilakukan untuk menjamin tercapainya kesamaan persepsi dan merupakan media untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dapat segera diatasi.

# 3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari implementasi proyek perubahan ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi dapat dijadikan alat monitoring dan pendorong bagi setiap unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menghasilkan kinerja anggaran secara optimal.
- b. Komitmen seluruh jajaran pimpinan dan stakeholders internal sangat diperlukan bagi keberlanjutan implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi yang dibangun.
- c. Aplikasi yang dibangun perlu dilakukan pengembangan di masa yang akan datang sesuai kebutuhan dengan dukungan pimpinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wenger, Eitenne, McDemort, Richard, dan Snyder, William. (2002). Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74)
- Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN
- Ken Jacks Waoma (2020). Mengenal Serba Serbi gaya Kepemimpinan. Finansialku.com
- Dr. Antonius Alijoyo, ERMCP, CERG. (2021). Hadapi Konteks Risiko VUCA dengan VUCA PRIME (VP). IRMAPA.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)
- Tjahyo Kumolo. (2021). Pentingnya 'Digital Leadership' dalam Transformasi Teknologi. https://www.menpan.go.id
- Erwan Agus Purwanto. (2022). Reformasi Birokrasi Akselerasi Pemerintahan Dinamis di Era VUCA. https://www.menpan.go.id
- Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. (2022). Lembaga Administrasi Negara
- Angger Dewantara. (2022). Kepemimpinan yang Adaptif dan Efektif pada Gen Y dan Z. djkn.kemenkeu.go.id

# LAMPIRAN

Lampiran 1	Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Nomor 74/S1/HKM 02.2/2022 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Lembaga Administrasi Negara
Lampiran 2	Komitmen Pendirian Community of Practises (CoP)
Lampiran 3	Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Nomor 77/S1/HKM 02.2 tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja
Lampiran 4	Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Nomor 78/S1/HKM 02.2 tentang Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja
Lampiran 5	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemebrian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Lampiran 6	Berita Acara Uji Publik dan Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara
Lampiran 7	Nota Dinas FGD Pembahasan Revisi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara tanggal 28 September 2022
Lampiran 8	Nota Dinas Undangan Pembahasan Revisi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara tanggal 5 Oktober 2022
Lampiran 9	Nota Dinas Undangan Pembahasan Revisi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara tanggal 6 Oktober 2022

Lampiran 10 Nota Dinas Undangan Pembahasan Revisi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara tanggal 31 Oktober 2022 Lampiran 11 Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No. 10 Th 2010 dan Perka LAN LAN No. 11 Tahun 2021 kepada Tim IT pihak ketiga Lampiran 12 Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No. 10 Th 2010 dan Perka LAN LAN No. 11 Tahun 2021 kepada Direktur Sistem Penganggaran Kemenkeu Lampiran 13 Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No. 10 Th 2010 dan Perka LAN LAN No. 11 Tahun 2021 kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu Lampiran 14 Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No. 10 Th 2010 dan Perka LAN LAN No. 11 Tahun 2021 kepada Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas Lampiran 15 Surat Tugas dari Kepala Biro Umum untuk menghadiri Pembahasan Revisi Perka LAN No. 10 Th 2010 dan Perka LAN LAN No. 11 Tahun 2021 Lampiran 16 Nota Dinas Undangan Pembahasan Revisi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Administrasi Negara tanggal 8 November 2022 Lampiran 17 Nota Dinas Undangan Bimtek Aplikasi Si PeKerjA LAN Lampiran 18 Nota Dinas Rakor Perencanaan dan Penganggaran LAN Tahun 2022 Lampiran 19 Form Perenyataan Dukungan dari Plt. Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara Lampiran 20 Panduan penggunaan aplikasi Lampiran 21 Nota dinas penyediaan server dan domain ke Pusdatin

## LAMPIRAN 1



## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 74 / 5.1 / HKM . 02. 2 / 2022

## TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI AKSELERASI PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan akselerasi peningkatan kinerja anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan tim efektif untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - b. bahwa pembentukan tim efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara.

#### Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

## MENETAPKAN

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI AKSELERASI PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Akselerasi

Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi

Negara yang selanjutnya disebut Tim Efektif.

KEDUA : Tim Efektif terdiri atas:

a. Tim Pengarah;b. Tim Substansi;

c. Tim Teknologi Informasi; dan

d. Tim Sekretariat.

KETIGA : Susunan nama dan jabatan dalam Tim Efektif tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rincian tugas Tim Efektif tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KELIMA : Tim Efektif mulai bekerja terhitung sejak tanggal 1 Oktober

sampai dengan tanggal 21 November 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2022

R LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA,

GA ADMINISTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan

2. Yang bersangkutan.

#### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR:
TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN STRATEGI AKSELERASI
PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

#### SUSUNAN NAMA DAN JABATAN DALAM TIM EFEKTIF

#### A. TIM PENGARAH

No	Nama	Jabatan dalam Tim Efektif
1.	Dra. Army Winarty, M.Si	Sponsor/Mentor
2.	Ir. Yusni Emilia Harahap, MM	Coach
3.	Dwi Ariany, S.Sos, M.Si	Project Leader

#### B. TIM SUBSTANSI

No	Nama	Jabatan dalam Tim Efektif
1.	Tri Atmojo Sejati, ST, SH, M.Si	Penanggung jawab
2.	Mardiana, SAP	Anggota
3.	M. Fahrurozi R. Nasution, S.Psi, MAP	Anggota
4.	Feni Damayanti, SE, MPP	Anggota
5.	Adhitya Budi Laksana, SH, LLM	Anggota
6.	M. Azka Nurul Fajri, SIP, MAP	Anggota

## C. TIM TEKNOLOGI INFORMASI

No	Nama	Jabatan dalam Tim Efektif
1.	Anak Agung Sri Astiti, S.Kom, M.Sc	Penanggung jawab
2.	Pujiatmo Subarkah, S.E.Ak., M.Sc.	Anggota
3.	Thomas Alfa Edison	Anggota
4.	Mustofa, S.Kom	Anggota

# D. TIM SEKRETARIAT

No	Nama	Jabatan dalam Tim Efektif
1.	Perwita Sari, SE, M.Ak	Penanggung jawab
2.	Agus Priyanto, SKM	Anggota
3.	Arni Manurung, ST	Anggota
4.	Widya Puspitaayu Sutisna, SE	Anggota
5.	Annisa Fathonah, A.Md	Anggota
7.	Ir. Euis Nurmalia, M.Si	Anggota
8.	Mulyadin, ST	Anggota
9.	Yuni Ariyanti, SE	Anggota
10.	Nuraeni Sayuti, SE, M.Si	Anggota
11.	Naufal Sabda Auliya, S.I.P.	Anggota

12.	Sudarmi Rawis, SE, MM	Anggota	
13.	Zulkarnain, ST, M.Si	Anggota	
14.	Windra Mariani, SH	Anggota	

SEKRETARIS UTAMA

RLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, &

NEW SUZANA

# LAMPIRAN 2

# KOMITMEN PENDIRIAN COMMUNITY OF PRACTISES (CoP)

Pada hari ini, Kamis, 10 November 2022 bertempat di Senggigi, Lombok kami yang bertandatangan di bawah ini memahami pentingnya pembentukan Community of Practises bagi Praktisi Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana untuk dapat mendukung capaian kinerja anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

CoP ini adalah milik kita Bersama

(Kurnia Anggraeni, ST)

(Ahmad Zaini, SE, ME)

(Yuni Ariyanti, SE

(Shinta Puspasari, SH, ME)

(Astriana, SE, M.Si)

(Widya Puspitaayu Sutisna, SE)

(Aning Apriastuti, SH, SE.Ak)

(Annisa Fathonah, A.Md)

Menyaksikan,

(Dra. Reni Suzana, MPPM)

(Dra. Army Winarty, M.Si)

## LAMPIRAN 3



# LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 77 / 5 · 1 / HKM · 02 · 2

#### TENTANG

## TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA TENTANG TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau

Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja yang selanjutnya

disebut Tim Penilai.

KEDUA : Susunan nama dan jabatan dalam Tim Penilai tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian terhadap Aspek Kinerja Internal;

 menyusun hasil penilaian Kinerja Unit Kerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran; dan

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau

pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian dibebankan ada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 450417 LAN

Jakarta.

KELIMA : Tim Penilai melaksanakan tugas untuk jangka waktu 3 (tiga)

tahun.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 71/5.1/HKM.02.2
TENTANG TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN
SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA

## SUSUNAN NAMA DAN JABATAN DALAM TIM PENILAI

No.	Nama	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Sekretaris Utama	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota

SEKRETARIS UTAMA

\*\*\*
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

RENI SUZANA

#### LAMPIRAN 4



## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 78/5.1/HKM.02.2

#### TENTANG

# SEKRETARIAT TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas tim penilai pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja, perlu membentuk Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja;
  - b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

- 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS

KINERJA UNIT KERJA.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Tim Penilai Pemberian

Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja

Unit Kerja yang selanjutnya disebut Sekretariat.

KEDUA : Susunan nama dan jabatan dalam Sekretariat tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat memiliki tugas membantu kelancaran

pelaksanaan tugas Tim Penilai Pemberian Penghargaan

dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan Sekretariat dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 450417

LAN Jakarta.

KELIMA : Sekretariat melaksanakan tugas untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun.

# KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022.

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, W

RENI SUZANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Inspektur;
- 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
- 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- 5. Pegawai yang bersangkutan.

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 78 / 5 . 1 · 2 / HLM · 02 · 2 TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA

#### SUSUNAN NAMA DAN JABATAN DALAM SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan dalam Sekretariat
1.	Dwi Ariany, S.Sos., M.Si.	Ketua
2.	Mardiana, S.A.P.	Sekretaris
3.	Feni Damayanti, S.E., M.P.P.	Anggota
4.	Mochammad Fahrurozi Ramdhan Nasution S.Psi., M.AP.	Anggota
5.	Widya Puspitaayu Sutisna, S.E.	Anggota
6.	Mifta Tri Hidayah, SIP.	Anggota
7.	Tri Nugrahani Novita Sari, S.I.P.	Anggota
8.	Ira Yusnita Wijayati, S.T.	Anggota
9.	Muhammad Azka Nurul Fajri, SIP., M.A.P	Anggota
10.	Agus Priyanto, S.K.M.	Anggota

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

RENI SUZANA



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

### PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022

#### TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas

Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun
     2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950):

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
- Kinerja Unit Kerja adalah prestasi kerja unit kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

- Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja anggaran LAN yang diukur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Kinerja Internal adalah capaian Kinerja Unit Kerja atas aspek yang berkaitan langsung dengan pencapaian Kinerja Anggaran-
- Evaluasi Kinerja Unit Kerja yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur Kinerja Unit Kerja sebagai bentuk akuntabilitas publik terkait pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
- Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada unit kerja pada tahun anggaran berkenaan atas Kinerja Unit Kerja tahun anggaran sebelumnya.
- Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada unit kerja pada tahun anggaran berkenaan atas Kinerja Unit Kerja periode tahun anggaran sebelumnya.
- Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan LAN setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama dan Politeknik STIA LAN.
- Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian Kinerja Unit Kerja.
- 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

 Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi dapat diberikan untuk meningkatkan Kinerja Unit Kerja.

- (2) Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja.
- (3) Evaluasi Kinerja meliputi penilaian atas unsur:
  - Kinerja Anggaran; dan
  - Kinerja Internal.
- (4) Evaluasi Kinerja paling cepat dilaksanakan pada setiap triwulan IV tahun anggaran berjalan untuk Kinerja tahun anggaran dimaksud dan paling lama pada setiap triwulan I tahun anggaran berjalan untuk Kinerja tahun anggaran sebelumnya.

- Unsur Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   ayat (3) huruf a diukur menggunakan instrumen dan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- (2) Unsur Kinerja Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diukur dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. pengelolaan Barang Milik Negara;
  - e. pengawasan internal.

#### Pasal 4

- Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai memiliki tugas:
  - melakukan penilaian terhadap Aspek Kinerja Internal;
  - menyusun hasil penilaian Kinerja Unit Kerja yang mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran;
  - c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai dasar pemberian Penghargaan dan/atau Sanksi.

- (3) Susunan anggota Tim Penilai terdiri atas:
  - ketua tim penilai;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas pejabat yang melaksanakan tugas di bidang:
  - a. perencanaan dan evaluasi;
  - b. keuangan;
  - c. pengawasan;
  - d. pengelolaan barang milik negara; dan
  - e. pengelolaan barang dan jasa.
- Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dapat dibantu oleh tim sekretariat.
- (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan capaian atas:

- a. aspek Kinerja Anggaran dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- aspek Kinerja Internal dengan bobot 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 6

- Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (scoring) dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi LAN.

#### Pasal 7

Kepala LAN menetapkan Penghargaan dan/atau Sanksi kepada Unit Kerja berdasarkan usulan Tim Penilai.

- Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. pemberian piagam/tropi penghargaan;
  - b. publikasi dalam media internal LAN; dan/atau
  - c. pemberian insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya terhitung sejak ditetapkannya hasil penilaian.
- (3) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku:
- (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direlokasi dari:
  - kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tunjangan pegawai;
  - anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.

#### Pasal 9

- Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. penyampaian teguran tertulis;
  - b. publikasi dalam media internal LAN; dan/atau
  - c. pengenaan disinsentif.
- (2) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui:
  - a. pengurangan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya;
     dan/atau
  - b. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau penghematan/refocusing anggaran.
- (3) Pengurangan alokasi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk
  gaji dan tunjangan.

(4) Penghematan/refocusing anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat mengurangi alokasi anggaran prioritas nasional.

#### Pasal 10

- Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan kepada Unit Kerja yang memperoleh penilaian tertinggi sesuai dengan sistem penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada Unit Kerja yang masuk dalam kualifikasi penilaian "kurang baik" sesuai dengan sistem penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Jumlah Unit Kerja yang diberikan penghargaan dan dikenai Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai.
- (4) Tata cara pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.
- (5) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 11

Pembiayaan Evaluasi Kinerja dibebankan pada DIPA LAN.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2022

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN
SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI

#### A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Indikator pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut berasal dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Atas dasar itu, LAN memandang perlu menyusun Peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN. Peraturan Kepala ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dengan beberapa penambahan dalam unsur penilaian internal LAN.

#### B. Tata Cara Penilaian Kinerja

1. Penilaian Aspek Kinerja Anggaran

Penilaian aspek Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja berdasarkan instrumen yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

2. Penilaian Aspek Kinerja Internal

Penilaian aspek Kinerja Internal diperoleh melalui hasil penilaian atas:

- unsur perencanaan dengan bobot, 40 % (empat puluh persen) terdiri atas aspek:
  - revisi anggaran dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Tahapan ini merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi internal. Revisi DIPA dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator Kinerja revisi anggaran. Nilai revisi anggaran dihitung berdasarkan nilai rata-rata revisi per triwulan.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) 0 3 kali revisi = 100
- b) 4 6 kali revisi = 50
- c) 7 9 kali revisi = 20
- d) >10 kali revisi = 0
- pengisian Aplikasi SMART dengan bobot 5% (lima belas persen).

Tahapan ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART.

- Penilaian ketepatan waktu dihitung dengan kriteria sebagai berikut:
  - kurang dari sampai dengan tanggal 5 setiap bulan = 100
  - (2) terlambat 1-2 hari kerja = 50
  - (3) terlambat 3 hari kerja = 20
- hasil penilaian evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja dengan bobot 15% (lima belas persen).

Tahapan ini dihitung dengan menggunakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Kerja yang dilakukan oleh Tim Penilai SAKIP yang diambil dari laporan hasil penilaian SAKIP.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) nilai evaluasi SAKIP 100 =100;
- nilai evaluasi SAKIP 80-99,99 = 75;
- nilai evaluasi SAKIP 60-79,99 = 50; dan
- d) nilai evaluasi SAKIP <60 = 25.</li>
- Kelengkapan dokumen revisi anggaran dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Tahapan ini diperoleh dari nilai rata-rata kelengkapan dokumen usulan revisi dan konsistensi rencana penarikan dana/halaman III DIPA. Usulan revisi dimaksud mencakup dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran (RPPA), dan dokumen pendukung lainnya.

- a) Penilaian kelengkapan dokumen dihitung dengan kriteria sebagai berikut:
  - lengkap (dokumen KAK, RAB, RPPA dan dokumen pendukung lainnya) = 100

= 75

- (2) kurang 1 (satu) dokumen
- (3) kurang 2 (dua) dokumen = 50
- 4) kurang 3 (tiga) dokumen = 25
- Penilaian konsistensi rencana penarikan dana/halaman
   III DIPA dihitung dengan kriteria sebagai berikut:
  - (1) deviasi 0% = 100
  - (2) deviasi 1%-10% = 75
  - (3) deviasi >10% 20% = 50
  - (4) deviasi >20% = 25
- unsur keuangan dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
  - capaian output dengan bobot 15 % (lima belas persen).
     Tahapan ini dihitung dari realisasi capaian output terhadap trajektori nasional yang dikelola oleh Unit Kerja setiap triwulan.

Penilaian capaian output dihitung dengan kriteria sebagai berikut:

- a) -5% ≤ x ≤ 5% = 100
   b) -10% ≤ x <-5% atau 5% < x ≤ 10% = 75</li>
   c) -20% ≤ x <-10% atau 10% < x ≤ 20% = 50</li>
   d) x < -20% atau x > 20% = 25
- kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan bobot 5% (lima persen).

Tahapan ini dihitung dari kesesuaian jumlah usulan TUP dengan realisasi TUP.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- c. unsur Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dengan bobot 10% (sepuluh persen) terdiri atas:
  - Penyampaian DBR yang mengalami update data mutasi barang setiap tahun dengan bobot 5% (lima persen).
     Perhitungan dengan melihat ketaatan dalam melaporkan perpindahan atau kesesuaian posisi fisik barang.
    - a) melaporkan data DBR sesuai fisik sepenuhnya (100%) = 100
    - b) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (kurang dari 25%) = 80
    - melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (25,00%- 49,99%) = 60
    - d) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (50,00% - 74,99%) = 40
    - e) melaporkan data DBR tapi tidak sesuai fisik sepenuhnya (75,00% - 99,99%)= 20
    - f) tidak melaporkan DBR = 0

 ketepatan penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP), dengan bobot 5% (lima persen).

Tahapan ini dihitung dengan ketepatan dalam penyampaian RUP dengan batas waktu penyampaian yang ditetapkan.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) tepat waktu
- = 100
- b) terlambat melaporkan = 50
- tidak melaporkan = 0
- d. unsur pengawasan dengan bobot 30 % (tiga puluh persen) terdiri atas:
  - persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal, dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rekomendasi hasil audit yang ditindak lanjuti total rekomendasi hasil audit

- = persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal
- persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKAKL, dengan bobot 8% (delapan persen)

Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rekomendasi hasil reviu RKAKL yang ditindak lanjuti total rekomendasi hasil reviu RKAKL

- persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKAKL
- ketepatan waktu penyampaian dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen)

Tahapan ini dihitung dari ketepatan waktu didasarkan pada batas waktu yang telah ditetapkan.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan :
   100
- b) terlambat melaporkan: 50
- c) tidak melaporkan : 0
- ketepatan waktu penyampaian dokumen Pemantauan Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen)

Pemantauan Manajemen Risiko dilakukan setiap triwulan oleh setiap Unit Kerja, tetapi dokumen pemantauannya disampaikan ke Inspektorat setiap semester atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tahapan ini dihitung dari ketepatan waktu penyampaian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan setiap semesternya.

Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100
- b) terlambat menyampaikan = 50
- c) tidak Menyampaikan = 0
- persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen Manajemen Risiko, dengan bobot 4% (empat persen)

Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rekomendasi hasil reviu dokumen MR yang ditindak lanjuti total rekomendasi hasil reviu dokumen MR

- = persentase tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dokumen MR
- hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI)
   Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen).

Tahapan ini dihitung dengan menggunakan hasil penjaminan kualitas MRI pada Unit Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat.

Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

 $\frac{\text{Nilai MRI unit kerja}}{\text{nilai max MRI}} \text{ } x \text{ } 100 \text{ } \% = \text{kualitas MRI}$ 

C. Tata Cara Penetapan Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi

Berdasarkan hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Tim Penilai mengusulkan Unit Kerja yang akan diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi kepada Kepala LAN. Mempertimbangkan hasil usulan tersebut, Kepala LAN menetapkan Unit Kerja yang menerima Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi.

- D. Kualifikasi Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi
  - "sangat baik" dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 100 (seratus);
  - "baik" dengan capaian nilai 75,01 (tujuh puluh lima koma nol satu) sampai dengan nilai 90,00 (sembilan puluh koma nol nol);
  - "cukup baik" dengan capaian nilai 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol); dan
  - "kurang baik" dengan capaian nilai kurang atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol nol).

#### E. Penutup

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam memberikan Penghargaan dan pengenaan Sanksi sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada Unit Kerja, dalam rangka meningkatkan Kinerja pengelolaan kegiatan.

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO



# LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### BERITA ACARA

UJI PUBLIK DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, pukul 15.00 WIB, telah diselenggarakan uji publik dan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang dilaksanakan secara tatap muka dan dihadiri oleh:

- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara, LAN;
- 2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, LAN;
- Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran IV, Kementerian Keuangan;
- Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi Internal, LAN;
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan, LAN;
- Statistisi Ahli Madya selaku Koordinator Data dan Informasi, LAN;
- Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Koordinator Hukum dan Organisasi, LAN;
- Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Bidang PMK, Kementerian Keuangan;
- Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C, Kementerian Keuangan;
- Pranata Keuangan APBN Terampil, Kementerian PPN/Bappenas; dan
- Pakar Teknologi Informasi.

Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk dapat diketahui bersama:

1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Administrasi Negara, LAN	(Dra. Army Winarti, M.Si.)
2.	Kepala Biro Hukum dan Humas, LAN	(Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
3.	Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran IV, Kementerian Keuangan	(M Irfan Suryawardana)
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi Internal, LAN	(Feni Damayanti, S.E., M.P.P.)
5.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan, LAN	(Dwi Ariany, S.Sos., M.Si)
6.	Statistisi Ahli Madya selaku Koordinator Data dan Informasi, LAN	(Pujiatmo Subankah, S.E.Ak., M.So

7.	Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Koordinator Hukum dan Organisasi, LAN	(Adhitya Budi Laksana, S.H., L.L.M.)
8.	Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Bidang PMK, Kementerian Keuangan	(Ajat Sudrajat)
9.	Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C, Kementerian Keuangan	(Digar Rou Yahya Muhammad)
10.	Pranata Keuangan APBN Terampil, Kementerian PPN/Bappenas;	(Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N.)
11.	Pakar Teknologi Informasi	(Thomas Alfa Edison)



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOTA DINAS**

Nomor: 761 | S.1.1 / 1/2 - 2.02 - 2

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 🐛

Hal : FGD Pembahasan Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun

2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga

Administrasi Negara

Tanggal: 26 September 2022

Sehubungan dengan strategi peningkatan kinerja anggaran unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti FGD Pembahasan Revisi Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang akan dilaksanakan secara blended pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 28 September 2022

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Kelas A dan B, Gedung A Lantai 1

Daring : Link zoom meeting menyusul

Untuk Satker LAN Jakarta dan Politeknik STIA LAN Jakarta agar dapat mengikuti secara luring, selain satker tersebut dapat mengikuti kegiatan ini secara daring. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Army Winarty

#### Daftar Lampiran:

- 1. Kepala Puslatbang Pemetaan Kompetensi ASN;
- 2. Kepala Puslatbang Kajian Manajemen Pemerintahan;
- 3. Kepala Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
- 4. Kepala Puslatbang Kajian Hukum Administrasi Negara;
- 5. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
- 6. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung;
- 7. Direktur Politeknik STIA LAN Makassar;
- Inspektur;
- 9. Kepala Biro SDM dan Umum;
- 10. Kepala Biro Hukum dan Humas;
- 11. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi;
- 12. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan;
- 13. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara;
- 14. Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara;
- 15. Kepala Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 16. Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- 17. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi;
- Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegarai Aparatur Sipil Negara;
- 20.Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara;
- 21. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara;
- 22. Kepala Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara;
- 23. Kepala Balai Pelatihan Bahasa.



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### NOTA DINAS

Nomor: 442/S.1.1/HKM.02.2

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Undangan Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun

2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan

Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN

Tanggal : 2 Oktober 2022

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN, yang pada pelaksanaannya terdapat aspek-aspek penilaian Unit Kerja yang memerlukan perbaikan. Terkait hal tersebut kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti rapat pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN tersebut di atas pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Oktober 2022 Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Koordinator Keuangan, Gedung C Lt.3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Army Winarty

#### Daftar Lampiran :

- 1. Hari Nugraha
- Tri Atmojo Sejati
   Dwi Ariany
- 4. Adhitya Budi Laksana
- 5. Feni Damayanti
- 6. Widya Puspitaayu Sutisna7. Nadine Amarsha8. Perwita Sari

- 9. Mardiana
- 10. Tri Nugrahani Novita Sari
- 11. Ira Yusnita Wijayati
- 12. Arni Manurung 13. Agus Priyanto
- 14. Annisa Fathonah
- 15. Khaulia Nursauma



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### NOTA DINAS

Nomor: 450/S.1.1.2/HKM.02.1

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Undangan Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun

2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan

Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN

Tanggal: 3 Oktober 2022

Menindaklanjuti rapat tanggal 5 Oktober 2022 terkait Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN, dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti lanjutan rapat pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN tersebut di atas pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2022 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Koordinator Keuangan, Gedung C Lt.3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Army Winarty

## Daftar Lampiran : 1. Hari Nugraha

- 2. Tri Atmojo Sejati
- Dwi Ariany
   Adhitya Budi Laksana
- 5. Feni Damayanti6. Widya Puspitaayu Sutisna
- 7. Nadine Amarsha8. Perwita Sari
- 9. Mardiana
- 10. Tri Nugrahani Novita Sari
- 11. Ira Yusnita Wijayati
- 12. Arni Manurung
- 13. Agus Priyanto 14. Lista Husnul Chotimah 15. Choiril Rofiah



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOTA DINAS**

Nomor: 572/S.1.1.2/HKM.02.1

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator

Keuangan

Hal : Undangan Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun

2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan

Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN

Tanggal: 28 Oktober 2022

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Luar Kantor tanggal 2-5 November 2022 terkait Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat lanjutan pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN tersebut di atas pada:

Hari / Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Koordinator Keuangan, Gedung C Lt.3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Dwi Ariany

Tembusan:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

- Daftar Lampiran:
  1. Tri Nugrahani Novita Sari;
  2. Rizkyana Zaffrindra Putri;
  3. Widya Puspitaayu;
  4. Mifta Tri Hidayah;
  5. Arni Manurung;
  6. Agus Priyanto;
  7. Pujiatmo Subarkah;
  8. Perwita Sari;
  9. Mardiana:

- 9. Mardiana; 10.Annisa Fathonah; 11.Poksi Keuangan.



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor : 6510 / 5111 / top of Jakarta,

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No.10

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja

Yth.

Sdr. Thomas Alfa Edison CV. Putra Purnama Indonesia Karawang – Jawa Barat

Sehubungan dengan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan LAN, kami bermaksud mengadakan rapat luar kantor dalam rangka pembahasan revisi peraturan Kepala LAN tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Sabtu /3 s.d. 5 November 2022

Jadwal : Terlampir

Tempat : Jakarta (akan diinformasikan lebih lanjut)

Terkait kegiatan tersebut di atas, mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber sebanyak 1 (satu) orang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Lista Husnul Chotimah no.Hp 082119887824.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

STIK INDON

Tembusan: Sekretaris Utama.

#### Jadwal Acara

#### Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN Tanggal 2 s.d. 5 November 2022

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 2 Noven	nber 2022	
10.00 – 10.30	Pembukaan dan Arahan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
10.30 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
Kamis, 3 Nove	mber 2022	
09.00 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Jumat, 4 Nove	mber 2022	
09.00 – 11.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
11.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 - 18.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Sabtu, 5 Nover	nber 2022	
09.00 – 10.30	Finalisasi	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
10.30 - 11.00	Penutupan	



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor : 6515 ( S. ) 1 ( 100.08)

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No.10

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja

Yth.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta

Sehubungan dengan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan LAN, kami bermaksud mengadakan rapat luar kantor dalam rangka pembahasan revisi peraturan Kepala LAN tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Sabtu /3 s.d. 5 November 2022

Jadwal : Terlampir

Tempat : Jakarta (akan diinformasikan lebih lanjut)

Terkait kegiatan tersebut di atas, mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber sebanyak 1 (satu) orang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Lista Husnul Chotimah no.Hp 082119887824.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: Sekretaris Utama.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

LIK INDO

#### Jadwal Acara

#### Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN Tanggal 2 s.d. 5 November 2022

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 2 Noven	nber 2022	
10.00 – 10.30	Pembukaan dan Arahan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
10.30 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
Kamis, 3 Nove	mber 2022	
09.00 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Jumat, 4 Nove	mber 2022	
09.00 – 11.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
11.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 - 18.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Sabtu, 5 Nover	nber 2022	
09.00 – 10.30	Finalisasi	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
10.30 - 11.00	Penutupan	



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website : www.lan.go.id

Nomor : 6614 / 9.1,1 / PEP.09

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : I

Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No.10

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja

Yth.

Direktur Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Jakarta

Sehubungan dengan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan LAN, kami bermaksud mengadakan rapat luar kantor dalam rangka pembahasan revisi peraturan Kepala LAN tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Sabtu /3 s.d. 5 November 2022

Jadwal : Terlampir

Tempat Jakarta (akan diinformasikan lebih lanjut)

Terkait kegiatan tersebut di atas, mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber sebanyak 1 (satu) orang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Lista Husnul Chotimah no.Hp 082119887824.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Agents Winnerton

WLIK INDONE

Tembusan: Sekretaris Utama.



#### Jadwal Acara

#### Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN Tanggal 2 s.d. 5 November 2022

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 2 Noven	nber 2022	
10.00 – 10.30	Pembukaan dan Arahan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
10.30 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
Kamis, 3 Nove	mber 2022	
09.00 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Jumat, 4 Nove	mber 2022	
09.00 – 11.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
11.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 - 18.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Sabtu, 5 Nover	nber 2022	
09.00 – 10.30	Finalisasi	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
10.30 - 11.00	Penutupan	



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3868210, Website: www.lan.go.id

Nomor : 656 / St. 1 / PEP. OT

Segera

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sifat :

Lampiran: -

Hal : Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No.10

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja

Yth. Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas Di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) tanggal 16 Agustus 2022 terkait Pembahasan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan LAN, kami bermaksud mengadakan Rapat Luar Kantor yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : - 3 s.d. 5 November 2022 (narasumber)

2 s.d. 5 November 2022 (peserta)

Jadwal : Terlampir

Tempat : Jakarta (akan diinformasikan lebih lanjut)

Terkait kegiatan tersebut di atas, mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber sebanyak 1 (satu) orang untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dimaksud dan 1 (satu) orang sebagai peserta kegiatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Lista Husnul Chotimah no.Hp 082119887824.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan

dan Keuangan,

my Winarty

Tembusan:

Sekretaris Utama.



#### Jadwal Acara

#### Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN Tanggal 2 s.d. 5 November 2022

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 2 Noven	nber 2022	
10.00 – 10.30	Pembukaan dan Arahan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
10.30 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan peserta dari Bappenas
Kamis, 3 Nove	mber 2022	
09.00 – 12.00	Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 – 18.00	Lanjutan Pembahasan Pedoman Pengelolaan Keuangan	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Jumat, 4 Nove	mber 2022	
09.00 – 11.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
11.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit PA, DSP, dan Bappenas
15.00 - 16.00	ISHOMA	
16.00 - 18.00	Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
Sabtu, 5 Nover	nber 2022	
09.00 – 10.30	Finalisasi	Tim LAN dan Narasumber dari Dit.PA, DSP, dan Bappenas
10.30 - 11.00	Penutupan	



#### KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310 Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374 www.bappenas.go.id

#### SURAT TUGAS NOMOR 2028/B.05/HK.03/11/2022

Sehubungan dengan surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor: 6516/S.1.1/PEP.07 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Permohonan Narasumber Pembahasan Revisi Perka LAN No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja, dengan ini kami menugaskan kepada:

(Nama, NIP, Golongan dan Jabatan terlampir)

Untuk

: Menghadiri/mengikuti kegiatan rapat pembahasan revisi Perka LAN No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Perka LAN No.11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Jakarta pada tanggal 02 s.d.05 November 2022.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 01 November 2022

epola Biro Umum,

NIP 19691003 199603 1 003

Lampiran Surat Tugas:
Nomor : 2028/B.05/HK.03/11/2022
Tanggal : 01 November 2022

#### DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	Raden Achmad Yusuf	199712172018121002	Ш	Pranata Keuangan APBN
				Tingkat Trampil
2	Julian Setiawan	199707272018121003	П	Pranata Keuangan APBN
				Tingkat Trampil

Kepala Biro Umum, 🎉

Oktorika

NIP 19691003 199603 1 003



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOTA DINAS**

Nomor: 586/S.1.1.2/HKM.02.1

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator

Keuangan

Hal : Undangan Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun

2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan

Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN

Tanggal: 7 November 2022

Menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Luar Kantor tanggal 2-5 November 2022 terkait Pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN No.11 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan LAN, dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti lanjutan rapat pembahasan revisi Peraturan Kepala LAN tersebut di atas pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 8 November 2022 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Koordinator Keuangan, Gedung C Lt.3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Dwi Ariany

Tembusan:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

- Daftar Lampiran : 1. Rizkyana Zaffrindra Putri; 2. Widya Puspitaayu; 3. Mifta Tri Hidayah;

- 4. Aning Apriastuti;5. Arni Manurung;6. Agus Priyanto;7. Perwita Sari;

- 8. Mardiana; 9. Choiril Rofiah;
- 10. Annisa Fathonah;
- 11. Ferlianti Ratna J.



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOTA DINAS**

Nomor: 609/S.1.1.2/RTB.01.3

Yth. : Daftar Terlampir

Dari : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator

Keuangan

Hal : Undangan Bimtek Aplikasi Sipekerja

Tanggal : 15 November 2022

Menindaklanjuti rapat tanggal 8 November 2022 terkait teknis penilaian kinerja Unit Kerja, dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk mengikuti bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipekerja yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 November 2022 Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai Tempat : Gedung B Lt.6

Jl. Veteran No. 10

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Dwi Ariany

Tembusan:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

#### Daftar Lampiran:

- 1. Adhitya Budi Laksana;
- 2. Rizkyana Zaffrindra Putri;
- 3. Feni Damayanti;
- 4. Widya Puspitaayu;
- 5. Mifta Tri Hidayah;
- 6. Aning Apriastuti;
- 7. Tri Nugrahani Novita Sari;
- 8. Ira Yusnita Wijayati;
- 9. Muhammad Azka Nurul Fajri;
- 10. Arni Manurung;
- 11. Agus Priyanto;
- 12. Pujiatmo Subarkah;
- 13.Irman Nurjaman;
- 14. Perwita Sari;
- 15. Mardiana;
- 16. Choiril Rofiah;
- 17. Annisa Fathonah;
- 18. Ferlianti Ratna J;
- 19.Tim IT.



#### **NOTA DINAS**

Nomor: 4177 /S-1 / PEP-06

Yth : Daftar Nama Terlampir Dari : Sekretaris Utama & Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rakor Perencanaan dan Penganggaran LAN Tahun 2022

Tanggal : 2 November 2022

Sebagai upaya untuk melakukan pembinaan perencanaan dan penganggaran di lingkungan LAN, Sekretariat Utama cq. Biro Perencanaan dan Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan Rakor Perencanaan dan Penganggaran bagi Perencana dan Analis Anggaran di seluruh Satker/Unit Kerja LAN pada:

Hari/Tanggal: Rabu - Jum'at, 9 - 11 November 2022

Waktu : Sesuai jadwal

Tempat : Aruna Senggigi Resort & Convention

Jl. Raya Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat - NTB

Sehubungan dengan itu, mohon perkenan Saudara dapat memberikan ijin kepada Pejabat Fungsional Perencana dan Analis Anggaran di unit kerja Saudara maksimal 3 (tiga) orang untuk mengikuti rakor dimaksud.

Adapun biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi perjalanan dinas peserta dari Satker daerah, ditanggung oleh Satker masing-masing. Untuk konfirmasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi **Sdri. Widya Puspitaayu [HP. 081215097444]**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Reni Suzana

Tembusan: Kepala LAN

#### Lampiran I.

- Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN);
- Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP);
- Kepala Pusat Peltihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD));
- 4. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (**Puslatbang KHAN**);
- 5. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
- 6. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung;
- 7. Direktur Politeknik STIA LAN Makasar.

#### Lampiran II

# JADWAL RAKOR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAN 9 - 11 November 2022

TT1 //D1	A d .	W-4			
Hari/Tanggal	Agenda	Keterangan			
	Rabu, 9 November 2022				
16.00	<ul> <li>Keberangkatan dari kedudukan</li> </ul>				
	masing-masing peserta				
	<ul> <li>Diperkirakan Tiba di Hotel – Cek in</li> </ul>				
	Kamis, 10 November 2022				
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia			
09.00 - 09.30	Pembukaan dan Arahan	Kepala LAN			
09.30 - 10.00	Overview Pelaksanaan Anggaran	Sestama/Kepala Biro			
	Kegiatan LAN	Renaku			
10.00 - 10.15	Coffee Break	Panitia			
10.15 - 12.00	Strategi Pelaksanaan Rencana Kerja	DJA – Kemenkeu			
	Anggaran TA. 2023				
12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia			
13.00 - 15.00	Kebijakan Perencanaan dan	Dit. Apneg – Kemen.			
	Penganggaran Bidang Aparatur Negara	PPN/Bappenas			
	TA. 2024	DJA – Kemenkeu			
15.00 - 15.15	Coffee Break	Panitia			
15.15 - 17.00	Diseminasi Perkalan Nomor 17	Koordinator			
	Tahun 2022	Keuangan			
	<ul> <li>Soft Launching Aplikasi Si Pekerja</li> </ul>				
	LAN				
	Pembentukan CoP				
17.00	Istirahat				
	Jum'at, 11 November 2022				
09.00 - 10.00	Penyampaian Hasil Rakor Perencanaan	Bagian RenevRB			
	dan Penganggaran				
10.00 - 10.30	Penutupan	Kepala Biro Renaku			
	Cek Out	Kembali ke Jakarta			

#### FORM PERNYATAAN DUKUNGAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XX TAHUN 2022

Yang	bertandatangan	di	bawah	ini:
------	----------------	----	-------	------

Nama

: Mahyu, S. Kom, MAP : Plt. Kepula Bireo Keuangan. : Badan Kepegawaian Negara. Jabatan

Instansi

Melalui Proyek Perubahan yang diimplementasikan oleh:

Nama : Dwi Ariany

: Lembaga Administrasi Negara Instansi

Judul : Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga

Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya

Atas inovasi Proyek Perubahan dari Saudara Dwi Ariany, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koordinator Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan judul "Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi Negara."

Saya sangat myapren an portek perulahan pang sei gagas orch ibu DWS "newland pergelasan dan premu Kan ata proper pang di Kariekan, paya yakin akan Memberikan dampak yeary postif under to mening hather kings Anggaran untik Jengka penelek dan pangang laining, k monsaya paguyuban LAN
Jakarta, November 2022 Yang membuat pernyataan, wange, skon, map.

### PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI REWARD AND PUNISHMENT

Si PeKerjA LAN



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2022

#### KATA PENGANTAR

Buku panduan penggunaan aplikasi Si PeKerjA. LAN ini dibuat untuk mempermudah dalam mengoperasikan aplikasi untuk pengisian, pengolahan, dan penyajian informasi sapaian kinerja anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Penyajian panduan penggunaan aplikasi ini dibagi atas beberapa menu yang masing-masing menjelaskan isi dari setiap bagian dalam aplikasi.

Semoga Aplikasi Si Pekeri A LAN dan dan buku panduan penggunaan aplikasi ini dapat bermanfaat sebagai media dalam percepatan pencapaian kineria anggaran dan menjadi, salah satu bentuk keterbukaan informasi publik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Jakarta, November 2022

#### **DAFTAR ISI**

Deskripsi Aplikasi	4
Mengakses Aplikasi	5
Dashboard	6
Rincian Dashboard	6
Tabel Penilaian	8
Mengakses Menu Penilaian	8
Mengisi Nilai Unit	10
Mengisi Nilai Unit Pertriwulan	12
Export Excel Total Nilai	14
Export Excel Tabel Penilaian	14
Rincian Penilaian	15
Detail Rincian Penilaian	15
PENUTUP	16

#### Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses genilajan. Unit Kerja, Aplikasi ini merupakan berbasis website yang dapat diakses secara online dari manapun selama pengguna memiliki jaringan internet,

Aplikasi, Si PekeriA LAN ini, bertujuan untuk memudahkan proses penilajan, yang dilakukan terhadan, capajan, kinerja, anggaran, unit kerja, Terdanat beberana fitur antara lain: Jabel Penilajan Unit Kerja, Bincjan Penilajan, dan Ganti Password.

#### Mengakses Aplikasi

Berikut ini tahapan untuk mengakses aplikasi:

- 1. Pastikan Pc/Komputer anda memiliki koneksi internet.
- Pada komputer, buka perambah internet (browser internet) seperti Mozilla
  Firefox, Google, Chrome, Opera, Internet Explorer. Pada gambar di bawah ini kita
  memilih Mozilla Firefox Sebagai perambah yang akan digunakan, lalu pada
  kolom url ketik link berikut: <a href="https://sipekerja.lan.go.id">https://sipekerja.lan.go.id</a>
- 3. Berikut adalah tampilan awal aplikasi



#### Dashboard

#### Rincian Dashboard

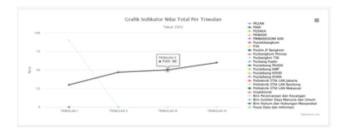
Pada halaman dashboard, terdapat grafik peringkat nilai dari hasil penilaian semua unit, tabel peringkat tertinggi dan terendah\_seperti pada gambar dibawah ini



Pada grafik peringkat unit terdapat beberapa warna, antara lain:

- Hijau: Nilai capajan Sangat Baik
- Biru: Nilai capajan Baik
- Kuning : Nilai capajan Cukup Baik
- Merah : Nilai capaian Kurang Baik

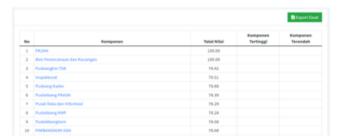
Terdapat juga grafik indikator nilai pertriwulan, seperti yang di tunjukkan pada gambar di bawah ini



Pada halaman bawah grafik indikator nilai per-triwulan terdanat tabal Kelompok Unit, seperti yang di tunjukkan pada gambar di bawah ini



Pada <u>halaman bawah</u> dashboard <u>terdapat tabel komponen beserta</u> total nilai, seperti yang di <u>tunjukkan</u> pada <u>gambar</u> di <u>bawah ini</u>

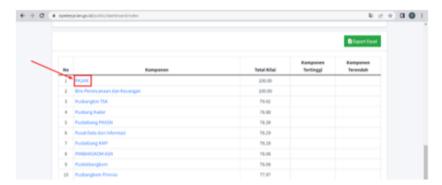


#### Tabel Penilaian

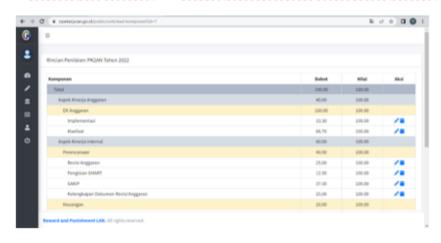
#### Mengakses Menu Penilajan

Pengguna dapat mengakses meu penilajan seperti pada tahan berikut

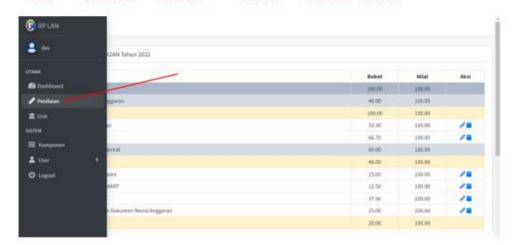
1. Pada halaman dashboard, pengguna harus memilih unit terlebih dahulu, seperti pada
gambar di bawah



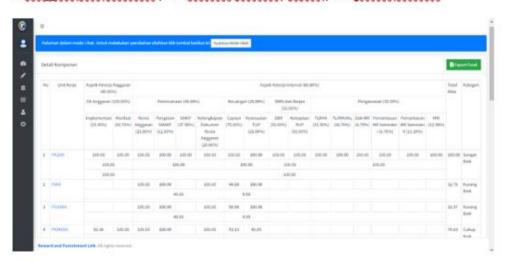
2. Pengguna akan diarahkan pada halaman rincian komponen seperti gambar dibawah.



3. Klik menu penilajan pada sisi kiri website seperti pada gambar di bawah



4. Pengguna akan diarahkan pada halaman penilaian, seperti pada gambar dibawah



#### Mengisi Nilai Unit

Hal pertama yang barus dilakukan untuk mengisi nilai pada tabel penilaian ini adalah dengan cara meng-aktifkan atau menyalakan mode ubah pada tombol di atas tabel. Berikut ini tabapan untuk menambahkan nilai-nilai komponen.

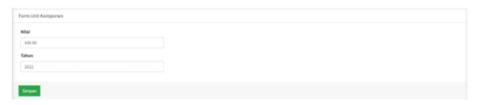
1. Klik tombol "Nyalakan Mode Ubah" agar halaman dapat di edit atau ubah.



2. Setelah di <u>klik tampilan tabel akan muncul beberapa</u> icon <u>seperti</u> yang <u>ditunjukkan</u> pada gambar di <u>bawah ini</u>



- 3. Klik Icon atau symbol "Pensil" pada bagian bawah nilai untuk menuju halaman pengisian nilai komponen
- 4. <u>Pengguna akan dialihkan pada halaman pengisian nilai seperti yang ditunjukan pada gambar dibawah ini.</u>



- 5. Klik tombol "Simpan" pada bagian bawah halaman untuk memproses perubahan nilai komponen
- 6. Pengguna akan dialihkan kembali pada halaman tabel penilaian dengan nilai yang sudah berubah seperti yang ditunjukan pada gambar dibawah ini :



#### Mengisi Nilai Unit Pertriwulan

Setelah mengisi nilai komponen, langkah selanjutnya adalah mengisi nilai komponen pertriwulan. Berikut ini tahapan untuk mengisi nilai komponen dari suatu Unit Keria.:

Klik symbol atau icon kotak pada bawah nilai dari komponen untuk menuju halaman yang menampilkan rincian komponen tersebut.



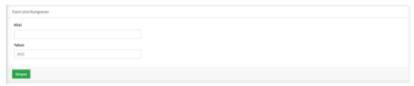
2. Pengguna akan di arahkan pada halaman detail atau rincian unit komponen sesuai dengan komponen yang di pilih pengguna, untuk menambahkan pilai komponen pertriwulan seperti yang di tunjukkan gambar berikut:



3. Klik icon "Pensil" untuk menuju halaman pengisian nilai komponen pertrivulan



Pengguna akan dialihkan pada balaman pengisian nilai kemponen pertriwulan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini\_

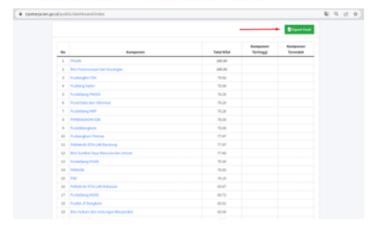


- Klik tombol "Simpan" pada bagian bawah balaman untuk memproses penambahan nilai komponen pertriwulan.
- 5. Pengguna akan dialihkan kembali pada balaman rincian unit komponen dengan pilai yang sudah di tambahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah inj:



#### Export Excel Total Nilai

Pengguna dapat meng-export excel total nilai keseluruhan, dengan cara menuju menu dashboard dan mengklik tombol "Export <u>Excel"</u> yang berada di pojok kanan atas table nilai total komponen seperti pada contoh gambar di bawah:



#### Export Excel Tabel Penilaian

Rengguna, juga dapat meng-export excel table unit komponen yang terdapat pada menu penilaian, dengan cara mengklik tombol "Export Excel." yang berada di pojok kanan atas, table unit komponen seperti contoh pada gambar di bawah:

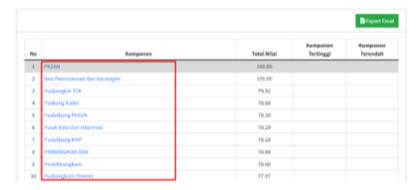


#### Rincian Penilaian

#### Detail Rincian Penilaian

Pengguna dapat melihat detai rincian penilaian yang terdapat pada halaman dashboard, Pada fiturini pengguna dapat melakukan hal yang sama seperti pada tabel penilaian unit, yaitu menambah nilai unit. Berikut ini tahanan untuk melihat detail rincian penilaian.

1. Pilih dan klik unit untuk melihat rincian penilaian berdasarkan komponen yang di pilih



2. Pengguna akan dialihkan pada halaman rincian penilaian unit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini



#### **PENUTUP**

Panduan Aplikasi, Si PeKeriA LAN ini disusun agar user dapat mengoperasikan aplikasi. Si PeKeriA LAN secara, lebih mudah.

Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dalam Pengisian Detail Nilai

Komponen. Panduan ini akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan pada saat aplikasi ini dibangun.



#### **NOTA DINAS**

Nomor: 955/5.1.1 /HMI-01

Yth. : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 4

Hal : Penyediaan server dan domain

Tanggal : 21 November 2022

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi sipekerja yaitu aplikasi terkait dengan reward and punishment di lingkungan LAN. Aplikasi ini merupakan terobosan baru untuk memotret capaian kinerja anggaran dengan melihat indikator penilaian dari Kementerian Keuangan dan diperkaya dengan indikator penilaian internal dari sektor keuangan, perencanaan, pengawasan, barjas dan BMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dibantu dalam penyiapan server untuk kebutuhan sistem tersebut dengan bahasa pemrograman php 7.4, Database MySQL serta alamat domain kedinasan yaitu sipekerja.lan.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Army Winorty



NOTA DINAS
Nomor: \$38/\$.1.1 / HMI. 01

Yth. : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dari

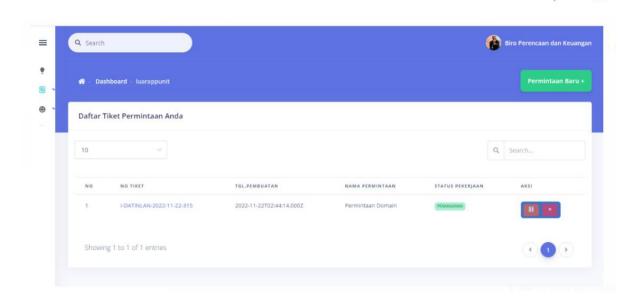
Hal : Permohonan Penyediaan Anggaran untuk Pengembangan Aplikasi

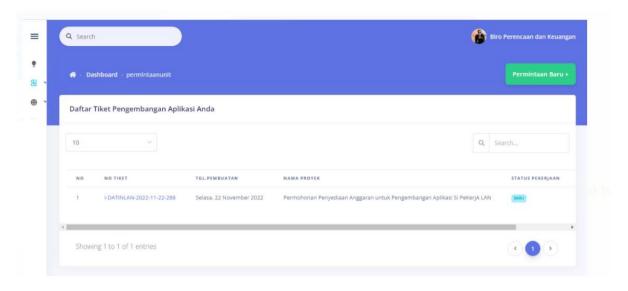
Si PeKerjA LAN

Tanggal : 22 November 2022

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi Si PeKerjA yaitu aplikasi terkait dengan reward and punishment di lingkungan LAN. Aplikasi ini merupakan terobosan baru untuk memotret capaian kinerja anggaran dengan melihat indikator penilaian dari Kementerian Keuangan dan diperkaya dengan indikator penilaian internal dari sektor keuangan, perencanaan, pengawasan, barjas dan BMN. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat dialokasi anggaran untuk pengembangan aplikasi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.







## LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

# STRATEGI AKSELERASI PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

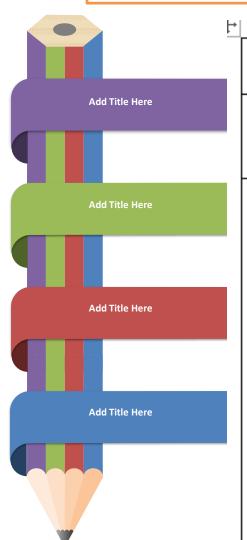
### DWI ARIANY NDH 16

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XX KEMENTERIAN PERTANIAN 2 AGUSTUS – 24 NOVEMBER 2022





# Rekomendasi dan Tindak Lanjut Masukan atas Seminar Rencana Proyek Perubahan



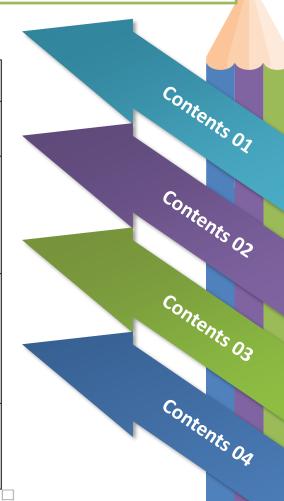
No	Masukan	Tindak Lanjut Masukan
1.	Latar belakang diperkaya dengan VUCA dan SPBE	Sudah ditambahkan terkait VUCA dan SPBE pada latar belakang
2.	Perlu ditambahkan Peta kondisi sebelum dan sesudah ada Peraturan Kepala LAN	Diharapkan penilaian terhadap kinerja anggaran menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menggunakan penilaian dari Kementerian Keuangan tetapi diperkaya dengan subtansi instansi yang terdiri dari unsur perencanaan, keuangan, BMN, Barjas, dan pengawasan. Dengan berbagai aspek tersebut maka pengambilan keputusan oleh pimpinan juga akan lebih baik karena melihat dari berbagai aspek dengan beberapa penyesuaian pada pasal





# Rekomendasi dan Tindak Lanjut Masukan atas Seminar Rencana Proyek Perubahan

No	Masukan	Tindak Lanjut Masukan
		maupun lampiran pada Peraturan Kepala LAN
3.	Stakeholder internal ditambahkan dengan para pejabat fungsional terkait dengan proper	Sudah ditambahkan pejabat fungsional Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana
4.	Stakehoder eksternal untuk apathetic sebaiknya berani menentukan instansi mana saja yang akan dituju dan unitnya	Telah ditentukan instansi untuk stakeholders eksternal untuk apathetic, yaitu Deputi Polhukhankam, Deputi Sistem Informasi BKN, Kepala Biro Keuangan BKN, Sesmen Bappenas
5.	Perlu dijelaskan apa yang kurang dari nilai kinerja anggaran LAN	Akan ditambahkan penjelasan tentang nilai yang kurang dari kinerja anggaran LAN





# PROYEK PERUBAHAN





PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN











3

PENUTUP





# PENDAHULUAN







"Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan *World Class Government* 

### **Untuk Mendukung**

Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan (pasal 13 PerLAN no. 8 Tahun 2020)

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran, serta pemberian dukungan administrasi keuangan.

Nomor	Rumusan Misi		
Misi 1	Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.		
Misi 2	Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis <i>evidence</i> dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten		
Misi 3  Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas mengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan bulinovasi  Misi 4  Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik			

- Pengelolaan dan koordinasi penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran;
- 2. pemantauan, evaluasi, pelaporan atas rencana kinerja, program dan anggaran di lingkungan LAN;
- 3. pengelolaan dan koordinasi reformasi birokrasi internal; dan
- \_4. pengelolaan keuangan.



# LATAR BELAKANG





Perolehan penghargaan atas kinerja anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan



Penyusunan kebijakan tentang reward and punishment



N pa

Pembangunan Aplikasi Si PeKerjA LAN

Pembentukan CoP

Strategi Akselerasi Peningkatan Kinerja Anggaran Lembaga Administrasi Negara





### TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Perencanaan Proyek Perubahan

Sept 2022

- ☐ Membentuk Tim Efektif
- ☐ Konsolidasi Provek Perubahan kepada Tim Efektif

Jangka Menengah

Des 2022 - April 2023

- ☐ Pembentukan CoP
- Pengembangan aolikasi









#### **Jangka** Panjang

#### Jangka Pendek

- Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi
- ☐ Penyusunan rancangan Peraturan Kepala LAN dan rancangan aplikasi
- ☐ Pembahasan rancangan Peraturan Kepala LAN dan rancangan aplikasi

### Okt - Nov 2022

- Uji Publik rancangan Peraturan Kepala LAN dan rancangan aplikasi
- ☐ Pengesahan rancangan Peraturan Kepala LAN dan finalisasi aplikasi
- ☐ Sosialisasi Peraturan Kepala LAN dan aplikasi
- Bimtek penggunaan aplikasi
- Inisiasi pembentukan CoP
- ☐ Penyebarluasan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi
- ☐ Implementasi Peraturan Kepala LAN dan penggunaan aplikasi

#### Mulai April 2023

- ☐ Money Pelaksanaan Peraturan Kepala LAN dan aplikasi
- Pengembangan aolikasi









Kegiatan baru pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang

Jangka Pendek



Inisiasi dan komitmen bersama pembentukan Community of Practises (CoP)



Bimtek penggunaan aplikasi

Jangka Menengah



Pembentukan Community of Practises (CoP)



Pengembangan aplikasi

Jangka Panjang



Pengembangan aplikasi





PERUBAHAN TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN



Perpindahan kegiatan dari jangka menengah ke jangka pendek



penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi serta pembuatan branding atas aplikasi yang dibangun



implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan penggunaan aplikasi



# IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

٦

Terbitnya Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGAR REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU
PENGENAAN SANKSI ATAS KINERJA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

### **CAPAIAN JANGKA PENDEK**

Keterlibatan stakeholders dalam penyusunan Peraturan Kepala LAN



Tim Efektif

Seluruh unit kerja dan satuan kerja

> Kementerian Keuangan dan Bappenas

Mencabut Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun 2021

















anggaran sebelumnya.  dimaksud dan paling lama pada setiap triwulan I tahun anggaran berjalan untuk Kinerja tahun anggaran sebelumnya.  Pasal 3  (1) Unsur Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diukur menggunakan instrumen dan mekanisme yang dietapkan Kementerian Keuangan. (2) Unsur Kinerja Internal sebagaimana	No	Sebelum		Sesuda	h	
a settap trivutan IV tahun anggaran berjalan untuk Kimerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diukuw menggunakan instrumen dan Kementerian Keuangan.  2 Tidak ada sebelumnya  Tidak ada sebelumnya  Tidak ada sebelumnya  Pasal 3 ayat (2)  Tim Penilai memiliki tugas:  a. perencanaan; b. keuangan; c. pengadaan barang dan jasa; dan dimaksud pada ayat (2)  Tim Penilai memiliki tugas: a. melakukan penilaian tendada appek Kinerja Internal sebagaiman dengan aspek-aspek yang menjadi cakupan penilaian dan b. mengusukan kepada Kepala LAN hadi penilaina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusukan kepada Kepala LAN hadi penilaina sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tugas:  a. penganan apenilaina Kinerja Unit Keman sebagai dan penilaina kepada kapana dan kepada Kepala LAN hasi dietapkan oleh Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tugas tuga dan dan kapak Kinerja Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan tugas tuga dan dan kapak kinerja fan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (6)  Tidak ada sebelumnya  Tidak ada sebelumnya  Pemberian mendika tugas:  a. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi naggaras untuksi penganana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi naggaras dan bengamana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi naggaras dan dan dan dan dan dan dan dan dapat mengurangi						
berjalan untuk Kinerja tahun anggaran dana hadi dan paling lahan anggaran dana hadi dan paling lahan pada setiap trivulan i tahun anggaran berjalan untuk Kinerja dan pada setiap trivulan i tahun anggaran berjalan untuk Kinerja anggaran berjalan untuk Kinerja anggaran berjalan untuk Kinerja dan pada setiap trivulan i tahun anggaran berjalan untuk Kinerja dan dana kakud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diukur menggunakan instrumen dan mekanisma yang dietapkan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diukur dengan mempertimbangkan aspek.  2				Evaluasi Kinerja paling o pada setiap triwulan IV t	epat dilaksanakan shun anggaran	
trivulan I tahun anggaran berjalan untuk Kinerja Itahun anggaran sebelumnya  (1) Unsur Kimerja interna sebelumnya  2 Tidak ada sebelumnya  2 Tidak ada sebelumnya  (2) Unsur Kimerja interna Sewana mekanisme yang disetapkan Kementerian Keuangan. (3) Unsur Kimerja interna Jayat (3) huruf bidukur dengan mempertimbangkan aspek Kemerja Anggaran dan dengan aspek Kimerja Internal sewat dengan aspek Kimerja Anggaran dan aspek Kimerja Anggaran dan aspek Kimerja Anggaran dan aspek Kimerja Anggaran dan dengan aspek kimerja Anggaran dan dengan aspek sapek yang menjadi cakupan pemlatar, dan bidak pemlaian sebagainan dimakan dalam dan	<ol> <li>berjalan untu</li> </ol>	k Kinerja tah	un	berjalan untuk Kinerja ta	hun anggaran	
Tidak ada sebelumnya	anggaran seb	elumnya.				
(1) Unsur Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diukur menggunakan instrumen dan Kementerian Keungan. (2) Unsur Kinerja Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diukur dengan mempertimbangkan appus. (3) Leuangan. (4) Leuangan. (5) Leuangan. (6) Leuangan. (7) Leuangan. (8) Leuangan. (9) Leuangan. (10) Leuangan. (11) Leuangan. (12) Leuangan. (13) Leuangan. (14) Leuangan. (15) Leuangan. (16) Leuangan. (17) Leuangan. (18) Leuangan. (18) Leuangan. (18) Leuangan. (18) Leuangan. (19) Leuangan. (19) Leuangan. (20) Leuangan. (21) Leuangan. (22) Leuangan. (23) Leuangan. (24) Leuangan. (25) Leuangan. (26) Leuangan. (27) Leuangan. (28) Leuangan. (29) Leuangan. (29) Leuangan. (20) Leuangan. (20) Leuangan. (21) Leuangan. (22) Leuangan. (23) Leuangan. (24) Leuangan. (25) Leuangan. (26) Leuangan. (27) Leuangan. (28) Leuangan. (29) Leuangan. (29) Leuangan. (20) Leuangan. (20) Leuangan. (20) Leuangan. (21) Leuangan. (22) Leuangan. (23) Leuangan. (24) Leuangan. (25) Leuangan. (26) Leuangan. (27) Leuangan. (28) Leuangan. (29) Leuangan. (29) Leuangan. (20) Leuangan. (21) Leuangan. (22) Leuangan. (23) Leuangan. (24) Leuangan. (25) Leuangan. (26) Leuangan. (27) Leuangan. (28) Leuangan. (28) Leuangan. (29) Leuangan. (20) Leuangan. (21) Leuangan. (22) Leuangan. (23) Leuangan. (24) Leuangan. (25) Leuangan. (26) Leuangan. (27) Leuangan. (28) Leuangan. (28) Leuangan. (29) Leuangan. (29) Leuangan. (20) Leuangan. (20				Kinerja tahun anggaran s	ebelumnya.	
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diukuur menggunakan mistrumen dan mekanisme yang dietapkan (2) Unuruf kinerja Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diukur dengan mempertimbangkan aspek. aspek aspek pang dengan apak kinerja Anggaran dan di pengelolaan Barang Milik Negara; e pengadaan barang dan jasa; dan di penglolaan Barang Milik Negara; e pengadaan barang dan jasa; dan di penglolaan Barang Milik Negara; e pengadaan barang dan jasa; dan di penglolaan Barang Milik Negara; e pengangan dan dan di penglolaan Barang Milik Negara; e pengangan dan dan di penglolaan Barang Milik Negara; e pengangan dan dan di penglolaan Barang Milik Negara; dengan aspek aspek yang mempertimbangkan hasil penulaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran; dan b. mengusulkan kepada Kepala LAN hasil penulaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran; dan				(1) Unsur Kineria Angga	ran sebagaimana	
mekanisme yang ditetapkan Kementerian Keunagan. (2) Unsur Kinerja Internal sebagaimana b dinukur denga mempertimbangkan aspek: a. perencanana; b. keuangan; c. pengadaan barang dan jasa; dan dengan aspek-sapek yang menjadi cakupan penilaian; dan huruf dan Aspek Kinerja Anggaran dan danak penilaian sebagaimana danak kepala LAN hasi  Panal 4 ayat (2) dan (3)  (3) Dalam melakaanakan tuga Tim Penilai dapat dibantu oleh tim sekretariat.  Panal 4 ayat (3) dan (4)  (5) Dalam melakaanakan tuga Tim Penilai dapat dibantu oleh tim sekretariat, ditetapkan oleh tim sekretariat, ditetapkan oleh tim sekretariat, ditetapkan oleh tim sekretariat, ditetapkan pangaran ditetapkan pangaran ditetapkan pangaran ditetapkan pangaran ditetapkan nelalu pangaran ditetapkan pangaran tahun berikutnya  Panal 8 ayat (3) dan (4)  (3) Penambahan alokasi pagu angaran dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menguranga alokasi pagu sebagamana dimaksud pada menperoleh sanksi.  Panal 8 ayat (3) dan dayat (3) Pengurangan alokasi pagu angaran dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menguranga alokasi pagu-sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menguranga alokasi pagu-sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menguranga alokasi pagu-sebagamana dimaksud pada menperoleh sanksi.  Panal 8 ayat (3) dan dayat (3) Pengurangan alokasi pagu-sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menguranga alokasi pagu-sebagamana dimaksud pada menguranga alokasi pagu-sebagama				dimaksud dalam Pasa	1 2 ayat (3) huruf	
C. Tidak ada sebelumnya  C. Unsur Kinerja Internal sebagaimana dimakeud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf apan dengan mempertumbangkan apan dengan sepek-aspek yang menjadi cakupan penilaian dan berakutan b						
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diukur dengan mempertimbangkan aspek. aspek. aspek. aspek. b. keuangan; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. penglolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. penglolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. penglolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. penglakukan pendiaian terhadap Aspek Kinerja Anggaran dan jasah penglolaan barang diink Negara;  Pemberan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan ungas Tim Penulai dapat dibantu oleh tun sekretariat.  Pemberan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penglolaan barang menglolaan barang maksud pada ayat (2) huruf a dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksud pada ayat (2) dan dimaksud pada ayat (2) dan dan dimaksud pada ayat (2) dan dan dimaksud pada ayat (2) dan dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat ayat (2) huruf a tidak dapat ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokas naggaran dan angaras bengamang dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan barang dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan barang dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan barang dan dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan barang dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan barang dan dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan dan dan dan dan dapat mengurangi alokas naggaran dan dan dan dan dan dan dan dan dan d				Kementerian Keuang	an.	
b diukur dengan mempertimbangkan aspek: a. perencanani. c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; e. pengawasan internal.  Pasal 3 ayat (2)  Tim Penilaunenuha supas: a. melakukuan penilaisan terhadap aspek Kinerja Anggaran dan aapek Kinerja Anggaran dan berikutan penilaian sebagainan dan hapek Kinerja Anggaran, dan dan dan hapek Kinerja Anggaran, dara dan Aspek Kinerja Anggaran dara dan Aspek Kinerja Anggaran, disa dan dalam berikutan bana dalam berikutan penilaisan disa dan pangaran tahun berikutnya.  Pemberian insentif sebagainana dimaksud pada ayat (2) disa (4)  Penambahan alokasi sebagainana dimaksud pada ayat (2) disakukan dara dimaksud pada ayat (2) disakukan dara dimaksud pada ayat (2) disakukan dara dan Aspek Kinerja India dan dan dimaksud pada ayat (2) dipari dalak dapat utuki: a. gaji dan tunjangan; berikutnya dan dan dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat utuki: a. gaji dan tunjangan pepakan anggarar dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat utuki: a. gaji dan tunjangan; berikutnya dan dan dan dan dan dan dan dan dan da	2 Tidak	ada sebelum	nva	(2) Unsur Kinerja Interna dimaksud dalam Pasa	d sebagaimana 1.2 avat (3) huruf	
a. perencanaan; b. keuangan; c. pengadaan barang dan jaax; dan c. pengadaan barang dan jaax; dan c. pengadaan barang dan jaax; dan c. pengawasan internal c. pengawasan dan/atau Sanksi.  Pasal 4 ayat (2) dan (6) (5) Dalam melakwasan dalam dan/atau Sanksi.  Pasal 4 ayat (3) dan (6) (5) Dalam melakwasan dalam direkawa melakwasan dan direkawa melakwasan pengalelahan baragaman direkawan pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang dan pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang melakwasan pengelolahan barang Milih Vegara; pengelolahan barang Milih Vegara direkokan dari.  a. pengelolahan barang Milih Vegarang direkamanand direkamanananananananananananananananananana				b diukur dengan men		
B. keuangan; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengelolaan Barang Milik Negara; c. pengadaan barang dan jasa; dan d. pengadaan parang dan jasa; dan dan jasa; dan jasa; dan d. pengalaan jasa; dan d. pengadaan jasa; dan dan jasa; dan d. pengadaan jasa; dan dan jasa; dan dan jasa; dan d. pengadaan jasa; dan dan dan jasa; dan jasa; dan jasa; dan dan jasa; dan jasa; dan jasa; dan dan jasa; d						
d. pengalolaan Barang Milik Negara; c. pengawasan intermal. Pasal 3 ayat (2)  Tim Penilai memiliki tuga: a mehada papek Kinerja Anggaran dan asapek Kinerja Anggaran dan asapek Kinerja Anggaran dan asapek Kinerja Anggaran dan asapek kinerja Internal sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi cakupan penilaan dan bangan apek-aspek yang menjadi cakupan penilaan dan dan Aspek Kinerja Internal; berikutunya dan Aspek Kinerja Internal; berikutunya dan Aspek Kinerja Anggaran, dan Aspek Kinerja Internal; berikutunya dan Aspek Kinerja Anggaran, dan				b. keuangan;	dan tauni dan	
Pasal 3 ayat (2) Tim Penilai memiliki tugas: a. melakukan penilaian terhadap apenk kinerja Internal sewaii dengan aspek-aspek yang menjadi cakupan penilaian dan b. mengusulkan kepada Kepala Lawa memilaian kinerja Unit Kerja yang mempertumbangkan hasil penilaian sebagamana dimakud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Inti Kerja yang mempertumbangkan hasil penilaian sebagamana dimakud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran, dasar pemberian Penghargaan  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Panal Lawa (3)  Danal Lawa (3)  Tiridak ada sebelumnya  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Panal Lawa (3)  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Danal Lawa (3)  Tim Penilai dan tun sekretariat ditetapkan oleh Sekretaria Utama pengelokan sekretariat ditetapkan oleh Sekretaria Utama pengelokan dan dimakud pada ayat (3) huruf e diberikan melalui penilaian sebagamana dimakud pada ayat (3) huruf e diberikan melalui penilaian sebagamana dimakud pada ayat (3) huruf e diberikan melalui penilaian sebagamana dimakud pada ayat (3) dan (4)  Tidak ada sebelumnya  Tidak ada sebelumnya dimakud pada ayat (2) dan (4)  (5)  Pengurangan alaksukan angarat direkasa dagatan dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan paga sebagamana dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan anggarat dagat mengurangi alaksan anggarat pengurangan alaksan paga sebagamana dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan anggarat pengurangan alaksan paga sebagamana dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan anggarat pengurangan alaksan paga sebagamana dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan anggarat pengurangan alaksan pagarat penganan dimakud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alaksan anggarat pengurangan alaksan paga anan dimakud pada ayat (2)				d. pengelolaan Baran	g Milik Negara;	
Tim Penilai memiliki tugas: a. melakukan penilaiain terhadap aspek Kinerja Anggaran dan aspek Kinerja Anggaran anggaran dan aspek Kinerja Anggaran dan aspek Kinerja Anggaran anggaran anggaran dan aspek dan anggaran anggaran dan aspek dan anggaran anggaran anggaran dan aspek dan dan dan aspek dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Da	sal 3 avat (2)	v	e. pengawasan intern	al.	
A Sinerja Anggaran dan apek Kinerja Anggaran dan apek Kinerja Anggaran dan apek Kinerja Internal sesuai dengan aspek-aspek yang mempertimbangkan hasil mengusukkan kepada Kepala LAN hasil penlaian sebagai dasar pemberian Penghargaan dan Aspek Kinerja Anggaran; dan	Tim Penilai r	nemiliki tuga	is:	Tim Penilai memiliki tug	as:	
aspek Kinerja Internal sesuai dengan aspek-aspek yang menpateriatan (an bilan dengan aspek-aspek yang menpateritan pentalain (an bilan dasar pemberian Penghargaan (an aspek-aspek yang menperitan maksud dalam huruf a dan Aspek Kinerja Anggaran, dasar pemberian Penghargaan (an aspek-aspek) (an aspek-aspek) (bilan dasar pemberian Penghargaan (an aspek) (bilan dasar pemberian penghargaan (an aspek) (bilan dasar pemberian mengusulkan kepada Kepala LAN hasi  Penghargaan dan/atau Sanksi,  Penal 4 ayat (2) dan (6) (5) Dalam melakasnakan tugas Tim Pendial dapat dibantu olah sekretariat, ditetapkan olah Sekretaria Viama pengelolaan Barang Mida Negara;  Pemberian menuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (bilan dapat dibantu olah sepak ditetapkan melalui penambahan olakasi pagu anggaran tahun berikutnya.  Pasal 8 ayat (1) huruf (bilan diban dasar pagu anggaran tahun berikutnya) (bilan dasar pengelokan Barang Mida Negara;  Pemberian menuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembahan alokasi pagu aspekagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembangan kompetensi pengawai direlokasi dari:  a. kegiatan yang tidak termasuk prioritan sasional, din agaj dan banggaran dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan bunjangan;  a. gaji an tunjangan: a. gajian tunjangan: beragawai Pasal 8 ayat (3) (2) pengembangan kompetensi pengawai dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan bunjangan; beragawai Pasal 8 ayat (3) (2) pengembangan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangan dan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangan dan dan dan dan dan dalam beragaman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangan dan dan dan dan dan dalam beragaman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak mengurangan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d					terhadap Aspek	
menjadi cakupan penilaian; dan b. mengsusulkan kepada Kepala LAN hasil penilaian sebagai dan c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasi penilaian sebagai dan c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasi  Penghargaan dan/atau Sankai.  Penghargaan dan/atau Sankai.  Panal a yari (3) dan dapat dap	aspek Kir	nerja Internal	sesuai	b. menyusun hasil penil	aian Kinerja Unit	
b. mengusulkan kepada Kepala LAN hasil penilaian sebagai dasar pemberian Penghargaan  c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasi  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Panal 4 ayat (2) dan (6) (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dapa dibantu oleh tun sekretarat.  direkipakan oleh Sekretarat Usuma pengelolaan Barang Mitik Negara;  Pemberian insenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberiban in melalui penambahan berikutnya.  Pemberian insenti selam insenti se		spek-aspek y zakupan peni	ang laian: dan	Kerja yang memperti penilaian sebagaiman	mbangkan hasil a dimaksud dalam	
dasar pemberian Penghargaan c. mengusulkan kepada Kepala LAN hasi  Penghargaan dan/atau Sanksi.  Pasal 4 ayat (2) dan (6) (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Penlai dika da sebelumnya  Penberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf c. diberikan melalui penambahan berikutnya.  Penberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diberikan melalui penambahan berikutnya.  Penberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf c. diberikan melalui penambahan berikutnya.  Pasal 8 ayat (3) dan (4)  Penberian insentif sebagamana dimaksud pada ayat (2) dapan (4)  Penmenbahan alokasi bagainana direkokasi dari direkokasi	b. mengusu	lkan kepada l	Kepala	huruf a dan Aspek Ki	nerja Anggaran;	
Penghargaan dan/atau Sanksi.  Danal 4 ayat (2) dan (6)  Tirdak ada sebelumnya  Panal 7 ayat (2)  Pemberian insentif sebagaimana dimakudi pada ayat (3) huruf e diberikan insentif sebagaimana dimakudi pada ayat (1) huruf e alakudi pagu anggaran tahun berikutnya.  Pemberian insentif sebagaimana dimakudi pada ayat (3) huruf e diberikan melalui berikutnya tentitung sebagaimana dimakudi pada ayat (3) huruf e diberikan melalui berikutnya.  Pemberian insentif sebagaimana dimakudi pada ayat (3) huruf e diberikan melalui berikutnya tentitung sebagaimana dimakudi pada ayat (2) dan (4)  Tidak ada sebelumnya  Dengurangan alakudi ayat (2) dan dimakudi pada ayat (2) dan dimakudi pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan pagaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan nggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras pengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras untuk anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alakan anggaras ayat (2) huruf a tidak dapat me					Kepala LAN hasi	
Pemberian insentir sebagaimana dimekundi diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya.  Panal 8 ayat (2)   (2) Pengurangan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya terikutnya berikutnya terikutnya sebagaimana dimakudi pada ayat (2) dan (4)   (3) Pengurangan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya terikutnya sebagaimana dimakudi pada ayat (2) dan (4)   (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimakudi pada ayat (2) dan (4)   (4					Pasal 4 ayat (5) dan (6) (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe	nilai
dimakuud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan berikutnya.  Panal 8 ayat (2) huruf a tidak melalui penambahan alokasi pagu anggaran tahun berikutnya.  Panal 8 ayat (2) dan (4)  Tidak ada sebelumnya  Panal 8 ayat (2) dan (4)  Dengurangan alokasi pagu sebagainana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat ayat (3) pengurangan alokasi naggaran sebagainana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat ayat (3)  Pengurangan alokasi naggaran sebagainana dimaksud pada ayat (3)  Pengurangan alokasi naggaran sebagainana dimaksud pada ayat (3)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (3)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (3)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (4)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (4)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (4)  Dengurangan alokasi naggaran sebagainana dimaksud pada ayat (3)  Panal 8 ayat (3) (2) dan (3)		4	т	idak ada sebelumnya	Pasal 4 ayat (5) dan (6) (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe dapat dibantu oleh tim sekretariat. (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama	ailai
diberikan melalui penambahan alahum penambahan alokung sepak ditetapkannya berikutnya.  Panal 8 ayat () dan (4) (3) Penambahan alokus bebagainanan sebagainanan dimaksud pada ayat (3) dapat d		4		Pasal 7 ayat (2)	Pasal 4 ayat (5) dan (6)  (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe dapat dibantu oleh tim sekretariat. (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pasal 8 ayat (2)	
berikutnya.  hasil pentiasan  (1) Pengun alokas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dapat direkas dapat			Pemberia	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c	Pasal 4 ayat (5) dan (6)  (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe dapat dibantu oleh tim sekretariat, (6) Tim Penilai dan tim sekretariat, ditetapkan oleh Sekretaria Utama, pengelorian pengelorian dibangan pengelorian insentif sebagaimana dimak pada ayat (1) huruf c diberikan melalui	sud
(3) Penambahan alokasi sebagaimana dimakud pada ayat (2) dilakukan dimakud pada ayat (2) dapat direlokasi dari a pada ayat (3) dapat direlokasi dari a pada ayat (3) dapat direlokasi dari a pada ayat (3) pengurangan alokasi pagu dan tunjangan pegawai, bangaran pada unitkeria yang memperoleh sanksi.  (3) Pengurangan alokasi pagu direlokasi dapat dan tunjangan pegawai, bangaran pada dapat dan dan dan dapat mengurangi alokasi anggara unitke gaji dan tunjangan. (4) Penghamatan represangan alokasi anggara unitke gaji dan tunjangan. (5) Pengurangan alokasi anggara unitke gaji dan tunjangan. (6) Penghamatan represangan alokasi anggaran protrata nasional. (7) Penghamatan represangan alokasi anggaran protrata nasional. (8) Penghamatan represangan alokasi anggaran protrata nasional. (9) Penghamatan represangan alokasi anggaran protrata nasional.			Pemberii dimaksu diberikar	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melalui penambahan	Pasal 4 ayat (5) dan (6) (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretarist ditetapkan oleh Sekretaris Uama pengelolaan Barang Milik Negara; Pasal 8 ayat (2) Penherian (msentif sebagaimana dimak pengelolaan barang pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan dibakan pengelolaan dibakan pengelolaan dibakan pengelolaan alekan pengua anggaran tah	sud
Tidak ada sebelumnya			Pemberia dimaksu diberikar alokasi p	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melalui penambahan sagu anggaran tahun	Pasai 4 ayat (5) dan (6)  (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Pe dapat dibantu oleh tim sekretariat.  (6) Dalam keretariat.  (7) dapat dibantu oleh tim sekretariat.  ditetapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara;  Pasai 8 ayat (2)  Pemberian insentif sebagaimana dimak pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tah hasid penjalam.	sud
6 Tidak ada sebelumnya dimaksud pada ayat (2) dapat dicekasai dari: a proteita nasional, dan gaji dan tunjangan pegasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat ayat (2) pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembangan kompetensi pegawai dapat ayat (2) pengembangan kompetensi pegawai penganan dimaksud pada ayat (2) pengembangan kompetensi pegawai penganan dimaksud pada ayat (2) (2) penganan adimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat mengurungi alokasi anggarar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) penganan dimaksud pada ayat (2) penganan dapat mengurungi alokasi anggarar sebagai			Pemberia dimaksu diberikar alokasi p	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melalui penambahan sagu anggaran tahun	(5) Dalam melaksanakan tugas Tin panam melaksanakan tugas Tin panam melaksanakan tugas Tin (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaria Usana pengelolapasas Sayat (2) Pemberian insentif sebagaimana dimak pada ayat (1) huruf c diberikan melalui berikutunya terhitung sejak dietapkannya hasii penilatan (3) Penambahan alokasi sebagaimana	sud
a. kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tunjangan pegawai;  Dengumangan alokadengeu sebagaingan dengumangan alokadengeu sebagaingan dengumangan dengu			Pemberia dimaksu diberikar alokasi p	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melalui penambahan sagu anggaran tahun	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pemberian insentif sekretaris Utama pada ayat (1) huruf c diberikan melalui penambahan alokasi pagu anggaran tah penambahan alokasi pagu anggaran tah penambahan alokasi sebagaimana Pasal Sayat (2) dan (4) (3) Penambahan alokasi sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku;	sud
tunjangan pegawai; b. anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.  (3) Pengurangan alokasi pagu (3) Pasai 9 ayat (3) (3) Pengurangan alokasi pagu bebagaiman ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi naggaran unitak dan tunjangan; b. prioritas nasional; dan e. pengembangan kompetensi pegawai (4) Penghamatan repurangi alokasi anggara unituk gaji dan tunjangan; b. prioritas nasional; dan e. pengembangan kompetensi pegawai (4) Penghamatan repurangi alokasi anggaran prioritas nasional.  Pasai 10 ayat (1), (2) dan (3) (1) Penghargaan sebagaiman dimaksud		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi p berikutny	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melahii penambahan agu anggaran tahun 22.	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pemberang Manganakan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	sud
b. anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.  Pasal 8 ayat (3)  (3) Pengurangan alokasi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huuruf a tidak dapat mengurangi alokasi naggaran ia gaji dan tunjangan; a. gaji dan tunjangan; b. prioritas nasional; dan e. pengembangan kompetensi pegawai  pegawai  Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)  (1) Pengurangan alokasi naggaran prioritas nasional.		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi p berikutny	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melahii penambahan agu anggaran tahun 22.	(5) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) dapat dibantu oleh tun sekretariat (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaria Utana pengelolah pasail 8 ayat (2) Pemberian imentif sebagaimana dimak penambahan alokasi pagu anggaran tah berikutuny serhitung sejak dietapkann hasti penilaian. B ayat (3) dan (4) (3) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dimaksud pada ayat (2) dapat dimaksud pada ayat (3) dapat dimaksud pada dayat (3) dapat dimaksud pada ayat (3) dapat dimaksud pada dayat (3) dapat	sud
(3) Pengurangan alokasi pagu ayat (2) (3) Pengurangan alokasi pagu ayat (2) huruf at tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk:  """ """ """ """ """ """ """ """ """		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi p berikutny	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melahii penambahan agu anggaran tahun 22.	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolap asal Sayat (2) Pemberian insentif sekretaris Utama pada ayat (1) huruf c diberikan melalui pada ayat (1) huruf c diberikan melalui pada ayat (1) huruf c diberikan melalui perikutunya terhitung sepak ditetapkanny hasil penilaian. (5) Penala Sayat (2) dan (4) (7) Penala Sayat (2) dan (4) (8) Penambahan alokasi sebagaimana dimakeud pada ayat (2) dapat dimakeud pada ayat (2) dapat dimakeud pada ayat (3) dapat dirakeud pada ayat (3) dapat (4) dapat dirakeud pada ayat (4) dapat (4) dapat (4) dapat dirakeud pada ayat (4) dapat (4) dap	sud
(2) Pengurangan alokasi pagu sebagaimani s		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi p berikutny	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana d pada ayat (1) huruf c n melahii penambahan agu anggaran tahun 22.	(5) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) dapat dibastu oleh tun sekretariat (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietajakan oleh Sekretaria Utana pengeloi Pasail 8 ayat (2) Peniberian imentif sebagaimana dimak penambahan alokasi pagu anggaran tah berikutuya terhitung sejak dietajakann hasil penibasi serbagaimana dimak- dimaksud pada ayat (2) dilakukan dimaksud pada ayat (2) dajat dimaksud pada ayat (2) dapat a. kegistan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tim jangan pegawai kerja yang	sud
ayat (2) huruf a tidak dapat mengurangi alokasi anggaran untuk:  a. gaji dan tunjangan; b. prioritas nasional, dan c. pengembangan kompetensi pegawai  Pasal [0 ayat (1), (2) dan (2)  [10 Penghargaan sebagamana dimaksud		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi p berikutny	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana insentif sebagaimana n melalui penambahan agu anggaran tahun ya. idak ada sebelumnya	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe Dalam dan tim sekretariat Usana pengeloran melaksanakan tugan Usana Penaberian menuti sekretariat Usana pada ayat (1) huruf c diberikan melalui pada ayat (1) huruf c diberikan melalui pada ayat (1) huruf c diberikan melalui perikutanya terhitung sejak ditetapkanny hasil penilatan Dalam alaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dimaksud pada ayat (2) dajak dimaksud pada ayat (2) dapat direlokasi dari:  a. kegiatan yang tidak termasuk tujangan pegawai; b. anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.	sud
untuk: a gaji dan tunjangan; b prioritas nasional; dan c pengembangan kompetensi pegawai  Pasai [0 ayat (1), (2) dan (3)  Pasai [0 ayat (1), (2) dan (3)  (1) Penghangaan sebagamana dimaksud		5	Pemberii dimaksu diberikar alokasi berikutn	Pasal 8 ayat (2)  Pasal 8 ayat (2)  Pasal 8 ayat (2)  Pasal 8 ayat (2)	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pemberian insentif sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pemberian insentif sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; Pemberian insentif sekretaris melalui penambahan alokasi papu anggaran tah penalaan papul dietaphama papul dietaphama penambahan alokasi sebagaimana penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada sayat (2) dapa ti Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada sayat (2) dapa tah a. kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tunjangan pegawai. b. hemperoleh sanksi.  [3] Penambahan akaksi. [4] Penambahan akaksi. [5] Penambahan akaksi. [6] Penambahan akaksi.	sud un a
b. prioritas nasional; dan  c. pengembangan kompetensi pegawai  Pasai [0 ayat (1), (2) dan (3)  (1) Penjangan sebagaman dimaksud		5	Pemberi dimaksu diberika alokasi p berikuta: Ti	Pasal 7 avat (2) an inscentif refragamana di pada ayat (1) huruf ce ninelahui penambahan lagu anggaran tahun (2) idak ada sebelumnya  Pasal 8 ayat (2) urunggan aloksasi pagu urunggan aloksasi pagu (2) huruf a tidak dapat	(5) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalum Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalum Penilai dan tim sekretariat (6) Tim Penilai dan tim sekretariat (7) Dalum Penilai dan tim sekretariat Dalum Penilai dan tim sekretariat Dalum Penilai dan tim sekretariat Dalum Penilai dan	sud un a
Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud		5	Pemberii dimaksuu diberikaa alokasi p berikutn; Ti (3) Peng seba <sub>1</sub> ayat men <sub>1</sub>	Pasal 7 ayat (2) In menuti rebagaimana dinakasi pagu In menuti rebagaimana dinakasi anggarana	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milli Negaria. Pemberian insentif sekretaris Utama pengelolaan Barang Milli Negaria. Pemberian insentif sekretaris Utama pada ayat (1) huruf c diberikan melalui berikutuya terhitung sepak dietapkanah basil penilaian. (3) Penali ayat (3) dalakukan dimaksud pada ayat (3) dalakukan sesua ketentuan yang beriaku; (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direlokasi dari: a. kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan b. anggaran pada unit kerja yang memperoleh sanksi.  (3) Pengurangan alokasi pagu sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a i dapat menguranga alokasi angg	sud un a a a a a a a a a a a a a a a a a a
(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud		5	Pemberi dimaksu diberikata alokasi p berikuta Ti	Pasal 7 ayat (2) an insentif sebagaimana insentif sebagaimana an insentif sebagaimana ki ki ki pasal 8 ayat (2) purangan alokasi pagu gaimana diniakud pada gurangi alokasi anggaran ki ki ki purangi alokasi anggaran ki ki purangi alokasi anggaran ki ki purangi alokasi anggaran ki	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Utama pengelola Pasal Sayat (2) Manapada ayat (1) huruf c diberikan melaku pada ayat (1) huruf c diberikan melaku perikutnya terhitung sepak ditetapkannyhasil penilaian. Sayat (2) dan (4) (7) Penabalahasan pada ayat (2) dan (4) (8) Penabalahasan ayat (2) dan (4) (9) Penabalahasan ayat (2) dapat dimakeud pada ayat (2) diakukan sesua ketentuan yang berlaku; (4) Penambahan alokasi sebagaimana dimakeud pada ayat (2) dapat dimakeud pada ayat (2) dapat dimakeud pada ayat (3) huruf a dimakeud pada ayat (4) huruf a dimakeud pada ayat (5) huruf a dimakeud pada ayat (6) huruf a dimakeud pada ayat (7) huruf a dimakeud pada ayat (7) huruf a dimakeud pada ayat (8) huruf a dimakeud pa	nanz idak arar
		5	Pemberii dimaksu diberikati berikuti Ti 3) Peng seba ayat men untul 2. g	Pasal 7 ayat (2)  Pasal 7 ayat (2)  In minimana di pada ayat (1) huruf ci nelalui penambahan agu anggaran tahun (2).  Idak ada sebelumnya didak ada sebelumnya didak ada sebelumnya (2), murangan alokasi pagu gamana dimaksud pada (2) huruf a tidak dapat (2) huruf a tidak dapat (2), muruf a tidak d	(5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (5) Dalam melaksanakan tugan Tim Pe (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietapkan oleh Sekretaris Utama pengelolaan Barang Milik Negara; pengelolaan separa dietapkanakan pengaran tah hasil penilaian. (3) Penambahan alokasi sebagaimana dimakan penilaian dietapkanakan pengaran tengarang dimakanakan pengaran tah dimakanakan pengaran; a. kegiatan yang tidak termasuk prioritas nasional, dan gaji dan tunjangan pegaran; tunjangan pegaran; bengurangan alokasi pagu sebagai dimaksud pada ayat (2) duruf a i dapat mengurangi alokasi ang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penghematani reforeuting sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b tidak dapat mengurangi alo anggaran prioritas nasional.	nanz idak arar
		6	Pemberis dimaksu diberikata alokasi p berikuta Ti	Pasal 7 ayat (2) In insentif sebagaimana In insentif sebagaimana In mentif sebagaimana In mentif sebagaimana In mentif sebagaimana dinagu anggaran tahun In mentif sebagaimana dinagu anggaran tahun In mentif sebagaimana dinagun alaksasi pagu In mentif sebagaimana dinagun alaksasi pagu In mentif sebagaimana dinagun alaksasi anggarana dinagun alaksasi anggarana anggaranana dinagun alaksasi anggaranananan dinagun alaksasi anggarananan dinagun alaksasi anggaranan dinagun alaksasi anggaranananan dinagun alaksasi anggarananan dinagun alaksasi anggaranan dinagun alaksasi anggaranan dinagun anggarananan dinagun anggarananan dinagun anggaran dinagun anggaran tahun yanggaran dinagun anggaran tahun yanggaran dinagun anggaran dinag	(5) Dalam Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalam Pasail 4 ayat (5) dan (6) Dalam Pasail 6 ayat (7) dapat dibami oleh tun sekretariat (6) Tim Penilai dan tim sekretariat dietajakan oleh Sekretaria Utana Pengelola Pasail 8 ayat (7) Penmberian imentif sebagaimana dimak- penanthahan alokasi pagu anggaran tah berikutuny serhitung sejak dietajakanny- hasti penilatan dimaksud pada ayat (2) dalakukan dimaksud pada ayat (2) dapat dimaksud pada ayat (2) huruf at penanthahan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf at dapat menguranga alokasi anga dimaksud pada ayat (2) huruf at dapat menguranga alokasi anga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pengurangan alokasi anga sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat anggaran prioritas nasional.  Pasai 10 ayat (3) (2) dan (4) (1) Penghagana sebagaiman dimaksud	nansidak arar (2)

No Sobelum Indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Reusangan tersebut berasal dari 2 (dua) penilaian yaitu.  1. Indikator Kinerja Pelaksanasan danatasa pengenian Sankisi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kinerja Pelaksanasan danatasa pengenian Sankisi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kinerja (dua) aspek yang terdiri atas 2. (dua) aspek yang senuai dengan kebutuhan LAN, yaitu aspek manfiat dan aspek implementasi diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja diperoleh dari nilai EKA			alam Pasal 5. imana lapat rja yang penilaian liberikan Sanksi ada ayat (2) lal.		
Indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut berasal dari 2 (dua) penilaian yaitu: 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan 1. Anggaran (IKPA) yang terdiri atas 1. 3 (tiga belas) indikator; dasa 2 (dua) apple yang tenusi dengan kebutuhan LAN, yaitu aspek manfaat dan aspek implementasi. Penilaian aspek Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja yang terdiri atas 2. Unit Kerja dengan bebot 33,3% (tiga pulsh tiga koma tiga persen), (tiga pulsh tiga koma tiga persen),				mpiran	
Peraturan Menteri Keuangan tersebut berasal dari 2 (dua) penlaian yaitu:  1. Indikator Kimerja Pelaksanaan 1. Indikator Kimerja Pelaksanaan 2. indikator EKA yang terdiri atas 2 (dua) aspek yang sesuai dengan kebutuhan LAN, yaitu aspek Penlaian aspek Kimerja Anggaran diperoleh dari milai EKA Unit Kerja Penlaian aspek Kimerja Anggaran diperoleh dari milai EKA Unit Kerja yang terdiri atas 2. Yang terdiri atas 2. Unit Kerja dengan bebot 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen). (tiga puluh tiga koma tiga persen).	No				
Penilaian aspek Kinerja Anggaran diperoleh dari nilai EKA Unit Kerja yang terdiri atas:  a. EKA atas aspek implementasi Unit Kerja dengan beboto 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen).	1	Peraturan Menteri berasal dari 2 (dua 1. Indikator Kine Anggaran (IKF 13 (tiga belas) 2. indikator EKA (dua) aspek ya kebutuhan LAI	i Keuangan tersel a) penilaian yaitu rija Pelaksanaan PA) yang terdiri indikator; dan a yang terdiri atau ing sesuai dengar N, yaitu aspek	dan/atau pengenaan Sanksis ei eitetapkan dalam Peratura Keuangan tersebut berasal atas s 2 n	yang Menteri
Penilaian aspek ini dilakukan untuk memperoleh informasi Kinerja mengenai penggunaan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian RO. b. EKA ataa aspek manfaat Unit kerja dengan bobot 66,7% (enam	2	Penilaian aspek K diperoleh dari nila yang terdiri atas: a. EKA atas aspe Unit Kerja den (tiga puluh tiga Penilaian aspel untuk memper Kinerja menge anggaran dalar pelaksanaan ko pencapaian RC b. EKA ataa aspe	kinerja Anggaran in EKA Unit Kerjek implementasi agan bobot 33,3% a koma tiga persik ini dilakukan roleh informasi enai penggunaan m rangka egiatan dan 0.0k manfaat Unit	Penilaian aspek Kinerja Ar diperoleh dari nitai EKA U berdasarkan instrumen yan 6 menyelenggarakan urusan bidang keuangan.	nit Kerja g ditetapkan
memperoleh informasi Kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan melalui indikator sasaran kegiatan Unit Kerja. Aspek ini diperoleh dari capaian sasaran kegiatan yang penghitungan capaian sasaran Jungton sasaran kegiatan yang penghitungan capaian sasaran program  Unitur perencanaan dengan bobot  Unitur perencanaan dengan bobot (empet publih persen)  Tahapan revisi anggaran merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tesup anggaran tesup berdasarkan nilai rata-rata sevisi DIPA per tahun (dambil dari aplikasi SATUDIA)  Tahapan revisi anggaran merupakan revisi anggaran dinilai dengan kriteria sebagai berkut: a) 0 - 1 kali revisi - 100 b) 2 - 3 kali revisi - 100 c) 4 - 6 kali revisi - 50 d) > 5 kali revisi - 10 Pengisian Aplikasi SMART dan pelaporan capaian indikator Sasaran dinilai belas persen).  Tahapan indikitung berdasarkan nilai rata-rata sevisi per tiretria sebagai serkut: a) 0 - 1 kali revisi - 10 d) > 10 kali revisi - 10 pengisian Aplikasi SMART dan pengisian Aplikasi SMART aratarata pengisian Aplikasi SMART Penlaian ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART dihitung derdasarkan nigal rata-rata ketepatan waktu pengisian Aplikasi SMART dihitung dengan Aplikasi SMART dihitung dengan Aplikasi SMART dihitung dengan anggal tengal tanggal			meage melalu language melalu l	mai pelaksamaan kegiatan in indikator sanaran kegiatan in sasaran kegiatan yang ug menggunakan formula tungan capaian sasaran perencananan dengan bobot enam puluh persen) ne terisi anggaran merupakan in revisi anggaran dinitan dan indikator sanaran dinitan sanaran terisi anggaran dinitan sanaran sanaran sanar	(empai putuh persen) Tahapan revisi anggaran merupakan Tahapan revisi anggaran dihitung Nilai revisi anggaran dihitung berdasarkan nilai rata-rata revisi per trivulian Tahapan revisi anggaran dinilai dengan kriteria sebagai berikut  0) 4 – 6 kali revisi = 50 0) 7 – 9 kali revisi = 20 Pengisian Aplikasi SMAKT dengan bobot 596 (lima persen).  Tahapan ini dihitung berdasarkan nilai



satu) sampai dengan nilai 100

baik dengan capaian nilai 80,01

(delapan puluh koma nol satu) sampai dengan nilai 90,0

sampai dengan nilai 90,0
(sembilan puluh koma nol);
3. cukup baik dengan capaian nilai
70,01 (tujuh puluh koma nol satu)
sampai dengan nilai 80,0 (delapan
puluh koma nol), dan
4. kurang baik dengan capaian nilai
kurang atus sam, dengan 70,0

kurang atau sama dengan 70,0 (tujuh puluh koma nol).



satu) sampai dengan nilai 100

kurang atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol nol)

puluh koma nol nol);
"cukup baik" dengan capaian nilai
60,01 (enam puluh koma nol satu)
sampai dengan nilai 75,00 (tujuh
puluh lima koma nol nol); dan
"kurang baik" dengan capaian nilai

"baik" dengan capaian nilai 75,01

(tujuh puluh lima koma nol satu) sampai dengan nilai 90,00 (sembilan

# Area Perubahan Peraturan Kepala LAN

			_		
15	yang ditentukan = 100 b) telak melaporkan = 20 c)	c) tidak melaporkan = 0  Unsur pengawasan dengan bobot 307 (tiga puluh persen), terdiri atas: rekomendasi hasil audit internal, dengan bobot 10% (tima persen), rekomendasi hasil awti mternal, dengan bobot 8% (tempat persen) rekomendasi hasil rewin RKARL. dengan bobot 8% (tempat persen) dokumen Manajemen Risiko Uni Kerja, dengan bobot 2% (satu persen) dokumen Pemantauan Manajeme Risiko Unit Kerja, dengan bobot 5) persentaae tindak lanjut rekomendasi hasil rewin dokumer  (terjan bat melaporkan = 50 (Dasu pengawasan dengan bobot 15% (tima belas persen), terdiri atas: (JEKASN), dengan bobot 15% (tima belas persen), terdiri atas: (JEKASN), dengan bobot 2% (dua persen) dokumen Manajemen Haria (LEKASN), dengan bobot 2% (dua persen) dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen) dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja, dengan bobot 2% (dua persen) kerja, dengan bobot 2% (dua persen) dokumen Manajemen Risiko Unit Kerja), dengan bobot 4) hasil penjatana evaktupa etasi mplementasi Sistem Pemerunai (SAKIP) Unit Kerja	e) Un (ti	tidak melaporkan = 0  nsur pengawasan dengan bobot 30% ga pubah persen), terdur atas: rekomendas hasal andir internal, dengan bobot 10% (lima persen), bersentase tindak lanjur ketepatan waktu penyampain dokumen Pemantauan Manajemen Kusko Unit Kerja, dengan bobot 2% (aatu persen) Krisko Unit Kerja, dengan bobot 2% (aatu persen) rekomendasa hasai reviu dokumen Manajemen Risiko, dengan bobot hasil penjaminan kusalitas	
	15	5) hasil penjaminan kualitas Manajemen Raisko Indeke (MRI) (empat persen) Ketepatan waktu penyampain dokumen Manajemen Raisko Unit Tahapan ini dinilal dengan kriterii sebagai berikut si kurang dari sampai dengan wa bi kurang dari sampai dengan wa bi terlambat melaporkan = 50 bi tidak melaporkan = 20 tidak melaporkan = 20		Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen)  (dua persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100 b) terlambat melaporkan = 50	Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) kurang dari sampai dengan waktu yang ditetapkan = 100 b) terlambat melaporkan = 50
	16	Ketepatan waktu penyampaian	17	c) tidak melaporkan – 20 Hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MKI) Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen). Tahapan ini dinilai dengan kriteria sebagai berikut: a) nilai MRI 5 = 100 b) nilai MRI 3 +4 = 75 c) nilai MRI 1-2 = 50 d) nilai MRI 1-2 = 50 d) nilai MRI -1 = 25	c) tidak melaporkan = 0 Hasil penjaminan kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Unit Kerja dengan bobot 4% (empat persen). Tahapan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:  Nilai MRI unit kerja nilai max MRI  = kualitas MRI
				Kualifikasi penilaian Kinerja ditetapkan sebagai berikut: 1. sangat baik dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol	Kualifikasi Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi 1. "sangat baik" dengan capaian nilai 90,01 (sembilan puluh koma nol



# CAPAIAN JANGKA PENDEK



2

Terbangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN berbasis web dan android





3

Komitmen pembentukan CoP (Analis Anggaran, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Perencana)









#### Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai



# **NLAN RI** KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR: 71 / 5.1 / HKM -92. 2

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ATAS KINERJA UNIT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Utama tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)





# Hasil penilaian sampai dengan Triwulan III







			Komponen	Komponen
No	Komponen	Total Nilai	Tertinggi	Terendah
1	Inspektorat	34.29	Pengisian SMART	MRI
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	33.93	Pengisian SMART	MRI
3	PK2AN	33.88	Pengisian SMART	
4	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	33.50	Pengisian SMART	MRI
5	Pusat Data dan Informasi	33.34	Pengisian SMART	MRI
6	Pustekbangkom	31.63	Pengisian SMART	MRI
7	PIMBANGKOM ASN	31.54	Pengisian SMART	MRI
8	Puslatbang KMP	31.37	Pengisian SMART	MRI
9	Pusbang Kader	31.31	Pengisian SMART	MRI
10	Puslatbang PKASN	31.07	Pengisian SMART	MRI
11	Puslatbang KDOD	31.01	Pengisian SMART	MRI
12	Pusbangkom Pimnas	30.97	Pengisian SMART	MRI
13	P3K	30.75	Pengisian SMART	MRI
14	Puslatbang KHAN	30.62	Pengisian SMART	MRI
15	PUSAKA	30.50	Pengisian SMART	Implementasi
16	PKMASN	29.35	Pengisian SMART	MRI
17	Politeknik STIA LAN Makassar	29.05	Pengisian SMART	MRI
18	Politeknik STIA LAN Bandung	28.61	Pengisian SMART	MRI
19	PIAN	28.56	Pengisian SMART	Implementasi
20	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	27.96	Pengisian SMART	MRI
21	Pusbin JF Bangkom	27.51	Pengisian SMART	MRI
22	Pusbangkm TSK	26.83	Pengisian SMART	MRI
23	Politeknik STIA LAN Jakarta	26.44	Pengisian SMART	MRI





Membangun komunikasi aktif dengan stakeholders

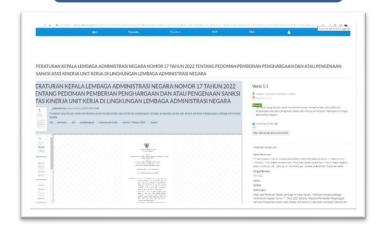
# IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

website https://sipekerja.lan.go.id/



https://drive.google.com/file/d/1QGyxoqVUQTGD07T1wBHfoWWLNZ0Snq1D/view?usp=share\_link

http://jdih.lan.go.id/regulasi



Play Store



IG Humas LAN(@humas\_lan)



https://flipbooklets.com/pdfflipbooklets/peraturan-kepala-lan-no-17-tahun-2022



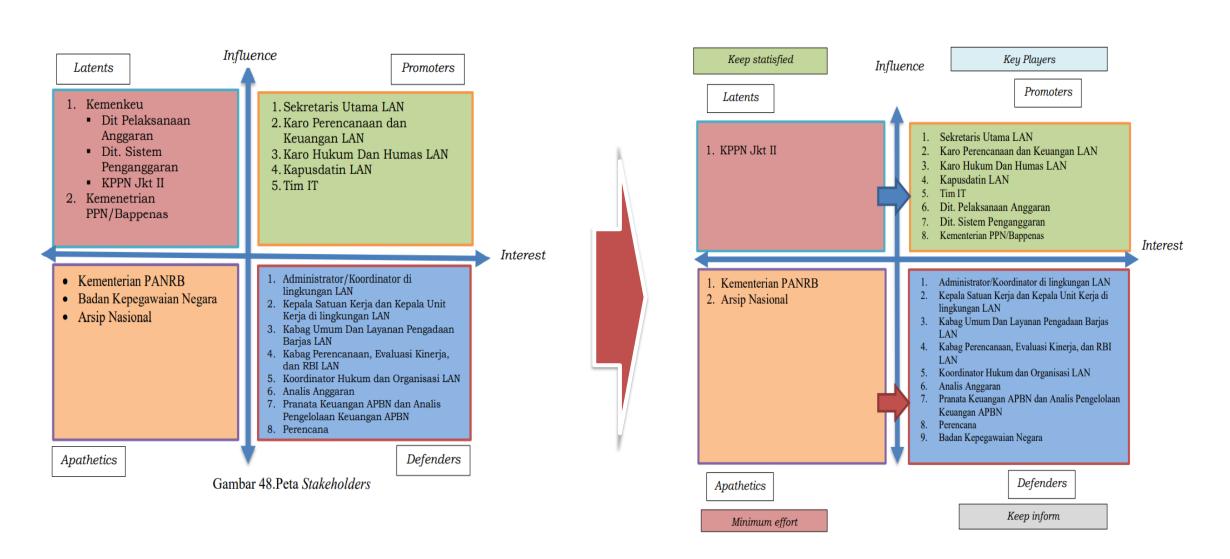






# PERUBAHAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS







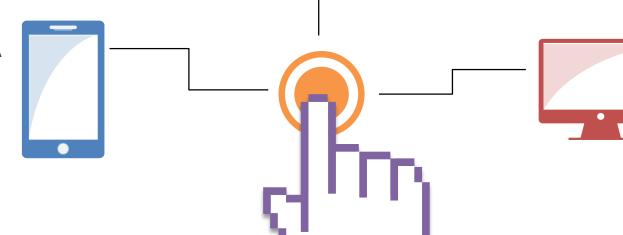
# KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN



Dukungan Pimpinan untuk penggunaan Peraturan Kepala LAN sebagai kebijakan penilaian kinerja anggaran LAN

Komitmen untuk alokasi Si PeKerja LAN pada server/domain LAN dan penyediaan anggaran untuk pengembangan

Penggunaan aplikasi Si PeKerjA LAN sebagai alat monitoring capaian kinerja anggaran LAN





http://tracketing.lan.go.id.



# PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR



Community of Practises (CoP)
Mampu memahami kebijakan yang berlaku



Sharing knowledge

Tim Efektif Teknologi Informasi Mampu memahami dan mengembangkan sistem



Diskusi, sharing







Tim Efektif Sekretariat Mampu menggunakan aplikasi

Bimtek, rapat berkala triwulanan



Tim Efektif Substansi Mampu bekerjasama secara efektif



Rapat, konsolidasi, sosialisasi



Stakeholder internal

Mampu menimplementasikan Peraturan

Kepala LAN



Sosialisasi/desiminasi



# KEPEMIMPINAN STRATEGIS



DOWNLOAD 🕹

Memanfaatkan kerjasama dengan para stakeholders, baik internal maupun eksternal.



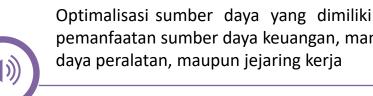
Menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dalam pencapaian proyek perubahan sesuai dengan kepentingan dan kompetensi masing-masing

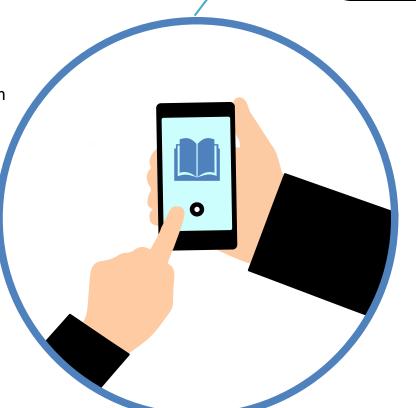


Mendorong dihasilkannya inovasi untuk optimalisasi capaian proyek perubahan



Optimalisasi sumber daya yang dimiliki melalui pemanfaatan sumber daya keuangan, manusia, sumber







# TUJUAN DAN MANFAAT

# Tujuan

Capaian kinerja aggaran yang optimal secara berkesinambungan melalui:

- ☐ Penyusunan kebijakan tentang reward and punishment
- ☐ Penyediaan informasi capaian kinerja anggaran secara digital berbasis web dan android
- ☐ Pembentukan *Community of Practises* (CoP)



#### **Manfaat**

- ☐ Tersedianya acuan baku bagi Lembaga Administrasi Negara dalam melakukan penilaian kinerja anggaran
- ☐ Tersedianya media digital untuk inputolah-saji data capaian kinerja anggaran yang berbasis web dan android
- ☐ Tersedianya wadah bagi *knowledge sharing*



# **OUTPUT DAN OUTCOME**

#### **OUTPUT**

- 1. Tersedianya Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2022
- 2. Terbangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN sebagai media input-olah-saji capaian kinerja anggaran
- 3. Terbentuknya CoP

#### OUTCOME

Diperolehnya penghargaan kinerja anggaran terbaik dari Kemenkeu secara berkesinambungan





# Kendala dan Solusi dalam Implementasi Proyek Perubahan

#### Solusi

#### Kendala

- ☐ Kesulitan melakukan pertemuan dengan tim efektif, stakeholders internal dan eksternal karena kesibukan yang tinggi pada akhir tahun
- Pembangunan aplikasi atau sistem informasi membutuhkan waktu yang cukup lama
- → Pembentukan CoP belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu terkait dengan penyusunan kebijakan terkait CoP



- ☐ Melakukan komunikasi intensif melalui WA/WA Group
- memanfaatkan kegiatan lain untuk melakukan FGD, desiminasi Peraturan dan aplikasi
- ☐ dilakukannya pembahasan secara bertahap
- ☐ Melakukan komunikasi intensif melalui WA/WA Group untuk permintaan progress pembangunan aplikasi dengan Tim IT
- menggunakan tim IT dari pihak ketiga namun tetap berkoordinasi dan melibatkan Pusat Data dan Informasi Lembaga Administrasi Negara untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan
- ☐ Diawali dengan pembanguunan komitmen bersama



# MATA PELATIHAN PILIHAN TERKAIT DENGAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

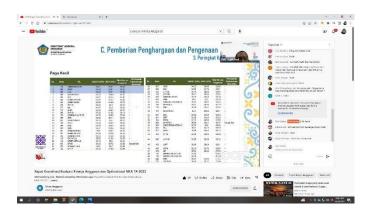


■ Mengikuti Microlearning tentang Pengelolaan TUP melalui LMS KLC2 Kementerian Keuangan tanggal 1 Oktober 2022



mendukung ketepatan dalam pengelolaan TUP yang menjadi salah satu indicator penilaian kinerja anggaran.

☐ Mengikuti rakor evaluasi kinerja anggaran dan optimalisasi NKA TA 2022 tanggal 18 Oktober 2022



■ Mengikuti ZM Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Nasional tanggal 9 September 2022



peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya dengan pembangunan system informasi digital



mengikuti perkembangan penilaian kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan





# **PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022 untuk seluruh unit kerja dan satker di lingkungan LAN pada tanggal 17 Oktober 2022



Menyelenggarakan Bimtek Penggunaan Aplikasi Si PeKerjA LAN pada tanggal 16 November 2022











#### Kerjasama Eksternal

#### Pengembangan melalui Penugasan

Penugasan kerja yang dituntut untuk berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak pemangku layanan eksternal agar terbangun pola hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan pemangku kepentingan

☐ Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Konsolidasi Penyusunan LK TW III Th 2022 pada tanggal 12 Oktober 2022



□ Penugasan untuk membuka, memberikan sambutan dan memimpin pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun TA 2022 pada tanggal 17 Oktober 2022







#### PENGEMBANGAN POTENSI DIRI



Orientasi pada hasil

#### Pengembangan melalui Penugasan

Penugasan dalam mengawal implementasi kebijakan atau produk perubahan pada level tertentu (sesuai kapasitas atau jabatan) dalam hal efektivitas untuk mencapai kondisi yang diharapkan (sesuai standar pimpinan/kebijakan yang berlaku)

☐ Rekonsiliasi penerimaan PNBP setiap Triwulan dengan seluruh unit kerja di lingkungan LAN pada tanggal 18 Oktober 2022



Reward & Punishment

☐ Rekonsiliasi pemenuhan anggaran s.d. akhir tahun pada tanggal 26-28 Oktober 2022









# LESSON LEARNT

01

Strategi komunikasi dan koordinasi level pimpinan dengan
Kementerian/Lembaga selaku Pembina, penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari
Kementerian/Lembaga terkait implementasi proyek perubahan dalam jangka panjang (marketing sektor publik)

02

Aplikasi yang telah dibangun harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan perlu pengembangan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi dalam rangka monitoring dan pengambilan keputusan (kepemimpinan digital)

03

Pelaksanaan focus group discussion atau forum sejenis dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga Pembina penting untuk dilakukan guna mendapatkan kesamaan persepsi (organisasi pembelajar)







#### **KESIMPULAN**





Dengan terbitnya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor17 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan terbangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN diharapkan terjadi akselerasi peningkatan kinerja anggaran Lembaga Administrasi Negara



Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala LAN tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi maka diharapkan penilaian terhadap kinerja anggaran menjadi lebih komprehensif, sehingga pengambilan keputusan akan lebih baik karena melihat dari berbagai aspek



Monitoring implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan penggunaan aplikasi Si PeKerjA LAN perlu dilakukan secara berkala melalui forum-forum yang dilaksanakan (triwulanan, rapat pimpinan) maupun secara tertulis melalui nota dinas pimpinan dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran



Dengan dibangunnya aplikasi Si PeKerjA LAN diharapkan penilaian kinerja anggaran dapat lebih mudah dan transparan, dan sekaligus dapat menjadi alat monitoring bagi capaian kinerja anggaran.



Keberlanjutan pembentukan *Community of Practises* (CoP) penting dilakukan untuk menjamin tercapainya kesamaan persepsi dan merupakan media untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dapat segera diatasi.







## TINDAK LANJUT

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi dapat dijadikan alat monitoring dan pendorong bagi setiap unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menghasilkan kinerja anggaran secara optimal



Komitmen seluruh jajaran pimpinan dan stakeholders internal sangat diperlukan bagi keberlanjutan implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan aplikasi yang dibangun





# TERIMA KASIH